



Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kediri 2019-2023

**Klaster Industri IKM/UMKM
dan Perdagangan Berbasis Ekowisata**

**Disusun Oleh:
Dr. Harmono, M.Si**



**Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Kota Kediri 2019**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, diperlukan Penguatan Sistem Inovasi di Daerah secara terarah dan berkesinambungan.

Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut harus tercantum dalam **Roadmap** Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Implementasi Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah terwujud dalam Rencana Aksi yang merupakan strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan Sistem Inovasi Daerah, pendanaan dan penanggung jawab

Dengan demikian diperlukan juga komitmen dari stakeholder baik dari Pihak Akademisi, Para Usahawan, Pemerintah maupun Masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kecamatan Kota, Mojoroto dan Kecamatan Pesantren dan Kawasan sekitarnya sebagai daerah yang memiliki daya saing dengan ikon “IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata” dengan olahan makanan, kerajinan rakyat, perdagangan dan Tanaman Bahan Makanan.

Kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Kediri ini diucapkan terima kasih dan selanjutnya dalam rangka implementasinya kedepan tetap diharapkan kerjasama dan partisipasinya.

WALI KOTA KEDIRI

Ttd

BAB I

KONDISI SIDa SAAT INI

1.1. Latar Belakang

Kota Kediri yang merupakan kota UMKM/IKM, Perdagangan, Kota Pendidikan / Santri dan Kota Wisata telah melakukan pemetaan zonasi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata dalam menentukan kerangka kawasan inovatif dan terintegrasi sebagai kerangka kawasan bagi implementasi SIDa, dengan mempertimbangkan berbagai sektor yang multidimensional melingkupi aspek ekonomi, sains teknologi, sosial budaya, tata ruang wilayah, dan aspek keunggulan komparatif potensi kewilayahan, guna menjamin terjadinya proses aglomerasi pertumbuhan ekonomi, diharapkan melalui Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat mengembangkan hilirisasi kluster IKM/UMKM, Perdagangan Berbasis Ekowisata Kota Kediri. Adapun dasar hukum yang memayungi model pembangunan dalam kerangka SIDa didasarkan pada Peraturan Bersama (perber) Kemenristek Dikti No 3 dan Kemendagri No 36 Tahun 2012. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Pada prinsipnya terkait dengan SIDa setiap daerah dituntut untuk menciptakan inovasi, daya saing daerah dan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amanat Perber tersebut secara substansi merupakan kerangka kebijakan pembangunan yang sistematis, sinergis dan menganut prinsip keintegrasian antar sektor dalam rangka mengoptimalkan potensi unggulan daerah, aglomerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing antar daerah, untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan dalam implementasi SIDa. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) secara terintegrasi juga merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang memfasilitasi proses interaksi diantara komponen penguatan sistem inovasi, dan relevan untuk konteks pembangunan dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini.

Selain itu, sesuai agenda nasional dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005 - 2025 dan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikatakan bahwa setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap Penguatan SIDa, penataan SIDa baik

kelembagaan maupun sumberdaya SIDA, mengembangkan SIDA melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat.

Kota Kediri sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya, sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi dibutuhkan suatu penyusunan kerangka kerja strategis yang dituangkan dalam bentuk roadmap. Penyusunan roadmap harus bersifat *bottom-up* untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan potensial yang harus segera dipecahkan, sekaligus dikombinasikan dengan *top-down* dan *bottom-up* sehubungan dengan hasil pemikiran para pakar/akademisi, peneliti dan praktisi yang diberikan kepada pengambil kebijakan, ataupun pemikiran yang berangkat dari para pengambil kebijakan sendiri yang terpenting memenuhi kaidah-kaidah pembangunan inovatif dan kolaboratif serta integratif.

Oleh karena itu, guna mempercepat daya saing daerah maka diperlukan Penguatan Sistem Inovasi di Daerah secara terarah dan berkesinambungan. Sesuai amanat Peraturan Bersama Kemenristek dan Kemendagri dan diperkuat oleh PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa, setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut harus tertuang dalam **Roadmap** Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Roadmap adalah salah satu alat perencanaan berorientasi masa depan atau *foresight* yang merupakan perencanaan dinamis yang mampu mengantisipasi atau mengelola perubahan. *Foresight* melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional, dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan di masa kini untuk mencapainya. Dengan demikian **Roadmap** harus terintegrasi kedalam dokumen RPJMD Kota Kediri, selaras dengan RPJPD dan teroperasionalisasi kedalam RKPD.

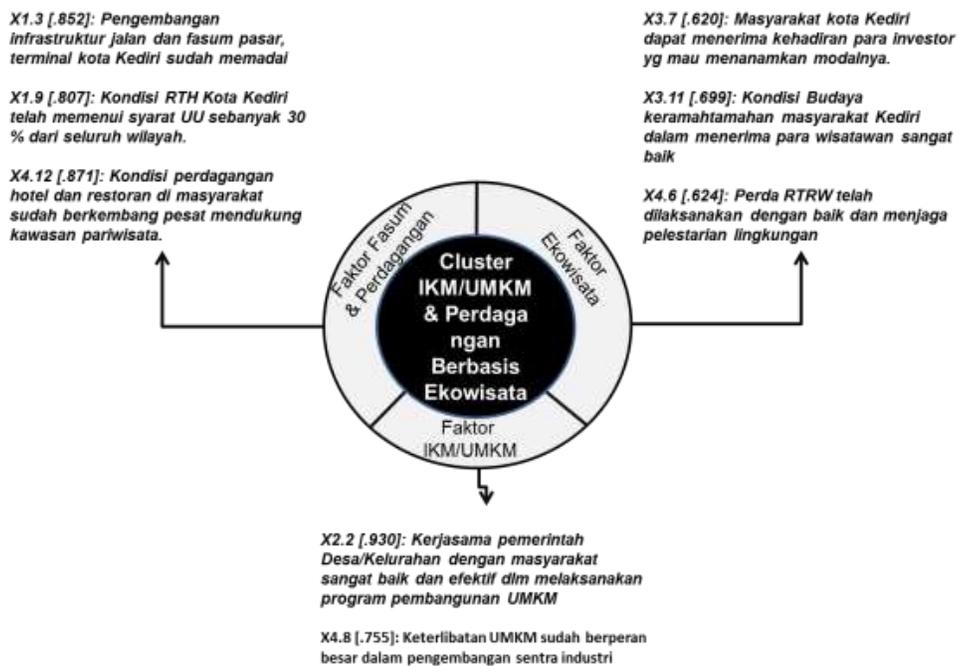
Sebagaimana lazimnya, arah kebijakan pengembangan kawasan strategis guna mendukung SIDA Kota Kediri, selain mencermati potensi lokal yang dimiliki, dalam ranah penciptaan daya saing daerah juga harus memperhatikan faktor-faktor produksi terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja dan daya serap tenaga kerja, dan kondisi distribusi hasil kegiatan industri atau daya serap pasar hasil produksi industri. Selanjutnya, disinkronkan dengan rencana tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam kerangka pengembangan program-program pembangunan berbasis wisata, yang

didalamnya harus memuat infrastruktur dasar meliputi; infrastruktur jalan, air, listrik, pasar, pendidikan, lembaga-lembaga pendukung, serta kondisi sosial masyarakat dan kondisi potensi lokal lainnya. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah dapat disajikan Visi Pembangunan secara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri dapat disajikan pada **Tabel 1.1.**

Tabel 1.1: Visi Nasional, Regional Provinsi Jatim, dan Visi Kota Kediri

Visi Nasional	Visi Provinsi Jatim	Kota Kediri
Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025: "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur"	"Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan."	"Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni"

Berdasarkan hasil penelitian tentang penentuan kluster industri yang mempertimbangkan berbagai aspek yang multidimensional meliputi; aspek geografi, demografi, sosial budaya kemasyarakatan, potensi unggulan, tata ruang wilayah, aspek pasar, aspek kelembagaan dan aspek pariwisata dapat ditentukan kluster tematik yang sesuai dengan karakteristik potensi kewilayahan dan dapat menjamin terjadinya proses hilirisasi kluster industri tematik yang diangkat dalam SIDA yaitu: "Kluster IKM/UMKM, Perdagangan Berbasis Ekowisata" dengan produk unggulan Industri Olahan, Pertanian dan Kerajinan Rakyat. Sesuai hasil uji faktor yang terbentuk dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Klaster Industri Tematik yang terbentuk yaitu Klaster UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

Keterbatasan yang masih sering terjadi dalam penyusunan program-program pembangunan yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) selama ini, pada umumnya masih mencerminkan program yang bersifat sporadis dan parsial sesuai tupoksinya masing-masing. Lebih cenderung rutinitas, serta memunculkan egosektoral antar SKPD, belum terjadi gerakan inovasi secara *massive*, sinergis, terintegrasi, dan berdaya saing sesuai kerarifan lokal. Dengan demikian antara program kebijakan pembangunan yang satu dengan lainnya ada kecenderungan ingin menunjukkan kinerja bagiannya sendiri-sendiri, lebih berorientasi pada hirarkhi struktural, bisa terjadi tumpang tindik antar program SKPD, dan belum berorientasi kontekstual yang terkonsep, tersistem, dan terintegrasi antar program-program OPD secara sinergis berkelanjutan.

Disisi yang lain, tuntutan pembangunan yang mengedepankan konsep peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dikehendaki sistem inovasi pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan yang merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa), sebagai salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadai proses interaksi diantara komponen penguatan sistem inovasi.

Fakta yang berkembang saat ini banyak SIDA yang dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia menjadi kurang optimal. Oleh karena, menggunakan konsep *one-village-one-product*, spasial dalam kawasan tertentu yang kurang mewakili keintegrasiaan yang dikehendaki dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah, yang struktur organisasinya luas dan bersifat multidimensional. Dalam hal ini, penanggungjawab SIDA adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekda sebagai Ketua tim koordinasi, Kepala Bappeda sebagai Wakil, Kelitbang sebagai sekretaris, dinas dan badan (OPD) sebagai kelompok kerja yang akan bekerja secara sinergis dalam suatu kerangka kawasan yang memenuhi syarat berkembangnya sebuah “klaster industri” yang akan dibangun untuk mencapai kaidah-kaidah aglomerasi daya saing daerah.

Bahkan konsep sains teknologi park yang mengandalkan pengembangan unggulan kawasan dengan perlakuan fokus utamanya pada kemajuan teknologi untuk menciptakan wirausaha baru, produk baru dalam rangka mencapai daya saing daerah, kadang-kala jika budaya dan kesiapan masyarakatnya untuk berteknologi dan kerangka kawasan hilirisasi tidak dikondisikan dan kurang mendukung maka, juga menjadi kurang optimal meskipun baik untuk skimnya sendiri. Selain itu, pola kerja aglomerasi kawasan juga masih kurang optimal terkait dengan aliansi kawasan strategis, pariwisata, aspek pasar, industri terkait dan industri pendukung sampai lembaga pendukung yang bersifat komplementer dan multidimensional.

Dengan demikian, berdasarkan hasil diseminasi pengembangan SIDA berbasis zonasi ekonomi, daya serap teknologi di masyarakat, sosial budaya dan pariwisata dalam rangka menentukan kerangka kawasan yang mampu mengakomodir berbagai sektor yang multidimensional, menunjukkan hasil yang mampu menghasilkan kerangka kawasan aglomerasi potensi kewilayahan, dapat mensinergikan antar OPD dalam implementasi SIDA, serta mampu mengoptimasi berbagai aspek pembangunan dalam rangka mencapai daya saing daerah, dengan cara mengkolaborasikan antara kutub-kutub pertumbuhan yang dimiliki daerah (*Growth poles theory*) dengan klaster industri. Kohesi keduanya akan menghasilkan kerangka kawasan yang *eligible* (gayut) dengan struktur sistem inovasi daerah yang multi sektor. Setelah terbentuknya kerangka kawasan bagi inovasi agglomerasi daerah dapat ditopang dengan produk unggulan, sains teknopark, taman teknologi pertanian (TTP) dari Kementerian Pertanian, smart city yang banyak mendukung dalam jaringan pasar digital yang didukung pangkalan data yang memadai dan program-program yang lain dalam kerangka tematik yang dikehendaki SIDA.

Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kediri saat ini, secara dinamis terus mengalami perubahan perbaikan, menyesuaikan isu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing. Ditingkat regional, Indonesia saat ini dihadapkan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bahkan berkompetisi secara internasional yang pelaksanaannya telah dimulai pada tanggal 31 Desember 2015.

MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus perdagangan bebas; barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

Dalam menyambut MEA ini selain dibutuhkan penyiapan SDM yang inovatif, kreatif, pembangunan yang sinergis dan kolaboratif, perlu didukung teknologi digital sebagai karakteristik era generasi 4.0. model pemasaran produk juga harus dimobilisasi melalui emarketing yang didukung databased produk-produk unggulan daerah secara terintegrasi dalam suatu jaringan system perdagangan global.

Dengan hadirnya tata niaga baru MEA, Kota Kediri memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi daerah, sebagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan ekonomi. Diberlakukannya perdagangan bebas MEA seyogyanya perlu terus dikawal dengan upaya-upaya terencana dan *targeted* dengan terus meningkatkan sinergitas, utamanya dalam meningkatkan dukungan menata ulang kelembagaan birokrasi, membangun infrastruktur, mengembangkan sumberdaya manusia, perubahan sikap mental serta meningkatkan akses finansial terhadap sektor riil yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi.

Disisi lain MEA akan menjadi peluang dengan berkurangnya hambatan perdagangan bahkan menjadi tidak ada batas-batas wilayah, dan hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor. Kondisi sebaliknya manakala tidak siap dalam memproduksi dan berkompetisi justru menjadi penghalang bagi pengembangan ekonomi Indonesia. Ditinjau dari sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya, diharapkan

dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan mengatasi masalah tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mempertimbangkan fenomena perdagangan pada situasi global membutuhkan strategi tersendiri secara tersistem, sinergis dan integrasi dalam rangka mengoptimalkan daya saing daerah. Dalam rangka mengoptimasi berbagai aspek pembangunan tersebut akan sinergis dan optimal manakala, dikemas dalam kerangka SIDA. Trend pembangunan melalui pengembangan kluster industri dalam meningkatkan daya saing daerah sudah menjadi isu secara internasional, yang harus segera direspon oleh daerah di Indonesia. Perlu digarisbawahi adalah ***“meskipun telah bermunculan berbagai peraturan Pemerintah terkait dengan inovasi, SIDA merupakan Sistem inovasi yang tetap relevan dengan perkembangan global, dan patut untuk dilanjutkan dan disinergikan dengan program-program yang lain”***.

Adapun program jangka panjang yang masih relevan dan sejalan dengan SIDA dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah adalah pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, sebagai arah kebijakan makro, operasionalisasinya diperlukan Penguatan Sistem Inovasi Daerah secara terarah dan berkesinambungan. Seperti yang termaktub dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Hal ini diperkuat oleh PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut harus termanifestasikan kedalam ***Roadmap*** Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan perencanaan program-program pembangunan daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), roadmap penguatan SIDA harus sinkron dengan RPJMD agar dapat menjamin terlaksananya Roadmap SIDA. Secara bertahap melalui kerangka SIDA, program pembangunan menjadi terkonsep, sinergis, berkelanjutan dan mampu menciptakan daya saing daerah. Dengan demikian ***Roadmap*** harus diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kota Kediri Tahun 2019 -2024 dengan

Visi: “Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing”,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Visi Kota Kediri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, “Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing”, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yang arah kebijakannya secara umum dijabarkan sebagai berikut:

Mewujudkan Masyarakat Kota Kediri yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya Sesuai Nilai Luhur Pancasila; Mewujudkan Kota Kediri Sebagai Pusat Industri, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing; Mewujudkan Kota Kediri Menjadi Pusat Pendidikan yang Berkualitas; Mewujudkan Tata Pemerintahan Kota Kediri yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum; Mewujudkan Kota Kediri yang Aman, Tertib, Tenram, Damai dan Bersatu dicapai dengan meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, terbinanya dan terbangunnya semangat atau jiwa patriotisme dan nasionalisme; Mewujudkan Sarana dan Prasarana Umum, Ruang Publik yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan; Mewujudkan Kota Kediri Yang Sehat, Indah, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

Mengacu pada ketentuan Perber dan berdasarkan latarbelakang pemikiran di atas maka, roadmap yang disusun akan mencerminkan lima agenda kebijakan inovasi dalam bentuk indikator-indikator yang berkesesuaian yaitu; Penguatan sistem inovasi dalam hal ini pentingnya terbentuk Tim Koordinasi, serta diperkuat oleh penetapan zonasi ekonomi sosial budaya yang dikohesikan dengan kutub-kutub pertumbuhan sebagai kawasan aglomerasi yang didukung oleh, klaster industri, jaringan inovasi, teknopreneur dan pilar-pilar tematik akan mengerucut kedalam serangkaian kegiatan pendampingan teknis, kajian kebijakan (*action research*) dan implementasi program-program aksi.

Dengan landasan hukum yang kuat dokumen roadmap penguatan sistem inovasi daerah Kota Kediri dan didasari oleh penelitian yang *shopisticated* dapat ditentukan klaster industri tematik yaitu: “Klaster IKM/UMKM, Perdagangan Berbasis Ekowisata” dengan produk unggulan Industri Olahan, Pertanian dan Kerajinan Rakyat sesuai dengan potensi kewilayahaan.

Beberapa konsep penting yang mendasari pengembangan klaster industri perlu dideskripsikan untuk mendukung operasionalisasi konsep kedalam implementasi program-program SIDA terkait dengan deskripsi “Klaster IKM/UMKM, Perdagangan Berbasis Ekowisata” dengan produk unggulan Industri Olahan, Pertanian/Agribis dan Kerajinan Rakyat. Adapun beberapa definisi konsep secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (*food supply chain*). Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.
- II. Agribis Perikanan menurut UU No 31 Tahun 2004: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
- III. Agribisnis peternakan secara umum dapat dimaknai sebagai kegiatan usaha yang terkait dengan subsektor peternakan, mulai dari pembibitan, penyediaan sarana produksi pakan hijauan maupun nutrisi buatan hasil fermentasi, perkandangan, proses produksi (budidaya), penanganan pasca panen, pengolahan, sampai pemasaran produk ke konsumen.
- IV. Hortikultura diartikan sebagai jenis tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, pengemasan dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern dan memfokuskan pada budidaya tanaman buah (frutikultur), tanaman bunga (florikultura), tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat-obatan (biofarmaka).
- V. System agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat sistem mulai dari sub sistem produksi, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran dan sub sistem penunjang, atau suatu sistem yang kompleks dan dinamis, sehingga pengembangan agribisnis perkebunan idealnya juga menggunakan pendekatan sistem, baik sub sistem hulu maupun sub sistem hilir. Perbedaan mendasar antara agribisnis pangan dengan agribisnis perkebunan adalah pada sub sistem produksi, untuk agribisnis pangan, benih hanya digunakan sekali pada satu musim tanam, dan pada musim tanam selanjutnya akan digunakan benih lain, periode tunggu produksi awal relatif

singkat. sedangkan pada agribisnis perkebunan, satu benih dapat berproduksi berkali-kali dalam beberapa tanam sampai telah sampai umur dimana tanaman tidak dapat berproduksi lagi, periode tunggu periode awal lebih lama dibandingkan dengan agribisnis pangan. perbedaan ini mengakibatkan perbedaan metode dalam perhitungan kelayakan usaha antara kedua agribisnis, dimana agribisnis pangan menggunakan R/C atau B/C ratio, sedang agribisnis perkebunan menggunakan IRR atau NPV (net present value).

VI. Industri Kerajinan Rakyat adalah; keahlian dalam menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Atau dengan kata lain adalah sebutan bagi suatu benda hasil karya seni manusia. Kerajinan terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Kerajinan bahan alam --> merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bahan-bahan alam seperti: serat alam, bambu, rotan, kayu.
2. Kerajinan bahan buatan --> merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan seperti : plastik, gips, sabun, lilin, dan lain lain.

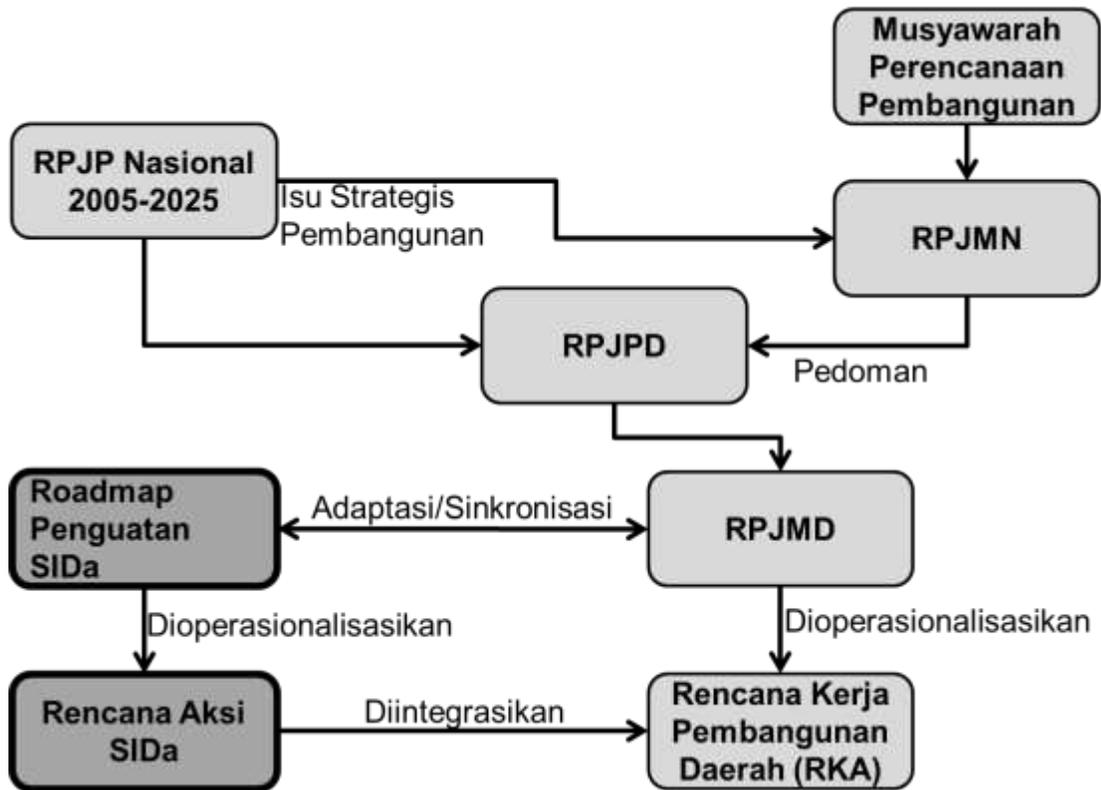
V. Konsep “EKO-WISATA” mengarah pada makna

1. Aktivitas ekonomi (terutama industri UMKM dan perdagangannya) di bidang “agribis pertanian tanaman bahan makanan dan hortikultura” sebagai basis pengembangan pariwisata.
2. Ekologi di bidang “Agribis Pertanian” sebagai basis pengembangan pariwisata yang mengacu pada:
 - (1) kelestarian lingkungan sumber daya alam
 - (2) kelestarian lingkungan sumber daya manusia, religi, sosial, budaya, dan kearifan lokal lainnya

VI. Kutup-Kutup Pertumbuhan

Kutup pertumbuhan merupakan kutup-kutup kawasan tertentu yang memenuhi prinsip aglomerasi potensi kawasan yang mempertimbangkan posisi kawasan strategis pasar, didukung keunggulan komperatif kawasan, serta didukung sumberdaya manusia, pasar, sentra industri, serta potensi pariwisata dalam rangka menciptakan daya saing daerah. Dalam operasionalisasinya, dalam menentukan klaster industri yang dipilih harus mempertibangkan kutup-kutup pertumbuhan agar terjadi proses hilirisasi produk, untuk menjamin keberlanjutan program.

Selain itu, program-program pembangunan yang akan diimplementasikan melalui SIDA dapat ditunjukkan melalui Kedudukan Roadmap SIDA dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Kedudukan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

1.2. Aspek Geografi dan Demografi

1.2.1. Gambaran Umum Kota Kediri

Secara astronomis, Kota Kediri terletak antara $7^{\circ}45'$ - $7^{\circ}55'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}05'$ - $112^{\circ}03'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kediri dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri dengan batasbatas:

- Utara: Kecamatan Gampengrejo; Selatan: Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih;
Barat: Kecamatan Grogol dan Semen; Timur: Kecamatan Wates dan Gurah Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan yaitu:

- Kecamatan Mojoroto
- Kecamatan Kota
- Kecamatan Pesantren

Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kota Kediri relatif datar, dengan ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, meskipun pada bagian barat bertepatan dengan perbatasan Gunung Klotok yang memiliki ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang setinggi 300 meter.

Wilayah Kota Kediri dengan luas 63,40 km² terbelah menjadi dua bagian, oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Secara administrasi, Kota Kediri terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren.

Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas 24,6 km², sementara wilayah timur sungai termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota seluas 14,9 km² dan kecamatan Pesantren seluas 23,9 km². Kantor Walikota Kediri terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 15 Kecamatan Kota.

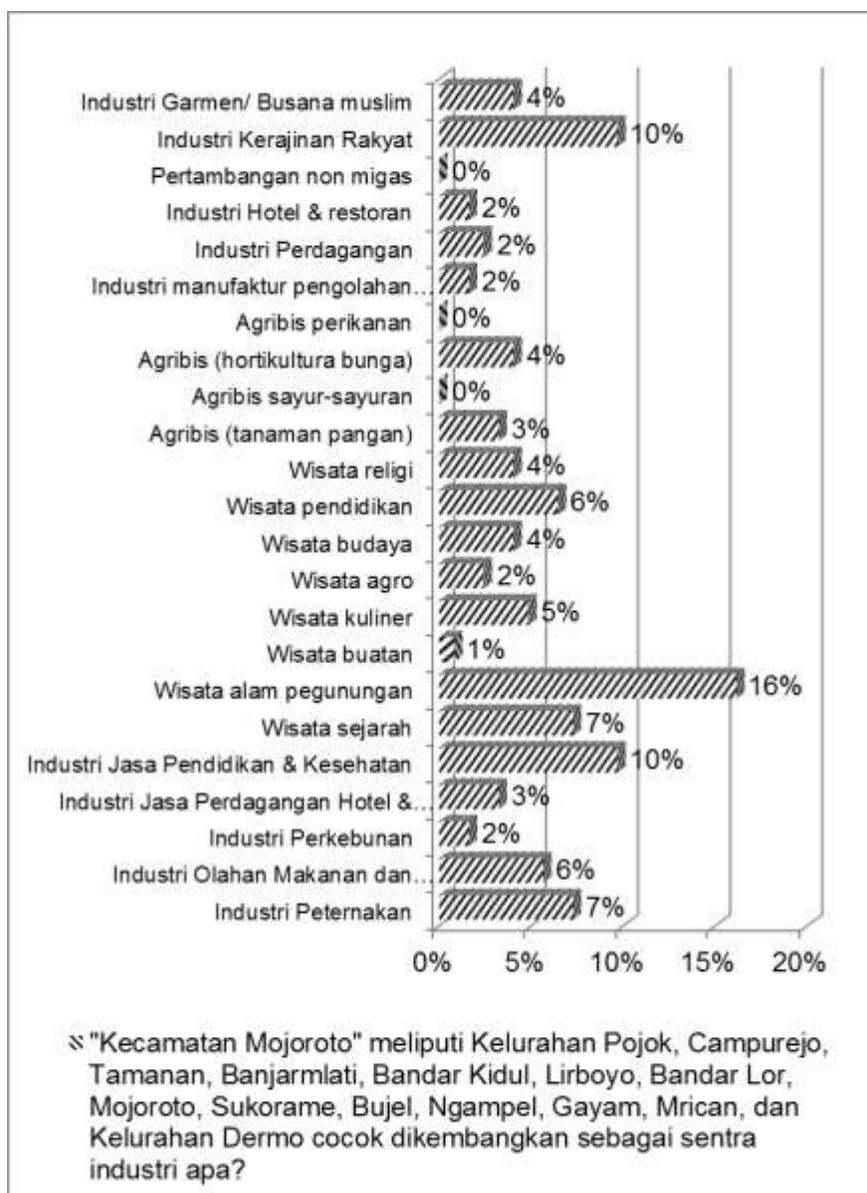
Jarak Kantor Walikota Kediri dengan ibukota Kecamatan Mojoroto 1,5 km, dengan ibukota Kecamatan Kota 2,1 km, dan dengan Kecamatan Pesantren 5,8 km. Hujan terjadi hampir di sepanjang tahun 2017, kecuali bulan Agustus. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember, dengan jumlah curah hujan mencapai 558 mm³. Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari.

1.2.2. Kondisi Potensi ekonomi, kondisisi sosial budaya, potensi alam dan pariwisata dalam mendukung pengembangan SIDA

1. Potensi Kecamatan Mojoroto

Potensi utama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri adalah wisata alam pegunungan yaitu Gunung Klotok terdapat peninggalan sejarah masa lampau yakni Gua Selomangleng, terdapat sentra kerajinan tenun ikat, kerajinan rakyat lainnya, termasuk memiliki keunggulan dibidang jasa pendidikan. Selain itu, terdapat potensi peternakan dan Kota Kediri memiliki pondok pesantren Lirboyo, yang menjadi slahsatu potensi besar jika disinergikan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadi kekuatan tersendiri. Berdasarkan potensi-potensi tersebut, Kecamatan Mojoroto dapat dijadikan sentra kerajinan rakyat yang dapat dipadukan dengan wisata alam pegunungan dan gua selomangleng. Termasuk aliran Sungai Brantas yang membelah Kota Kediri memiliki pemandangan yang elok untuk dapat dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Kediri.

Secara garis besar kondisi potensi Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Pojok, Campurejo, Tamanan, Banjarmlati, Bandar Kidul, Lirboyo yang terkenal dengan pondok pesantren dengan jumlah santri puluhan ribu santri, memiliki potensi yang sangat besar untuk disinergikan dengan program koperasi dan UMKM Kota Kediri. Kemudian Kelurahan Mojoroto, Bujel, Sukorame, Ngampel, Gayam, Mrican, dan kelurahan Dermo cocok untuk dikembangkan sebagai industri kerajinan rakyat, jasa pendidikan dan kesehatan, wisata edukasi dan lainnya. Secara rinci kondisi potensi Kecamatan Mojoroto dapat ditunjukkan pada Gambar 1.3.



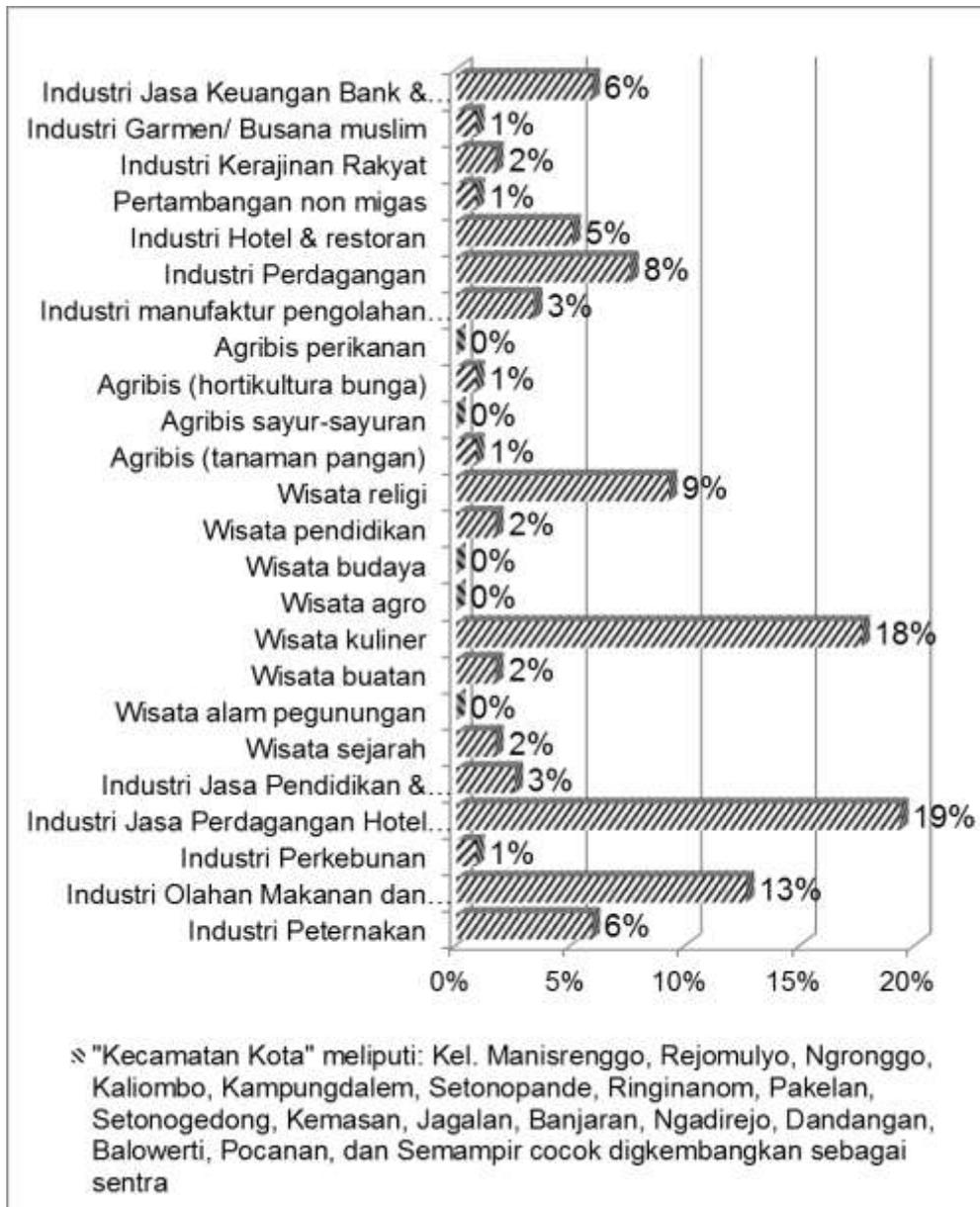
Gambar 1.3: Kondisi potensi Kecamatan Jojoroto Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya Bappeda Kota Kediri 2018

2. Potensi Kecamatan Kota

Potensi Keamatan Kota yang memiliki kedudukan sebagai pusat perkotaan sudah sewajarnya memiliki potensi industri hotel perdagangan dan restoran. terdapat aneka kuliner dengan khas tahu taqwa yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, bahkan sudah didukung banyak berdiri kuliner masyarakat sampai menjadi tujuan wisata kuliner. Hal ini akan sangat baik dan optimal manakala dapat disinergikan dengan siswa dan mahasiswa serta pondok pesantren. Oleh karena itu, dengan potensi yang dimiliki Kecamatan Kota sebaiknya diikuti penataan kota, ruang publik kreatif berupa showroom hasil produk UMKM, dilengkapi rest area yang representative dengan tempat

parkir yang luas diintegrasikan dengan kawasan yang sudah ramai dikunjungi masyarakat.

Selain itu, Kecamatan Kota juga sudah banyak hasil produksi kerajinan rakyat, tenun ikat, batik, dan industri mebel kreatif dan aneka buah cinderamata hasil karya masyarakat Kota Kediri, hasil olahan aneka kripik, tahu taqwa, getuk pisang dan hasil olahan khas Kota Kediri lainnya. Faktor penting yang harus diperhatikan, selain potensi daerah juga perlu mencermati karakteristik budaya masyarakat harus dicermati secara teliti agar program yang akan dijalankan menjadi tepat sasaran dan programnya jalan. Berdasarkan hasil survei dan wawancara mendalam, karakteristik budaya masyarakat Kecamatan Kota banyak bermatapencarian sebagai pedagang, UMKM dan buruh pabrik. Melihat kondisi potensi dan karakteristik budaya masyarakat yang demikian nampaknya, membutuhkan sentuhan konsep kuliner dengan kelas-kelas tertentu ada yang mayoritas segmen kelas bawah, menengah dan kelas atas sesuai karakteristik daerahnya. Pola promosi masal, dan sering melakukan event-event yang terkonsep secara periodikal, guna memperkenalkan hasil produk masyarakat Kota Kediri, serta dikaitkan dengan potensi wisata yang ada. Secara garis besar kondisi potensi Kecamatan Kota dapat dilihat pada Gambar 1.4.



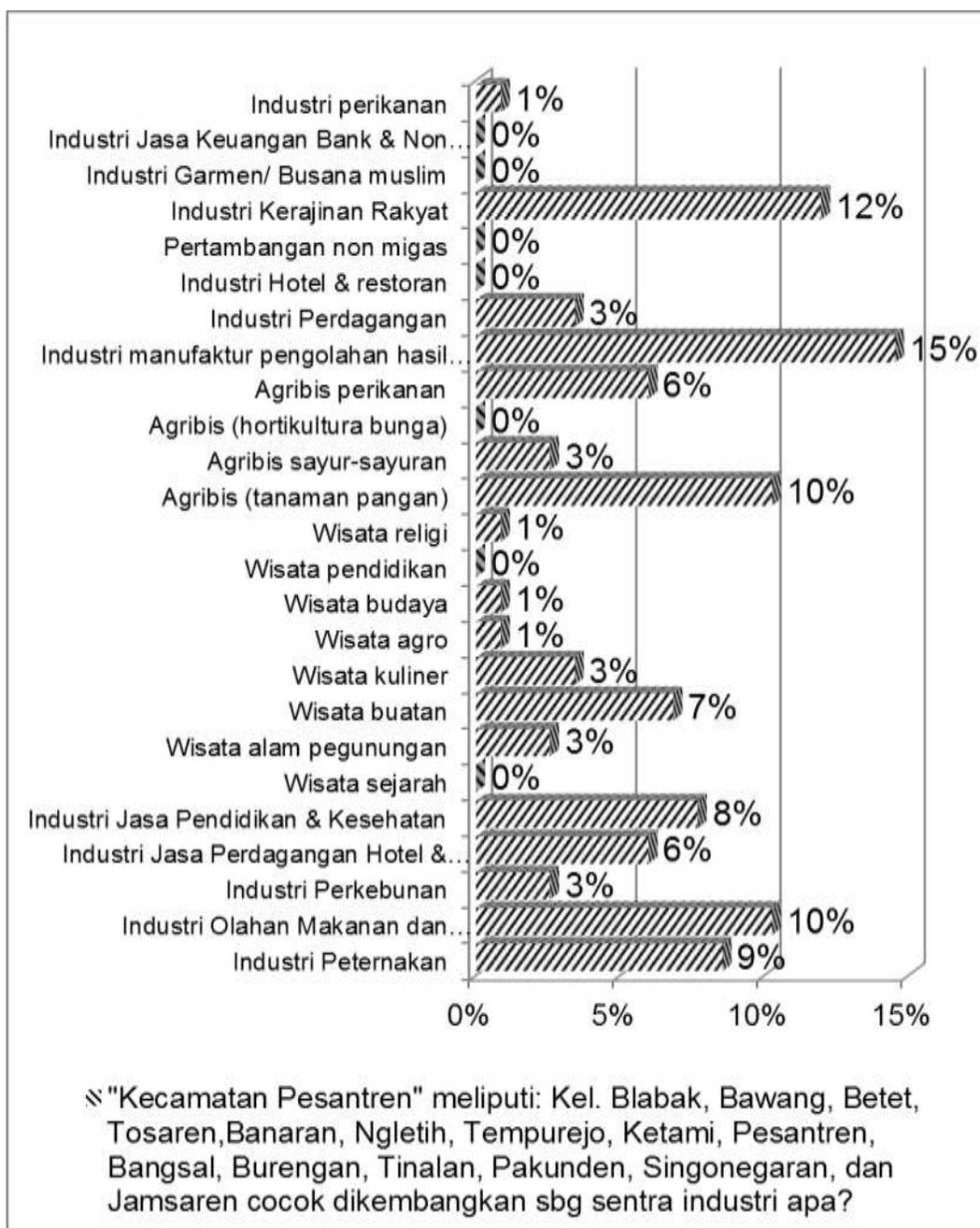
Gambar 1.4: Kondisi potensi Kecamatan Kota, Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya Bappeda Kota Kediri 2018

3. Potensi Kecamatan Pesantren

Potensi Kecamatan Pesantren agak berbeda dengan dengan kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Kota, yaitu, banyak berkembang masyarakatnya dari sektor industri kerajinan rakyat, termasuk kehidupan sehari-hari dari sektor agribis pertanian tanaman makanan dan peternakan, kemudian juga telah berkembang kuliner. Jika dilihat dari potensi unggulan yang ada di masyarakat cenderung merupakan masyarakat yang masih tradisional dari sektor primer, meskipun juga telah berkembang industri kerajinan rakyat. Usaha kuliner masyarakat berupa masakan khas Kota Kediri ada pecel punten, tahu taqwa dan aneka olahan masakan khas jawa.

Sesuai kondisi potensi yang dimiliki Kecamatan Pesantren, serta karakter budaya masyarakatnya sebagai masyarakat yang cenderung agraris, tentunya potensi pengembangannya harus juga menyesuaikan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Penataan kuliner aneka khas Jawa, dan rest area sebagai ruang publik kreatif, dilengkapi dengan sentra industri kerajinan rakyat nampaknya merupakan model pengembangan yang sesuai, serta ruang terbuka hijau, sarana olah raga sebagai tempat berkumpulnya masyarakat tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga cocok untuk masyarakat yang banyak bekerja sebagai buruh pabrik rokok, dengan demikian rancangan pengembangannya juga menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Kondisi yang strategis misalnya ada pom bensin, atau tempat ibadah berupa masjid yang besar di jalan strategis, dapat dikembangkan sentra kuliner dan mini market modern yang dikelola koperasi bisa bekerjasama dengan pondok pesantren dan/atau Perguruan Tinggi, dengan kelas masyarakat menengah keatas untuk menangkap para tamu yang datang dan lewat Kota Kediri. Secara garis besar kondisi potensi masyarakat Kecamatan Pesantren dapat ditunjukkan pada Gambar 1.5.



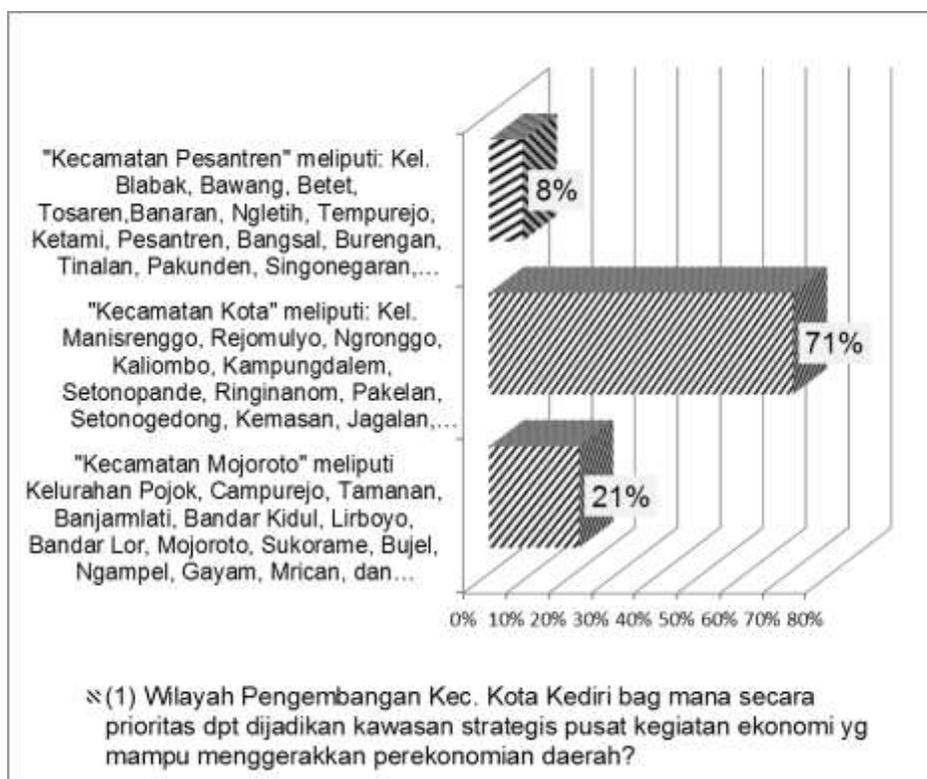
Gambar 1.5: Kondisi potensi Kecamatan Pesantren Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018

4. Kawasan Strategis sebagai Penggerak Perekonomian Rakyat

Kondisi potensi kawasan yang strategis yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Kediri utamanya berada di Kecamatan Kota. Dalam hal ini, meliputi Kelurahan Manisrenggo, Rejamulyo, Ngronggo, Kaliombo, Kampung Dalem, Setonopande, Ringinanom, Pakelan, Setonogedong, Kemas dan Kelurahan Jagalan. Telah tumbuh berkembang dari berbagai sektor dan memiliki posisi yang sangat strategis ditempati pusat pemerintahan dan telah berdiri pusat perbelanjaan, lembaga keuangan dan

fasilitas kesehatan, pendidikan dan lazimnya sebagai sebuah kota. Di Kecamatan Kota ini memiliki posisi strategis dilewati jalan provinsi, dan sudah banyak didatangi masyarakat luas.

Dengan posisinya sebagai sebuah kota, apabila program pengembangan SIDA akan dikembangkan di sini, dapat mencari posisi yang strategis untuk pengembangan sektor UMKM dan sebisa mungkin dikaitkan dengan bidang usaha masyarakat yang sudah jalan. Dengan demikian program pengembangan Koperasi dan UMKM harus bisa masuk dalam jaringan distribusi untuk menjamin keberlangsungan usaha. Secara garis besar kondisi kawasan strategis Kecamatan Kota yang dapat menjadi pusat perekonomian dapat ditunjukkan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6: Kondisi Kawasan Strategis sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian Kecamatan Kota Kota Kediri

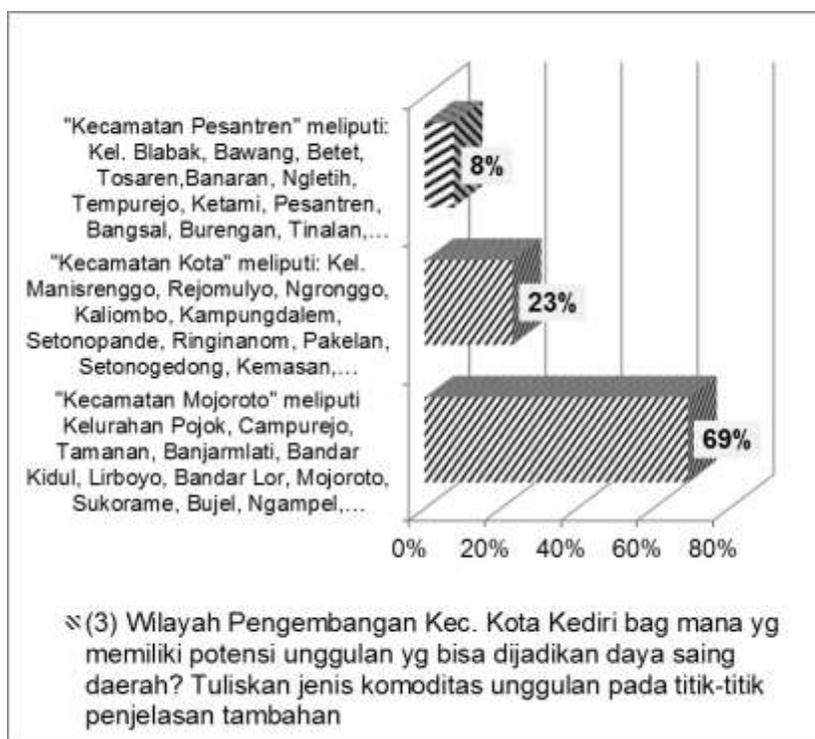
Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018

5. Kawasan Strategis sebagai Daya Saing Daerah

Wilayah pengembangan Kota Kediri yang dapat dijadikan daya saing daerah adalah Kecamatan Mojoroto. Dalam hal ini Kecamatan Mojoroto terdapat Gunung Klotok dengan destinasi wisata yang terkenal adalah Goa Selomangleng sebagai salah satu situs sejarah. Hasil kerajinan masyarakat berupa tenun ikat, batik Bandar Kidul, tahu taqwa, garmen, getuk pisang, dan telah berdiri Universitas Brawijaya, UNIKA, Pesantren Lirboyo, serta aneka

produk masyarakat lainnya termasuk iklim perdagangan yang sudah relatif jalan, menjadikan Kecamatan Mojojoto sebagai andalan daya saing daerah Kota Kediri.

Berdasarkan aneka potensi unggulan yang dimiliki Kecamatan Mojojoto, selama ini telah menjadi andalan sebagai daya saing daerah, perlu terus ditingkatkan secara lebih efektif dengan mensinergikan, berbagai potensi yang dimiliki yaitu antara Pemerintah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren untuk membangun ekonomi kerakyatan yang bersifat hilirisasi dan terintegrasi barangkali melalui kelembagaan koperasi. Dengan demikian ekonomi masyarakat yang tadinya secara parsial jalan sendiri-sendiri lebih terintegrasi dan berdaya saing dalam wadah koperasi yang mensinergikan perbagai pihak. Secara garis besar kondisi kawasan sebagai daya saing Kota Kediri dapat ditunjukkan melalui Gambar 1.7.



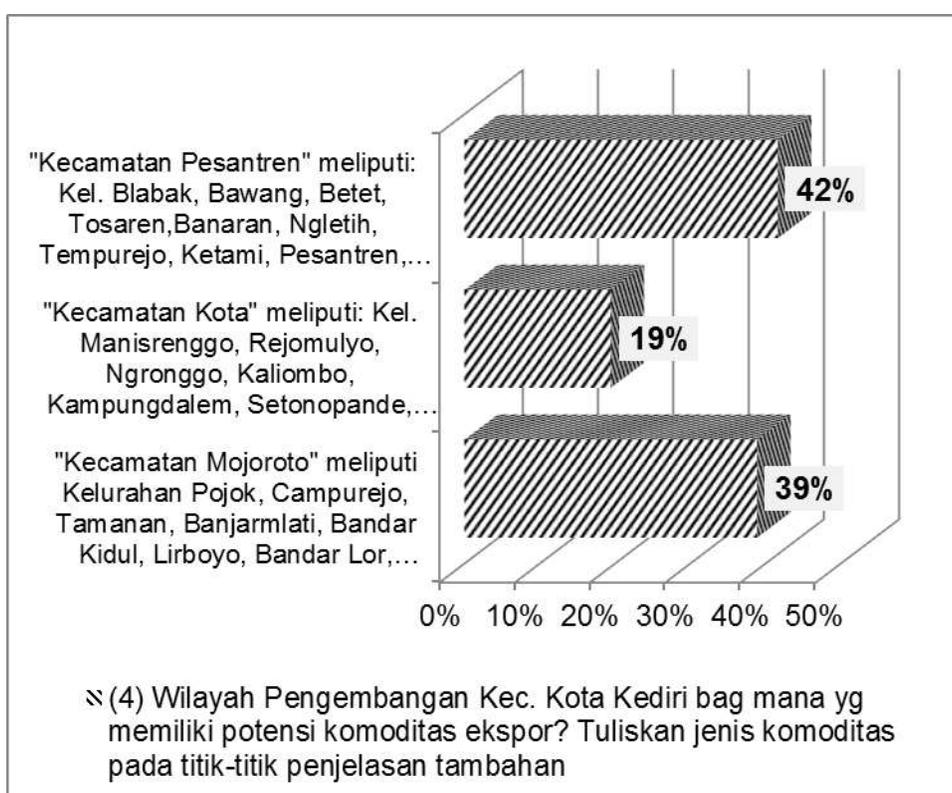
Gambar 1.7: Kondisi Kawasan Strategis sebagai Daya Saing Perekonomian Kecamatan Mojojoto Kota Kediri

Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018

6. Kawasan Strategis sebagai Penghasil Komoditas Ekspor

Daerah yang memiliki potensi komoditas ekspor di Kota Kediri ternyata menyebar di tiga kecamatan. Sehubungan dengan Kecamatan Mojoroto banyak memiliki hasil produksi tenun ikat, tahu taqwa, dan hasil kerajinan rakyat kreatif sudah bisa menembus pasar ekspor. Sedangkan di Kecamatan Pesantren banyak melakukan ekspor keong, masyarakatnya banyak menghasilkan kerajinan rakyat berupa sulak, tusuk sate, terdapat Pabrik Gula, hasil tanaman pangan bawang, ikan cupang, ikan hias, tahu, kerajinan bambu, bulu ayam, dan hasil kerajinan rakyat yang lainnya, sehingga Kecamatan Pesantren sebagian produknya juga menjadi andalan ekspor Kota Kediri.

Secara garis besar kecamatan yang memiliki potensi kondisi ekspor dapat ditunjukkan melalui Gambar 1.8.



Gambar 1.8: Kondisi Kawasan Strategis yang Memiliki Potensi Unggulan Komoditas Ekspor Kota Kediri

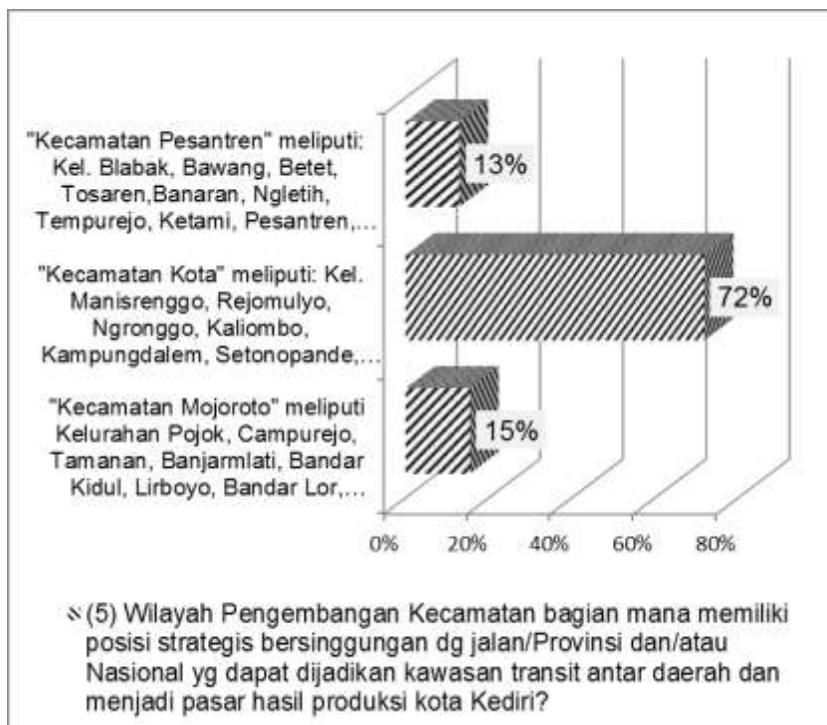
Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018

7. Kawasan Strategis sebagai Wilayah Transit Bersinggungan Jalan Provinsi

Kawasan yang dipandang memiliki potensi kawasan strategis yang dapat dijadikan kawasan transit dan dapat dimanfaatkan sebagai pusat penjualan hasil produk Kota Kediri berada di Kecamatan Kota. Sekaligus sebagai kawasan pusat Pemerintahan Menjadikan Kecamatan Kota dapat dijadikan kawasan transit antar daerah. Terdapat pasar induk / pasar sayur

sebagai pusat grosir pasar yang ada di Kota Kediri yaitu Pasar Ngronggo. Kemudian pasar Banjaran, dengan pasar yang sudah banyak dikunjungi masyarakat menjadikan Kecamatan Kota ini menjadi pusat transit arus barang dari daerah lain dan menjadi salah satu penggerak perekonomian Kota Kediri.

Tentunya program SIDA dapat dikaitkan dengan pasar ini manakala hasil produksinya menjadi lebih tersalurkan dalam mengatasi penjualan produk. Berbagai potensi hasil produk dari Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto, dapat dikoneksikan dengan pusat pasar transit atau pasar-pasar lain yang ada di Kecamatan Kota Kediri. Secara garis besar kecamatan yang cocok sebagai pusat transit dapat ditunjukkan pada Gambar 1.9.



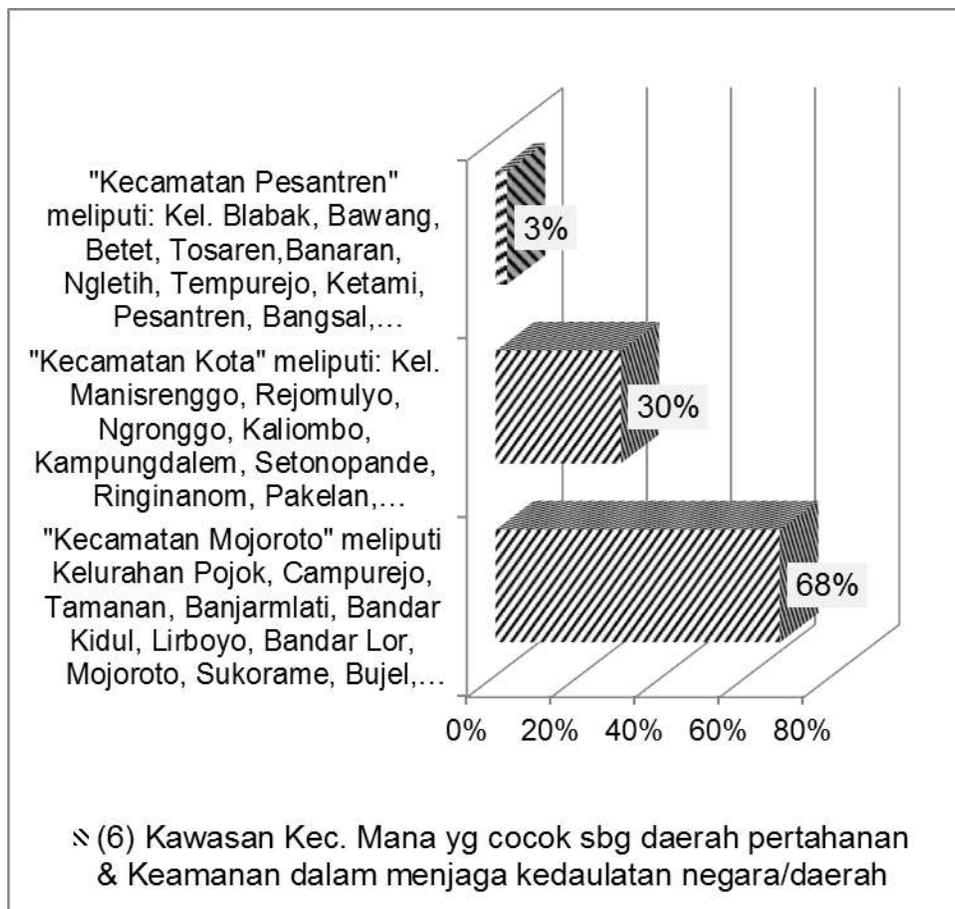
Gambar 1.9: Kondisi Kawasan Strategis Pusat Transit Kota Kediri

Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018

8. Kawasan Strategis yang Cocok Sebagai Pusat Pertahanan dan Keamanan

Kawasan yang cocok sebagai tempat pertahanan dan keamanan sudah berkembang sejak lama yaitu berada di Kecamatan Mojoroto, terdapat Brigif 16 Wira Yudha bemarkas di Desa Gunung Klotok, sebagai kawasan pegunungan dan perbatasan anantara Kota Kediri dengan wilayah sekitarnya, kawasan ini secara posisi strategis telah dikaji dan sudah ada sejak lama sebagai pusat pertahanan dan keamanan. Kawasan yang memiliki pusat pertahanan dan keamanan biasanya memiliki potensi kawasan sekaligus posisi strategis sebagai daerah pertahanan dan keamanan dalam menjaga Kota Kediri.

Umumnya memiliki nilai strategis dan juga banyak ditinggali masyarakat, oleh karena merasa aman. Dengan posisinya dekat dengan wisata Hua Selomangleng dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang lebih menarik lagi, terdapat Perguruan Tinggi. Manakala Pemerintah Kota Kediri dapat mengoptimalkan potensi Goa Selomangleng yang menjadi andalan wisata Kota Kediri, barangkali terintegrasi dengan Sungai Brantas yang memiliki view yang elok, dapat dijadikan ruang terbuka hijau sekaligus destinasi wisata yang menarik. Secara garis besar kondisi kawasan yang memiliki posisi sebagai daerah pertahanan dan keamanan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.10.

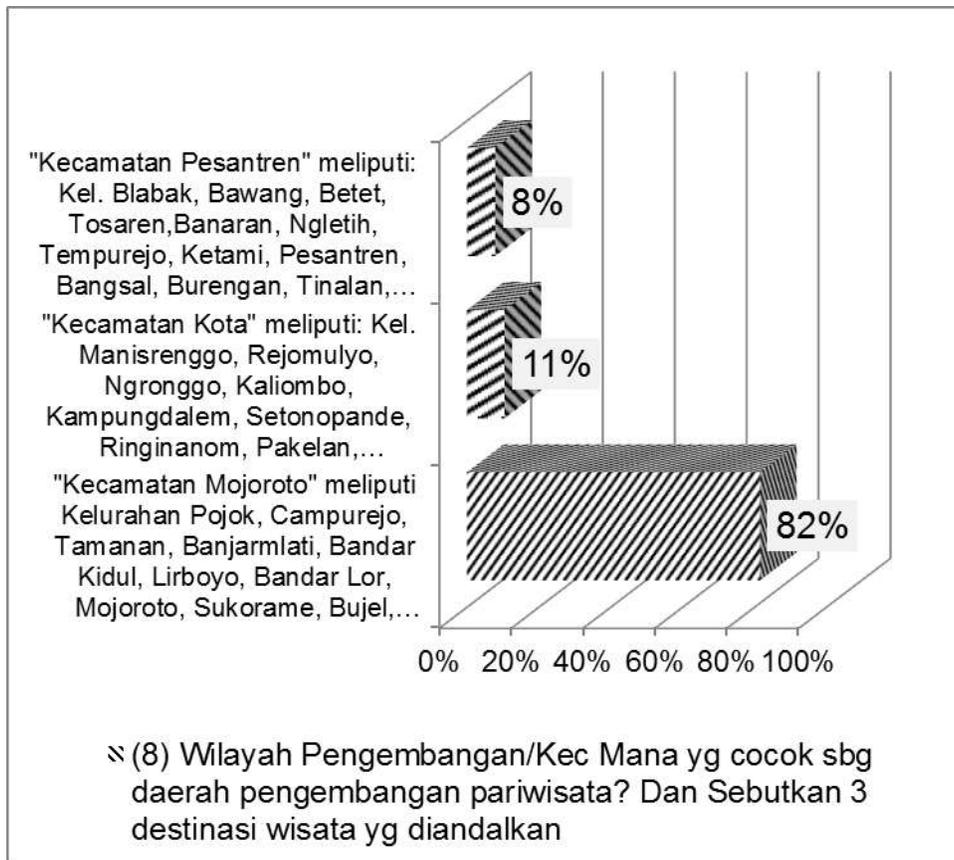


Gambar 1.10: Kondisi Kawasan Strategis Pusat Pertahanan dan Keamanan Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

9. Kawasan Strategis yang Cocok Sebagai Pusat Pariwisata

Sejalan dengan kondisi pusat pertahanan dan keamanan yang berada di Kecamatan Mojoroto yang kedudukannya dekat dengan Gunung Klotok, maka, sejalan dengan potensi wisata Goa Selomangleng sebagai salah satunya wisata andalan yang dimiliki Kota Kediri. Dengan situs budaya dan sejarah masa lampau menjadi daya tarik tersendiri jika ingin dikembangkan lebih dieksplorasi lagi. Tentunya membutuhkan sentuhan yang lebih artistik, terpadu dengan pengelolaan view Suanga Brantas, dan dapat diisi oleh hasil kerajinan rakyat.

Manakala pengelolaan atraksi wisata selomangleng dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan membangun infrastruktur yang lebih representatif, tentunya pengembangan obyek wisata Gunung Klotok menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Kediri. Secara garis besar kondisi potensi wisata Kota Kediri dapat digambarkan pada Gambar 1.11.

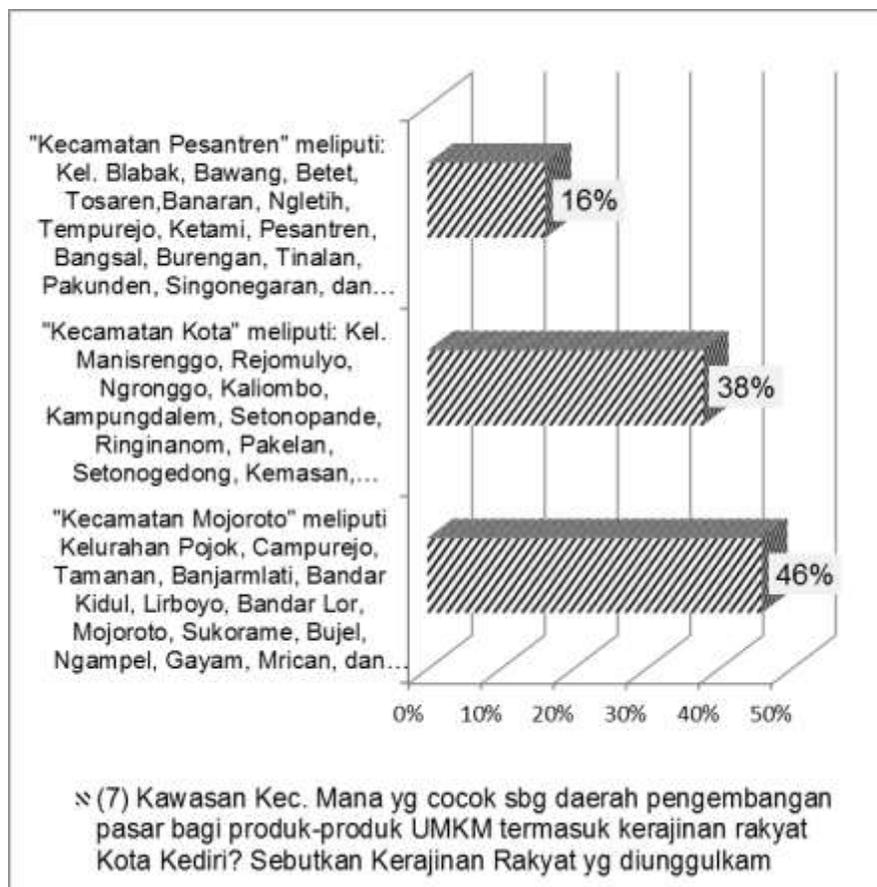


Gambar 1.11: Kondisi Kawasan Strategis Sebagai Kawasan Wisata Kota Kediri
Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

10. Daerah yang Memiliki Produk Unggulan Kota Kediri

Daerah Kecamatan yang memiliki potensi unggulan hasil produk-produk masyarakat di Kota Kediri secara mayoritas berada di Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Kota. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah kecamatan Mojoroto banyak menghasilkan produk hasil kerajinan rakyat seperti tenun ikat, batik, kerajinan rakyat lainnya, termasuk tahu taqwa, Getuk Pisang dan aneka produk lainnya. Sedangkan untuk Kecamatan Kota juga memiliki hasil produksi utamanya kuliner, tahu taqwa, dan kerajinan rakyat lainnya. Sebagai kecamatan kota yang memiliki kedudukan pusat transit, dan sudah banyak dikunjungi masyarakat serta didukung fasilitas penunjang yang lengkap seperti pendidikan dan kesehatan, sarana olah raga, pusat pasar dan fasilitas umum lainnya menjadikan Kecamatan Kota memiliki salah satu unggulan sebagai pusat pasar rakyat. Secara garis besar kondisi kecamatan

yang menghasilkan produk-produk UMKM dapat ditunjukkan pada Gambar 1.12.



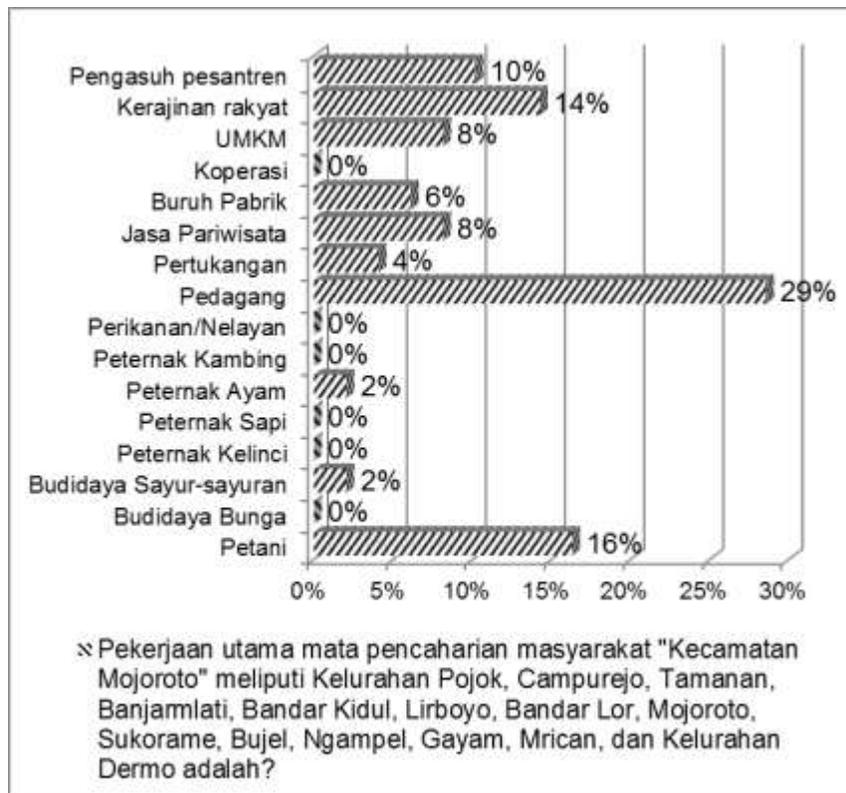
Gambar 1.12: Kondisi Kawasan Sebagai Pusat Hasil Produksi UMKM Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

1.3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kota Kediri

1.3.1. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mojojoto

Kondisi karakteristik sosial budaya masyarakat Kota Kediri dapat diamati dari mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari. Secara mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Mojojoto adalah sebagai pedagang, kemudian sebagai besar juga sebagai petani, dan penghasil kerajinan rakyat. Selain itu banyak pula sebagai pengasuh pondok pesantren. Dengan karakteristik sosial budaya sebagai pedagang, petani, dan penghasil kerajinan rakyat, tentunya dapat dijadikan dasar pengembangan program dalam SIDA. sebuah program yang dikembangkan harus mampu menyesuaikan karakteristik sosial budaya masyarakat. Dengan demikian program-program pembangunan yang dirasa tepat untuk pengembangan Kecamatan Mojojoto ini adalah sentra industri tenun ikat, pengembangan pariwisata Selomangleng, dan pusat

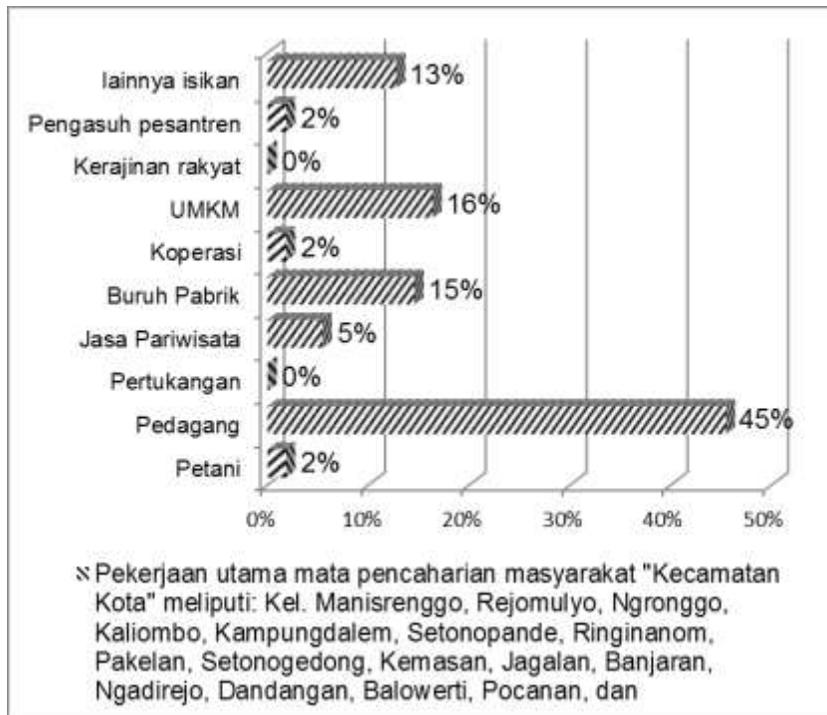
perdagangan di Kota Kediri. Secara garis besar kondisi potensi sosial budaya di Kecamatan Mojojoto dapat ditunjukkan pada Gambar 1.13.



Gambar 1.13: Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kec Mojojoto Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

1.3.2. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Kota

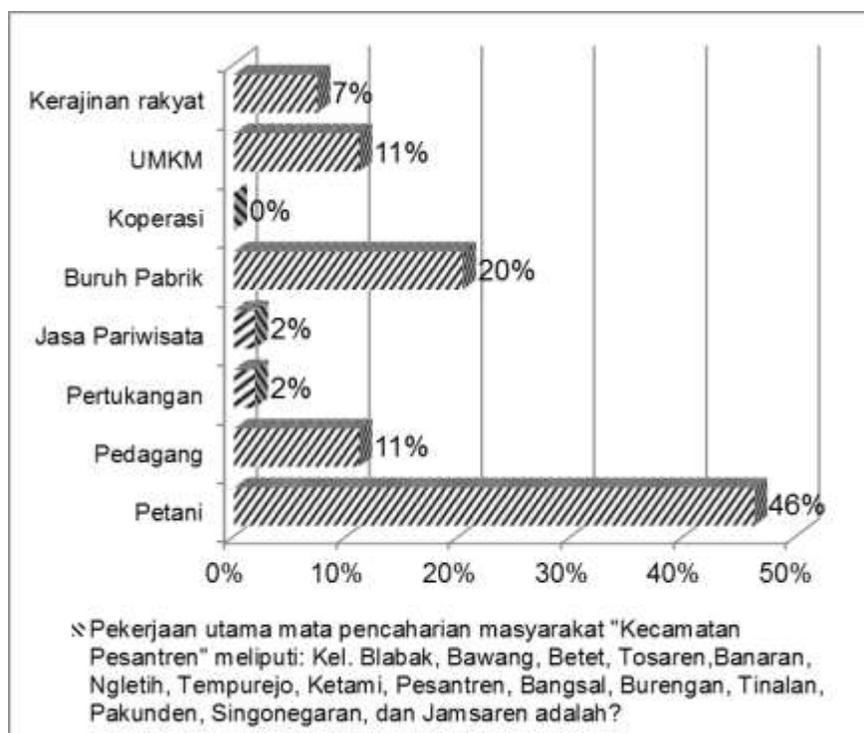
Karakteristik sosial budaya masyarakat Kecamatan Kota ditinjau dari matapencaharian dalam kehidupan sehari-hari secara mayoritas sebagai kaum pedagang, kemudian sebagian sebagai buruh pabrik, dan bergerak dibidang UMKM. Dalam kondisi yang demikian tentunya sebagai masyarakat pedagang, yang dipadukan dengan UMKM kuliner, penghasil olahan makanan dan minuman dipadukan dengan perdagangan sangat tepat. Oleh karena itu terkait dengan pengembangan program dan rencana aksi SIDA Kota Kediri tinggal menentukan kebijakan strategis pembangunan dengan menata pasar, sentra UMKM, dan fasilitasi toko-toko hasil produksi UMKM termasuk menampung dari Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojojoto, untuk pengembangan showroom, dan pertokoan bagi masyarakat UMKM, dan para pedagang dengan wadah Koperasi, kemudian dilakukan pendampingan berkelanjutan. Secara garis besar kondisi sosial budaya masyarakat kota dapat ditunjukkan pada Gambar 1.14.



Gambar 1.14: Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kec Kota Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

1.3.3. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Pesantren

Kondisi sosial budaya masyarakat di Kecamatan Pesantren meliputi kelurahan Blabak, Bawang, Betet, Tusaren, secara mayoritas bermatapencaharian sebagai petani tanaman bahan makanan, Banaran Ngletik, Tempurejo, Ketami, Bangsal, Burengan, Tinalan, Pakunden, Singonegaran dan Kelurahan Jamsaren memiliki potensi sosial budaya masyarakatnya sebagai penghasil pertanian tanaman bahan makanan, dan sebagaian sebagai buruh pabrik, kemudian ada sebagian masyarakatnya yang berdagang dan UMKM dan penghasil kerajinan rakyat. Secara garis besar kondisi potensi Kecamatan Pesantren dapat ditunjukkan pada Gambar 1.15.



Gambar 1.15: Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kec Pesantren Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

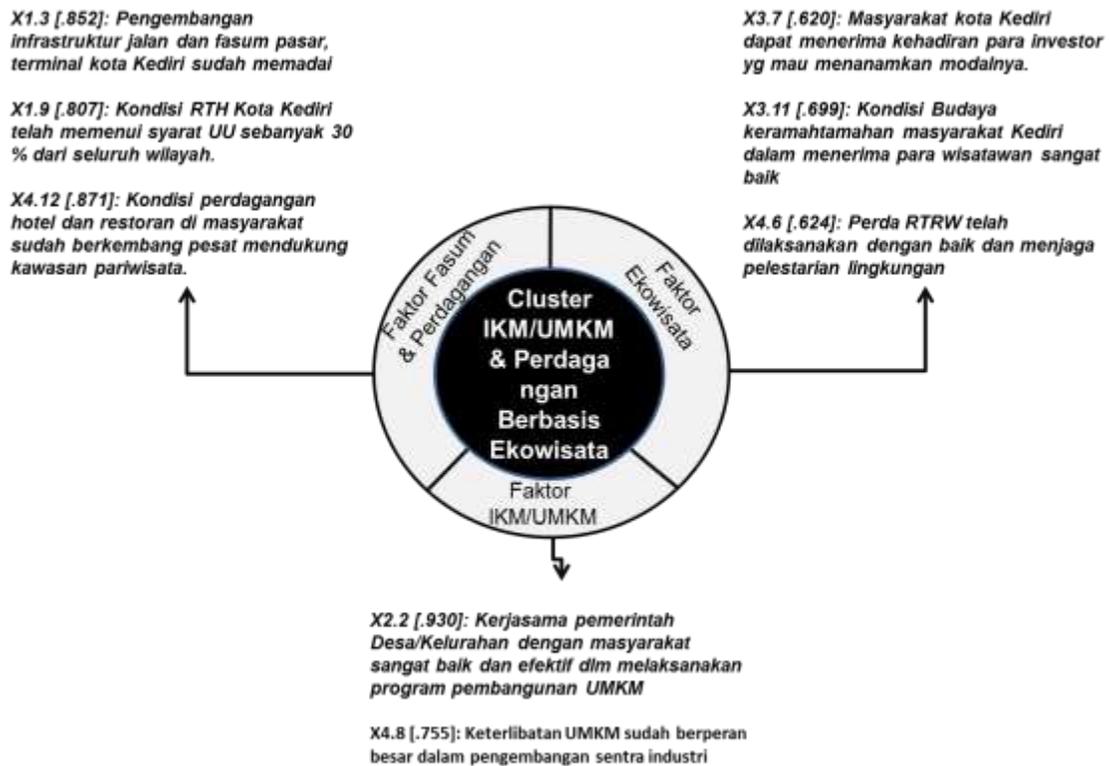
1.4. Penentuan kluster industri berdasarkan potensi ekonomi sosial budaya dalam mendukung SIDA Kota Kediri

Berdasarkan potensi kawasan, karakteristik sosial budaya masyarakat, dan posisi kawasan strategis dapat ditentukan kluster industri yang akan menjadi tema pembangunan SIDA Kota Kediri. Dengan mendasarkan berbagai aspek yang multidimensional, menggunakan analisis faktor dapat diperoleh tiga faktor utama yaitu (1) Faktor fasum dan perdagangan meliputi pentingnya pengembangan infrastruktur jalan dan pasar, terminal; (2) Penjagaan dan pengembangan terhadap RTH sesuai UU sebagai 30% dari luas wilayah; dan (3) penataan dan pengembangan serta pengendalian pembangunan perdagangan, hotel dan restoran dalam mendukung pariwisata yang berwawasan lingkungan. Faktor ke dua yaitu Fator Ekowisata meliputi elemen faktor (1) Masyarakat Kota Kediri mau menerima kehadiran investor yang mau menanamkan modalnya di Kota Kediri; (2) Masyarakat memiliki budaya keramah-tamahan Yang baik dalam merespon para wisatawan yang datang ke Kota Kediri; (3) Perda RTRW telah dilaksanakan dengan baik dan menjaga pelestarian lingkungan.

Faktor Ketiga adalah terkait dengan faktor IKM/UMKM. Dalam hal ini terdapat dua elemen faktor yaitu (1) budaya kerjasama pemerintah dengan masyarakat sangat baik dan efektif dalam menjalankan program pembangunan

UMKM; (2) keterlibatan UMKM memiliki peran besar dalam pengembangan sentra industri.

Berdasarkan pengalaman masyarakat dan kluster industri yang dibangun merupakan potensi besar untuk dijadikan kerangka kebijakan pembangunan bagi Pemerintah Kota Kediri melalui Sistem Inovasi Daerah dengan tema yang sudah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dapat ditentukan kluster industri tematik yaitu: Kluster IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata. Secara garis besar kondisi kluster industri tematik yang dihasilkan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.16.



Gambar 1.16: Kluster Industri Tematik yang terbentuk yaitu Kluster UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata Kota Kediri
 Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

Selanjutnya hasil analisis faktor dalam penentuan klaster utama yaitu Klaster UMKM dan Perdagangan berbasis Ekowisata dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2: Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
x1.3	.780	-.425	-.030
x1.9	.895	.323	-.003
x2.2	.222	.144	.901
x3.7	.348	.593	-.233
x3.11	-.095	.852	.265
x4.6	.632	.625	.243
x4.8	.704	.344	.558
x4.12	.902	.058	.003
x1.1	.181	.315	-.880
x1.5	-.048	-.710	.174

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

1.5. Penentuan kutup-kutup pertumbuhan dalam membangun hilirisasi klaster industri, kelembagaan KUMKM, BUMD/BUMDes serta ruang publik kreatif yang berwawasan lingkungan sebagai kerangka kawasan inovatif bagi pengembangan SIDA Kota Kediri.

1.5.1. Karakteristik Ekonomi Sosial Budaya di Masing-Masing Kecamatan

Berdasarkan matrik kondisi potensi unggulan daerah di masing-masing kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan kecamatan Pesantren dapat ditarik potla potensi masing-masing kawasan sebagai dasar penentuan kutup pertumbuhan Kota Kediri. Karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kecamatan Mojoroto banyak bermatapencaharian sebagai pedagang, prengrajin dan petani. Sedangkan Kecamatan Kota secara mayoritas sebagai masyarakat pedagang, UMKM dan sebagian buruh pabrik. Dan Kecamatan Pesantren secara mayoritas hidup dalam matapencaharian sebagai petani, urutan berikutnya sebagai buruh pabrik dan sebagian sebagai pedagang. Secara garis besar konidisi karakteristik ekonomi sosial budaya masyarakat Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3: Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Kediri

	Petani	Budidaya Bunga	Budidaya Sayur-sayuran	Peternak Ayam	Pedagang	Pertukangan	Jasa Pariwisata	Buruh Pabrik	Koperasi	UMKM	Kerajinan rakyat	Pengasuh pesantren
Pekerjaan utama mata pencaharian masyarakat "Kecamatan Mojoroto" meliputi Kelurahan Pojok, Campurejo, Tamanan, Banjarmati, Bandar Kidul, Lirboyo, Bandar Lor, Mojoroto, Sukorame, Bujel, Ngampel, Gayam, Mrican, dan Kelurahan Dermo adalah?	8	0	1	1	14	2	4	3	0	4	7	5
Pekerjaan utama mata pencaharian masyarakat "Kecamatan Kota" meliputi: Kel. Manisrenggo, Rejomulyo, Ngronggo, Kaliombo, Kampungdalem, Setonopande, Ringinanom, Pakelan, Setonogedong, Kemasari, Jagalan, Banjaran, Ngadirejo, Dandangan, Balowerti, Pocanan, dan Semampir adalah?	1	0	0	0	25	0	3	8	1	9	0	1
Pekerjaan utama mata pencaharian masyarakat "Kecamatan Pesantren" meliputi: Kel. Blabak, Bawang, Betet, Tosaren, Banaran, Nglelih, Tempurejo, Ketami, Pesantren, Bangsa, Burengan, Tinalan, Pakunden, Singonegaran, dan Jamsaren adalah?	25	2	0	0	6	1	1	11	0	6	4	0
Total	34	2	1	1	45	3	8	22	1	19	11	6

Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

1.5.2. Potensi Kawasan Strategis di Masing-Masing Wilayah Kecamatan

Posisi kawasan strategis Kota Kediri yang pertama adalah kecamatan Mojoroto memiliki posisi kawasan strategis sebagai pengembangan daya saing daerah sebagai penghasil produk kerajinan rakyat, serta memiliki destinasi wisata goa selomangleng yang menjadi andalan Kota Kediri, terdapat pasar dan hasil olahan makanan tahu taqwa, getuk pisang dan aneka kerajinan rakyat, sekaligus produknya sudah bisa menembus pasar ekspor, serta memiliki posisi strategis sebagai daerah pertahanan dan keamanan Kota Kediri.

Posisi kawasan strategis berikutnya adalah Kecamatan Kota memiliki keunggulan sebagai pusat transit, pasar induk, bersinggungan dengan jalan provinsi, kemudian banyak tumbuh sntra UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat, serta menjadi pusat perdagangan dan perbelanjaan daerah.

Sedangkan Kecamatan Pesantren juga memiliki posisi strategis bersinggungan dengan jalan provinsi sehingga dapat dikembangkan sebagai pusat transit, banyak hasil pertanian, dan menghasilkan produk UMKM yang

produksinya bisa menembus pasar ekspor. Secara garis besar kondisi potensi masing-masing wilayah dapat ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4: Karakteristik Kawasan Strategis Potensi wilayah Kota Kediri

Potensi Kawasan pada Masing-Masing Wilayah Pengembangan Kecamatan	"Kecamatan Mojoroto" meliputi Kelurahan Pojok, Campurejo, Tamanan, Banjarmati, Bandar Kidul, Lirboyo, Bandar Lor, Mojoroto, Sukorame, Bujel, Ngampel, Gayam, Mrican, dan Kelurahan Dermo	"Kecamatan Kota" meliputi: Kel. Manisrenggo, Rejomulyo, Ngronggo, Kaliombo, Kampungdalem, Setonopande, Ringinanom, Pakelan, Setonogedong, Kemas, Jagalan, Banjaran, Ngadirejo, Dandangan, Balowerti, Pocanan, dan Semampir	"Kecamatan Pesantren" meliputi: Kel. Blabak, Bawang, Betet, Tosaren, Banaran, Ngleth, Tempurejo, Ketami, Pesantren, Bangsal, Burengan, Tinalan, Pakunden, Singonegaran, dan Jamsaren
(1) Wilayah Pengembangan Kec. Kota Kediri bag mana secara prioritas dpt dijadikan kawasan strategis pusat kegiatan ekonomi yg mampu menggerakkan perekonomian daerah?	8	27	3
(2) Wilayah Pengembangan Kec. Kota Kediri bag mana yg paling baik kondisi infrastruktur jalan & irigasi dan bersinggungan dg kawasan strategis Provinsi?	14	10	15
(3) Wilayah Pengembangan Kec. Kota Kediri bag mana yg memiliki potensi unggulan yg bisa dijadikan daya saing daerah? Tuliskan jenis komoditas unggulan pada titik-titik penjelasan tambahan	27	9	3
(4) Wilayah Pengembangan Kec. Kota Kediri bag mana yg memiliki potensi komoditas ekspor? Tuliskan jenis komoditas pada titik-titik penjelasan tambahan	14	7	15
(5) Wilayah Pengembangan Kecamatan bagian mana memiliki posisi strategis bersinggungan dg jalan/Provinsi dan/atau Nasional yg dapat dijadikan kawasan transit antar daerah dan menjadi pasar hasil produksi kota Kediri?	6	28	5
(6) Kawasan Kec. Mana yg cocok sbg daerah pertahanan & Keamanan dalam menjaga kedaulatan negara/daerah	25	11	1
(7) Kawasan Kec. Mana yg cocok sbg daerah pengembangan pasar bagi produk-produk UMKM termasuk kerajinan rakyat Kota Kediri? Sebutkan Kerajinan Rakyat yg diunggulkan	17	14	6
(8) Wilayah Pengembangan/Kec. Mana yg cocok sbg daerah pengembangan pariwisata? Dan Sebutkan 3 destinasi wisata yg diandalkan	31	4	3

Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

1.5.3. Potensi Ekonomi Kota Kediri

Secara garis besar potensi ekonomi Kota Kediri yang pertama di Kecamatan Mojoroto adalah wisata alam pegunungan utamanya Goa Selomangleng dan sekitarnya, kemudian sebagai penghasil kerajinan rakyat, tenun ikat, batik dan lainnya. Sebagai pusat jasa pendidikan dan memiliki potensi sektor peternakan.

Kecamatan Kota memiliki potensi unggulan industri olahan makanan dan minuman, perdagangan hotel dan restoran, wisata kuliner dan wisata religi. Sedangkan Kecamatan Pesantren memiliki potensi unggulan sektor peternakan, olahan makanan minuman, agribis tanaman bahan makanan, industri olahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat. Secara garis besar kondisi masing-masing kecamatan dapat ditunjukkan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5: Kondisi Potensi Unggulan Dimasing-Masing Wilayah Kecamatan Kota Kediri

POTENSI KOTA KEDIRI	Industri Peternakan	Industri Olahhasan	Industri Jasa Perdagangan Hotel & Restoran	Industri Jasa Pendidikan & Kesehatan	Wisata alam	Wisata pegunungan	Wisata buatan	Wisata kuliner	Wisata budayawan	Wisata pendidikan	Wisata religius	Agribisnis tanaman pangan	Agribisnis hortikultura	Agribisnis perikanan	Agribisnis peternakan	Industri Perdagangan	Industri Hotel & Restoran	Industri Kerajinan Rakyat	Industri Game/Bisnis musiman
"Kecamatan Mojoto" meliputi Kelurahan Pojok, Campunojo, Tamanan, Saajamiati, Sander Kidul, Lihoyo, Bendu Lor, Mojoto, Sokonane, Bojot, Ngampel, Gayan, Mical, dan Kelurahan Demu cocok dikembangkan sebagai sentra industri apa?	9	7	4	12	9	20	1	6	5	8	5	4	5	0	2	3	2	12	5
"Kecamatan Kota" meliputi Kel. Naresongo, Rajemulyo, Ngroggo, Kaliombo, Kumpangalen, Sekonopando, Rongyanon, Pakelan, Setonogadong, Kemasak, Jagalan, Banjaran, Ngadino, Gondangan, Bakewati, Pucanan, dan Semarang cocok dikembangkan sebagai sentra industri apa?	7	15	23	3	2	0	2	21	0	2	11	1	1	0	4	9	6	2	1
"Kecamatan Pendaran" meliputi Kel. Blabok, Sawag, Betet, Tosaren, Baratan, Njatih, Temungo, Katani, Pendaran, Bangsal, Barangan, Takalan, Pakundat, Digojogaran, dan Jansaren cocok dikembangkan sebagai sentra industri apa?	10	12	7	9	0	3	8	4	1	0	1	12	0	7	17	4	0	14	0

Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

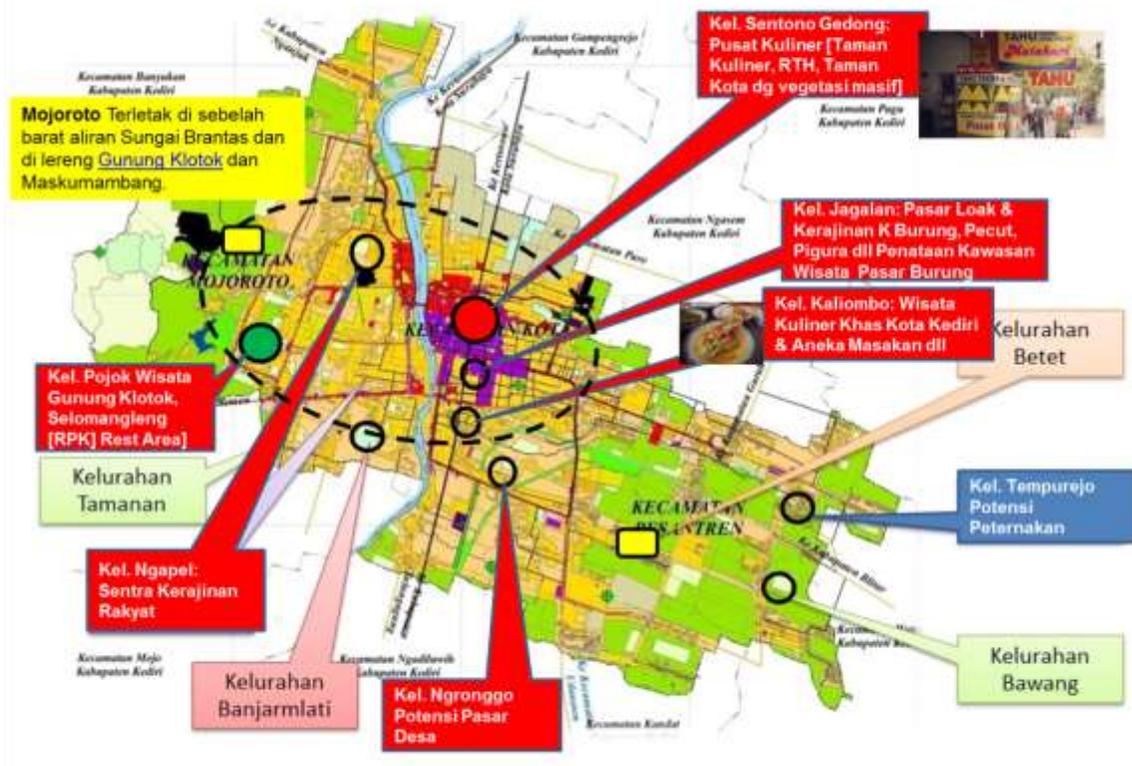
1.5.4. Potensi Ekonomi di Kutup Pertumbuhan Kota Kediri

Kondisi kutup-kutup pertumbuhan Kota Kediri, sebagai Kutup utamanya adalah Kelurahan Sentono Gedong yang berada di Kecamatan Kota dengan unggulan sebagai kawasan sentra kuliner (taman kuliner, RTH) dilengkapi taman kota dengan vegetasi tanaman tertentu secara masive akan membuat Kota Kediri Hijau. Kemudian daerah pendukungnya adalah Kelurahan Jagalan: ada pasar loakan, hasil kerajinan rakyat berupa pecut, pigura dan hasil kerajinan rakyat lainnya sebagai pendukung ekonomi kreatif, dilengkapi wisata pasar burung, kemudian juga didukung Kelurahan Kaliombo terdapat wisata kuliner khas Kota Kediri, aneka masakan khas Jawa.

Kutup pertumbuhan utama ini dibelah oleh aliran Sungai Brantas yang memiliki potensi besar untuk dikemas menjadi panorama elok sepanjang Sungai Brantas, cocok untuk di budat taman kota, ruang terbuka hijau, jogging track, kolam renang, dan ruang publik kreatif rest area dan wisata kuliner, dilengkapi dengan bangunan-bangunan batu candi khas Kerajaan Kediri, terhubung dengan Wisata alam pegunungan Goa Selomangleng yang ada di Kecamatan Mojoroto jika sesuai dan memungkinkan dapat dihubungkan dengan Kreta Gantung menuju Selomangleng dan Makumambang, dilengkapi pertunjukan sendratari dengan kisah-kisah Kerajaan Kediri dan cerita rakyat lainnya yang terjadwal.

Kutup kedua sebagai pendukung kutup pertumbuhan utama adalah Kecamatan Mojoroto, selain terdapat wisata Goa Selomangleng, kawasan ini terdapat sentra kerajinan rakyat tenun ikat, dan kerajinan rakyat lainnya. Dengan demikian integrasi kutup-kutup pertumbuhan utama yang berada di Kecamatan Kota didukung Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren, melalui penetaan ruang publik kreatif, berupa taman kota, panorama view Sungai Brantas, sentra kerajinan rakyat, kawasan sentra kuliner, hutan Kota dan RTH serta taman kota dan rest area yang dirancang secara terintegrasi, dengan didukung kelembagaan koperasi/ BUMD bekerjasama antara Pemerintah, Komunitas pelaku Bisnis, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi akan mampu menciptakan struktur ekonomi kerakyatan yang kuat, dan memiliki konsep yang sustainable dan berdaya saing. Secara garis besar kondisi kutup kutup pertumbuhan Kota Kediri, dengan diintegrasikan dengan klaster UMKM dan Perdagangan berbasis Ekowisata dapat ditunjukkan pada Gambar 1.17.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI MIKRO/KECIL



Gambar 1.17: Kutup-Kutup Pertumbuhan Sebagai Kerangka Kawasan Kluster UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata dalam Mendukung SIDA Kota Kediri

Sumber: Data primer hasil, pemetaan zonasi ekonomi sosial budaya dan pariwisata Bappeda Kota Kediri 2018.

Untuk memperkuat dan memfokuskan tema kluster industri yang dapat diangkat dalam mendukung pengembangan roadmap SIDA Kota Kediri dapat dijelaskan menjadi tiga faktor yaitu faktor I adalah faktor IKM/UMKM dan kerajinan rakyat, faktor II fasilitas umum dan perdagangan, dan Faktor III adalah ekowisata, dengan demikian dapat ditarik intisari kluster tematik yang diperkirakan akan mampu mensinergikan program-program pembangunan di Kota Kediri sekaligus dapat menciptakan daya saing daerah adalah: “Kluster IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata”.

1.6. Pilar Prakarsa Penguatan SIDA, KKI dan Indikator

Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kota Kediri saat ini secara umum menggambarkan bagaimana capaian atau kondisi dari setiap elemen kerangka kebijakan inovasi yang telah ada, yang digambarkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6. Kondisi SIDA Kota Kediri Saat Ini

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pilar 1 :	Elemen 1: Kerangka	a) Dokumen RPJMD dan

Penguatan Sistem Inovasi Daerah	umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	RPJPD mendukung keberadaan penguatan SIDA, hanya implementasinya perlu dioptimalkan
		b) Basis data/ indikator penting inovasi belum tersistem dalam kerangka SIDA
		c) Lembaga pendidikan menengah kejuruan unggulan dan pendidikan tinggi belum optimal mendukung SIDA
		d) Sistem perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan kompetitif berbasis TIK belum terbangun secara maksimal
		e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana warga berinteraksi masih terbatas fungsinya perlu ditingkatkan menjadi Ruang Publik Kreatif (RPK) yang terintegrasi dengan kerangka Roadmap SIDA
		f) Investasi iptekin masih sangat rendah dari APBD.
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Kelembagaan penguatan sistem inovasi Kota Kediri masih terbatas
		b) SDM iptekin masih sedikit
		c) Daya serap masyarakat terhadap iptekin masih terbatas
	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Kaidah-kaidah P-SIDA belum tersosialisasi di seluruh aktor di daerah
		b) Belum teridentifikasinya komunitas masyarakat yang berinteraksi di RPK
		c) Pemanfaatan layanan teknologi belum optimal.
	Elemen 4: Budaya inovasi	a) Apresiasi terhadap kegiatan yang kreatif inovatif belum

			berkembang
			b) Partisipasi masyarakat dalam berinovasi, khususnya relawan inovasi, masih belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah
			c) Budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan pendidikan menengah masih terbatas
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a) Kerjasama antar daerah sekitar Kota Kediri masih belum berjalan dengan optimal bagi pembangunan daerah
			b) Kerjasama antar pusat daerah masih belum berjalan dengan optimal bagi pembangunan daerah
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	a) Kesetaraan gender masih belum optimal
			b) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan masih rendah
			c) Kesadaran HKI di masyarakat masih lemah
			d) Fasilitas untuk masyarakat <i>difabel</i> masih belum tersedia.
2	Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a) Kelembagaan pengelola pengembangan klaster pada kawasan Sentra IKM & Kerajinan Rakyat serta kondisi pasar Berbasis ekowisata masih belum optimal
			b) Landasan legal bagi pengembangan kawasan Sentra IKM dan Perdagangan Berbasis ekowisata belum optimal mempertimbangkan kesinergian dan keintegrasian
			c) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) dan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (Ripow) perlu disinkronkan dengan PSIDa. dalam pelaksanaannya

			<p>d) Akses jalan darat dan sarana angkutan umum menuju objek wisata dan wisata edukasi serta RPK belum optimal</p> <p>e) Operator wisata yang profesional belum ada</p> <p>f) Fasilitas akomodasi, kuliner dan <i>merchandise</i> (souvenir) belum berkembang dan belum memenuhi standar fasilitas wisata nasional maupun internasional</p> <p>g) Pusat informasi kepariwisataan belum optimal</p> <p>h) Rencana induk pengembangan kluster IKM dan kerajinan rakyat serta fasilitas perdagangan terpadu belum tersusun</p> <p>i) Aktivitas ekonomi integrasi kluster agribis dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata belum maksimal.</p>
		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) / atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbang-yasa) serta kemampuan absorpsi industri, khusus-nya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>a) Pasokan iptekin di bidang IKM agribis dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata belum optimal</p> <p>b) Pasokan iptekin IKM, agribis dan kerajinan rakyat berbasis industri dan wisata (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>), belum optimal</p> <p>c) Daya serap iptekin pelaku industri agribis perikanan dan kerajinan rakyat berbasis industri dan wisata (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>), masih terbatas</p> <p>d) Pasokan iptekin industri pariwisata Kota, Pesantren dan Mojoroto dan daerah pendukungnya masih terbatas</p>
			<p>e) Daya serap iptekin pelaku industri pariwisata di kawasan Kecamatan Kota, Pesantren dan Mojoroto masih kurang optimal.</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>a) Interaksi antara para pemangku kepentingan di industri kecil menengah dan kerajinan rakyat berbasis</p>

			ekowisata dengan pemasok iptekin belum optimal;
			b) Interaksi antara para pemangku kepentingan di industri pariwisata dengan pemasok iptekin belum optimal.
		Elemen 4: Budaya inovasi	a) Budaya inovasi di IKM dan perdagangan berbasis ekowisata kurang sinergis dalam kerangka konsep yang terintegrasi didukung kerajinan rakyat belum optimal;
			b) Budaya inovasi di industri pariwisata belum berkembang
			c) Kedekatan hubungan sosial pelaku bisnis dan masyarakat masih kurang
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a) Rantai nilai di klaster IKM dan perdagangan berbasis ekowisata belum memiliki indikator pengembangan; dan produktivitas klaster yang kurang optimal.
			b) Rantai nilai di klaster IKM dan perdagangan berbasis ekowisata belum kuat

		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	a) Aktifitas klaster IKM dan perdagangan dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata belum berwawasan lingkungan secara optimal;
			b) Aktifitas klaster IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata belum berstandar internasional.

3	Pilar Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a) Perizinan bagi pembangunan kawasan IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata belum semuanya dibuat;
			b) Instrumen legal penetapan Kawasan IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata Kota Kediri belum disusun;
			c) Zoning code/regulation dan

			AMDAL zonasi/ KLHS belum disusun semuanya
			d) Proses pembangunan awal Kawasan IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata dan infrastruktur penunjangnya belum optimal.
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Pusat Litbangyasa belum tersedia;
			b) Perguruan Tinggi di Kawasan IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata tersedia namun, perlu dioptimalkan peranannya;
			c) Industri pengguna iptekin di Kawasan IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata masih terbatas
			d) Jumlah HKI terdaftar masih rendah (per 10.000 penduduk)
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Lembaga pengelola kawasan belum terbentuk;
			b) Pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i> di Kawasan IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata belum ada;
			c) Jaringan yang menghubungkan antara pusat inovasi di Kawasan IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata dengan simpul-simpul pelayanan teknologi di kecamatan dan desa serta dengan simpul iptek di luar Kota Kediri belum optimal.
		Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya berjejaring antara aktor inovasi belum berkembang
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a) Keterkaitan antar pelaku pada klaster IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata dengan pelaku/asosiasi lokal, nasional/regional dan internasional belum optimal
			b) Sinergitas antara IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis

			Ekowisata Kota Kediri dengan pusat-pusat unggulan di Koridor Ekonomi Jatim dan Koridor Ekonomi lain belum optimal;
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	a) Produk bersertifikasi terbatas; b) Jumlah pertemuan skala internasional masih sedikit; c) Kesadaran HKI masih rendah.
4	Pilar Penguatan Teknopreneur	4: Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a) Bantuan fasilitasi KUMKM belum fokus pada IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata b) Pembiayaan dari lembaga keuangan dan mitra sudah ada tetapi belum optimal c) Belum adanya insentif dari Pemda untuk pengembangan wirausaha berbasis inovasi (teknopreneur)

		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Kelembagaan pusat inovasi belum ada; b) Kapasitas absorpsi iptekin UKM masih rendah; c) Inisiatif berwirausaha berbasis iptekin dari kalangan pemuda masih rendah.
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Kolaborasi antar UKM inovatif di Kota Kediri masih rendah. b) Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis belum berkembang.
		Elemen 4: Budaya	Budaya menciptakan

		inovasi	kesempatan/ lapangan kerja di kalangan pendidikan tinggi belum optimal.
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster IKM/UMKM dan perdagangan Berbasis Ekowisata secara prioritas belum berkembang
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	a) Produk dari bisnis inovatif yang terstandar masih sedikit; b) Kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif masih sedikit.
5	Pilar 5: Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Rencana induk dan pedoman/panduan <i>green innovation development (GID)</i> mencakup energi bersih, air bersih, transportasi, informasi & komunikasi dan lingkungan belum tersedia

		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbang-yasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Kelembagaan di Kota Kediri yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development (GID)</i> perlu dioptimalkan; b) Pasokan iptekin air bersih, telekomunikasi dan informasi, energi, transportasi, dan lingkungan belum optimal; c) Kapasitas absorpsi masyarakat terhadap iptekin air bersih, telekomunikasi dan informasi, energi, transportasi, dan lingkungan air bersih masih rendah.
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Interaksi pengembangan <i>green innovation development (GID)</i> masih terbatas; b) Kerjasama litbangyasa energi, air bersih, informasi dan komunikasi, transportasi dan lingkungan masih terbatas;

		Elemen 4: Budaya inovasi	a) Komunitas GID sudah ada tetapi belum optimal b) Penerapan GID dalam kurikulum pendidikan sudah ada tetapi belum optimal.
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Keselarasn standar infrastruktur GID (air bersih, teknologi informasi komunikasi, dan lingkungan) belum ada (indikator: jumlah kebijakan daerah dalam GID)
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Kerjasama internasional dalam GID (air bersih, teknologi informasi komunikasi, dan lingkungan) belum ada

1.7. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi pembangunan jangka menengah mempunyai jangkauan 5 tahun dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Adapun Visi pembangunan jangka menengah Kota Kediri mengacu pada visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Kediri tahun 2005-2025, yaitu terwujudnya “**Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing**”. Visi tersebut diwujudkan melalui empat tahapan periodisasi, sedangkan periode 2020-2024 merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat. Pembangunan tahap keempat dilaksanakan dengan berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama sampai ketiga. Pembangunan pada tahap keempat ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian kesejahteraan yang merata dan berdaya saing yang didukung oleh keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, sarana dan prasarana yang berkualitas dengan diimbangi kemampuan ilmu dan teknologi yang dikembangkan secara berkelanjutan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan visi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu **“Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royong”**, serta berpedoman pada arah pembangunan Kota Kediri sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025, dan capaian kinerja pembangunan periode 2014-2019, potensi, isu-isu strategis, serta tantangan Kota Kediri lima tahun ke depan, serta visi-misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih periode 2019-2024, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis dengan mewujudkan Kota Kediri yang unggul dan makmur dalam harmoni. Untuk itu visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2020-2024 adalah **“Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”**. Penjelasan visi Kota Kediri tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Kota Kediri Unggul

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

Kota Kediri Makmur

Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai.

Kota Kediri Harmoni

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

1.7.1. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi perlu disusun misi yang efektif agar visi dapat terwujud pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan “Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1 - Keterkaitan Visi dan Misi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni	Kota Kediri Unggul	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya
	Kota Kediri Makmur	Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan
	Kota Kediri Harmoni	Mewujudkan Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Visi “**Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni**”, secara substansi dijabarkan didalam 4 misi, sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemeritahan yang baik akan menghasikan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegras yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Misi 2

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya yang manusia memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3

Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi 4

Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat merwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

Tujuan dan sasaran dari masing – masing misi pembangunan Kota Kediri tahun 2019 - 2024 yang terkait dengan penguatan sistem inovasi daerah dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

5.3.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kota Kediri dalam 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 5.2 - Keterkaitan Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya
Misi 3 : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif 2. Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan
Misi 4 : Mewujudkan Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran 2. Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan

BAB II TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDa

Tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mengembangkan penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) bisa di kelompokkan menjadi dua yaitu Pertama, tantangan dalam negeri, terkait landasan hukum yang mendasari implementasi SIDa, serta tantangan terkait bagaimana merancang SIDa yang adaptif mampu menggerakkan perekonomian daerah yang secara sistem bisa terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan. Kedua, tantangan arus global yang sudah tidak bisa dibendung lagi perkembangannya berupa arus informasi global yang disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi dan arah kebijakan antar Negara yang tidak bisa menghindar dari pergeseran lingkungan revolusi industry 4.0. Tantangan dalam negeri terkait dengan arah kebijakan pembangunan yang cenderung silih berganti sesuai platform politik siapa yang berkuasa, sehingga sampai saat ini SIDa yang merupakan konsep pembangunan yang tersistem, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, menjadi kurang menentu akibat egosentris kebijakan antar departemen. Oleh karena itu, daerah dihadapkan pada realita bahwa SIDa yang sudah bergulir di Indonesia sejak

disahkannya Peraturan Bersama Kemenristek No 3 dan Kemendagri No 36 Tahun 2012 sudah menggejala di seluruh daerah di Indonesia, disisi lain masih berkuat memperdebatkan landasan hukum diberlakukannya konsep pembangunan melalui SIDa. Perkembangan berikutnya yang menggebirakan, dengan diberlakukannya PP No 38 Tahun 2017 tentang, Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah dengan demikian landasan hokum implmentasi SIDa di daerah menjadi kuat dan tetap relevan sebagai dasar strategi kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan daya saing daerah. Maka dari itu, mengingat pentingnya penguatan SIDa di daerah membutuhkan strategi tersendiri dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SIDa.

Adapun peluang yang bisa dicapai melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah, terjadinya pembangunan yang terkonsep secara sistematis, sinergis, integratif dan berkelanjutan dalam mencapai daya saing daerah sesuai keunggulan komperatif yang dimiliki daerah sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu; untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Dalam konteks nasional, pembangunan daerah merupakan upaya untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan interaksi kerjasama internasional telah mendukung komitmen internasional untuk mewujudkan perdagangan yang lebih luas. Perjanjian internasional seperti Asean Economy Community, Konvensi Rio De Jenairo, dan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDG's, adalah ratifikasi internasional yang disepakati pada tingkat nasional dan harus diimplementasikan di tingkat daerah.

Keberagaman kondisi daerah tentunya akan mempengaruhi responsivitas daerah terhadap dampak ratifikasi tersebut. Kondisi daerah yang belum memiliki daya

saing produk berskala internasional serta daya saing sumberdaya manusia bersertifikasi internasional harus bersaing dan berkompetisi dalam perdagangan bebas lintas negara. Keberadaan ini tentunya akan menjadi salah satu pemicu permasalahan di daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Kediri tergambar pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis Penguatan SIDA Kota Kediri

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional dan Regional	Dinamika Kota Kediri
1.	<p>Tujuan Pembangunan Pasca MDG's</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengakhiri kemiskinan Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender Pendmelingkupiidikan yang berkualitas dan pembelajar-an seumur hidup Memastikan kehidupan yang sehat Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik Akses universal terhadap air dan sanitasi Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang adil Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif Memastikan masyarakat yang stabil dan damai Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global 	<p>Isu strategis berskala nasional meliputi (a) Agenda Pembangunan Nawa Cita (b) Agenda Pembangunan Jawa Bali (c) Ketahanan Pangan Nasional (d) Kualitas Lingkungan Hidup dan Keaneragaman Hayati (e) Ketahanan Energi Nasional (f) Ketahanan Air Nasional (g) Perubahan Iklim Nasional (h) Penerapan SPM. Serta penetapan pembagian Kawasan Strategis Nasional. Selain itu arah kebijakan pembangunan diarahkan pada Nawacita.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nawa Cita melingkupi: <ol style="list-style-type: none"> Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan public berbasis Sistem Informasi. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran di daerah, perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa publik melalui pengembangan mekanisme pengadaan secara elektronik (<i>electronic procurement</i>). Perbaikan sistem administrasi pemerintahan, Penetapan Wilayah Bebas Korupsi melalui pengembangan <i>Pilot Project</i> Perangkat Daerah bebas korupsi; Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. <ol style="list-style-type: none"> Kualitas daya saing sumber daya manusia <i>Pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan</i> <i>Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau</i> Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Lapangan Kerja Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kota Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

		<p>manusia dan masyarakat Indonesia;</p> <p>f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;</p> <p>g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;</p> <p>h. Melakukan revolusi karakter bangsa;</p> <p>i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</p> <p>2. Isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas meliputi Program prioritas “NAWA BHAKTI SATYA” Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tlmur merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2019-2024. Program unggulan ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Adapun penjabaran program prioritas per misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 adalah :</p> <p>Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah</p> <p>JATIM ARGO</p> <p>Pertanian terpadu;</p> <p>Pengembangan agropolitan;</p> <p>Dukungan revolusi</p>	<p>7. Daya Saing Ekonomi Daerah</p> <p>8. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Inflasi</p> <p>9. Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif</p> <p>10. Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>11. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan dan dibina oleh Pemerintah Kota Kediri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR); dan 3) Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar). 4) Kerjasama Daerah Perbatasan, Antar Daerah, dan Pemerintah dengan Swasta <p>3. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar b. Konektivitas Daerah c. Permukiman Inklusif d. Pengendalian Banjir dan Lingkungan Hidup e. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Kota Kediri f. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum <p>4. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan;</p>
--	--	---	--

		<p>industri.</p> <p>Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan</p> <p>JATIM BERDAYA <i>OVOP (One Village One Product On Corporate);</i> Pengembangan <i>UMKM Communal Branding.</i></p> <p>JATIM SEJAHTERA Program Keluarga Harapan (PKH) PLUS; Kerja Kamil; Pengurangan PMKS. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan</p> <p>JATIM CERDAS DAN SEHAT TIS-TAS (Pendidikan Gratis Berkualitas); Beasiswa untuk SMK; Program Desa Sehat.</p> <p>Kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah</p> <p>JATIM KERJA <i>Millineal Job Center; MLeA (Nillineal Incubation For Entrepreneurship & Inovation) dan Dream Team Science</i></p>	<p>5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan;</p> <p>6. Sistem Inovasi Daerah;</p> <p>7. Pengarusutamaan Gender; dan Kemandirian Desa.</p>
--	--	--	--

		<p><i>Teckhno Park; Belanova (Belanja Inovasi Daerah)</i></p> <p>JATIM BERKAH <i>Vocational Training; Pengembangan Shelter.</i></p> <p>JATIM AKSES Pembangunan dan pengembangan Bandara; Pembangunan dan peningkatan jalan; Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan; Peningkatan keselamatan transportasi; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP); Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; Pengurangan pemukiman kumuh. Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris</p> <p>JATIM AMANAH Tata Kelola Pemerintahan CETTAR; <i>Pemerintahan Digital Smart Province;</i> Pembangunan <i>Complaint Handling System;</i> Birokrasi Bebas Korupsi.</p> <p>Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip</p>	
--	--	---	--

		<p>kebhinekaan</p> <p>JATIM HARMONI Membangun Ruang ke-Bhinekaan; Membangun <i>Eco-Tourism</i>; Membangun Fasilitas Olahraga.</p> <p>JATIM BERKAH Membangun Karakter Pemuda. Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya</p> <p>JATIM HARMONI Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; Kesiapsiagaan dan kapasitas penanganan bencana; Pembangunan yang berkelanjutan.</p>	
2.	<p>Asean Economy Community (AEC) Karakteristik kunci dari perwujudan AEC :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasar tunggal dan produksi dasar Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah Sebuah wilayah ekonomi yang adil dan berkembang Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi kedalam perekonomian global. <p>Bidang kerjasama AEC, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas 		

<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan kualifikasi profesional - Konsultasi mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan - Langkah-langkah pembiayaan dalam perdagangan - Peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi - Pengembangan elektronik transaksi melalui e-ASEAN - Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber di daerah - Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan AEC <p>(AEC akan mengubah ASEAN kewilayah dengan pergerakan bebas dari barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil, dan lebih bebas aliran modal)</p>		
--	--	--

Tabel. 2.2. Identifikasi Permasalahan Penguatan SIDA Kota Kediri

No	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah	Indikator Keberhasilan
1	2	3	4
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercukupinya sarana, prasarana, dan alat peraga edukasi (APE) PAUD (<i>indoor dan outdoor</i>) baik di TK, KB (Kelompok Bermain), TPA (Taman Penitipan Anak) maupun SPS (PAUD); 2. Belum semua tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, KB, TPA dan SPS (PAUD) memahami kebutuhan esensial anak dalam belajar; 3. Kualitas pendidikan dasar masih perlu ditingkatkan termasuk di dalamnya kuantitas, kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sarana, prasarana, dan alat peraga edukasi (APE) PAUD (<i>indoor dan outdoor</i>) baik di TK, KB (Kelompok Bermain), TPA (Taman Penitipan Anak) maupun SPS (PAUD); 2. Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, KB, TPA dan SPS (PAUD) untuk mencerahkan dan strategi pemahaman kebutuhan esensial anak dalam belajar; 3. Peningkatan Kualitas dan kompetensi kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas, pemilik); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kecukupan sarana dan prasarana dan alat peraga edukasi 2. Prestasi anak belajar meningkat 3. Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi Kepala sekolah, Laboran, pustakawan, tenaga admin, pengawas dan penilik. 4. Persentase rasio kecukupan sarana dan prasarana sekolah

	<p>administrasi, pengawas, pemilik);</p> <p>4. Belum tercukupinya sarana dan prasarana sekolah (perpustakaan, laboratorium, peralatan praktek, serta peralatan penunjang IT untuk SD dan SMP);</p> <p>5. Jumlah sekolah menengah pertama negeri masih belum sebanding dengan jumlah murid;</p> <p>6. Transparansi dan akuntabilitas manajemen pendidikan masih perlu ditingkatkan;</p> <p>7. Lembaga-lembaga pendidikan non formal dalam menunjang keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan belum terkoordinasi, terpadu dan terintegrasi dalam menunjang penurunan pengangguran di Kota Kediri.</p>	<p>4. Meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana sekolah (perpustakaan, laboratorium, peralatan praktek, serta peralatan penunjang IT untuk SD dan SMP);</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas Jumlah sekolah menengah pertama negeri masih yang sebanding dengan jumlah murid;</p> <p>6. Evaluasi dan pengendalian manajemen pendidikan secara Transparan dan akuntabel;</p> <p>7. Fasilitasi dan peningkatan kualitas Lembaga-lembaga pendidikan non formal dalam menunjang keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara terkoordinasi, terpadu dan terintegrasi dalam menunjang penurunan pengangguran di Kota Kediri.</p>	<p>5. Persentase kecukupan rasio jumlah sekolah menengah pertama negeri dengan jumlah murid</p> <p>6. Kinerja Manajemen Pendidikan meningkat, secara transparan dan akuntabel</p> <p>7. Jumlah banyaknya fasilitasi dan peningkatan kualitas</p>
	1) Sarana prasarana pelayanan kesehatan	1) Meningkatkan tercapainya standar	1) Persentase tercapainya standar kualitas sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan

<p>dan peralatan medis maupun non medis yang ada baik di puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan poskeskel masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;</p> <p>2) Belum memadainya jumlah tenaga kesehatan dan masih perlunya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan dokter spesialis pada unit-unit pelayanan kesehatan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;</p> <p>3) Kemandirian masyarakat di bidang kesehatan dengan pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pengelolaan tempat-tempat umum yang sehat dan lingkungan yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) perlu ditingkatkan;</p> <p>4) Belum optimalnya pelayanan komplikasi</p>	<p>kualitas Sarana prasarana pelayanan kesehatan dan peralatan medis maupun non medis yang ada baik di puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan poskeskel</p> <p>2) Meningkatkan rasio jumlah tenaga kesehatan yang setandar peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan dokter spesialis pada unit-unit pelayanan kesehatan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;</p> <p>3) Melakukan penyuluhan di bidang kesehatan dengan pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pengelolaan tempat-tempat umum yang sehat dan lingkungan yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)</p>	<p>2) Rasio jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas tenaga kesehatan, dokter spesialis dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat</p> <p>3) Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilakukan</p> <p>4) Jmlah kasus pelayanan unit gawat darurat yang tertangani dengan baik.</p> <p>5) Meningkatnya indek kinerja penanganan gizi buruk di masyarakat</p>
--	---	--

	<p>dan kegawatdaruratan pada obstetri dan neonatal termasuk rujukan berjenjang untuk menekan angka kematian ibu dan bayi;</p> <p>5) Masih ditemukannya balita dengan gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat;</p> <p>6) Pemerintah daerah belum memiliki rumah sakit tipe C/D untuk menjadi rujukan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;</p> <p>7) Perlu peningkatan kualitas layanan pada rumah sakit umum daerah;</p> <p>8) Belum optimalnya pencapaian tujuan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) dalam meningkatkan kualitas pelayanan di layanan kesehatan.</p>	<p>4) Mengoptimalkan pelayanan komplikasi dan kegawatdaruratan pada obstetri dan neonatal termasuk rujukan berjenjang untuk menekan angka kematian ibu dan bayi;</p> <p>5) Program Posyandu untuk mengatasi balita kurang dan gizi buruk di masyarakat;</p> <p>6) Mengembangkan rumah sakit tipe C/D untuk menjadi rujukan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;</p> <p>7) Meningkatkan standar kualitas layanan pada rumah sakit umum daerah;</p> <p>8) Mengoptimalkan pencapaian tujuan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) dalam meningkatkan kualitas pelayanan di layanan kesehatan.</p>	<p>6) Terabngunnya RS tipe C/D sebagai rumah sakit rujukan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>7) Tercapainya penerapan standar kualitas layanan pada rumah sakit umum daerah</p> <p>8) Tercapainya kinerja UHC dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</p>
	<p>1) Belum terpenuhinya kualitas dan</p>	<p>1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas</p>	<p>1) Persentase jumlah pembangunan infrastruktur dari yang ditargetkan</p>

	<p>kuantitas infrastruktur kebinamargaan terlihat dari kurangnya pembangunan jalan maupun jembatan baru dan belum optimalnya normalisasi jaringan drainase dan pembangunan trotoar baru;</p> <p>2) Keterbatasan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak rencana pembangunan Exit tol dan bandara di Kabupaten Kediri;</p> <p>3) Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur prasarana sumber daya air dalam upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih dan air minum;</p> <p>4) Belum terpenuhinya kebutuhan</p>	<p>infrastruktur kebinamargaan terlihat dari kurangnya pembangunan jalan maupun jembatan baru dan belum optimalnya normalisasi jaringan drainase dan pembangunan trotoar baru;</p> <p>2) Menggali potensi pendanaan dari berbagai pihak terkait untuk pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak rencana pembangunan Exit tol dan bandara di Kabupaten Kediri;</p> <p>3) Meningkatkan ketercapaian standar kuantitas dan kualitas infrastruktur prasarana sumber daya air dalam upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih dan air minum;</p> <p>4) Membangun instalasi sistem pengolahan</p>	<p>2) Persentase peningkatan pendanaan pembangunan infrastruktur dalam mengantisipasi exit tol bandara Kabupaten Kediri</p> <p>3) Tercapainya standar kuantitas dan kualitas infrastruktur prasarana sumber daya air dalam mengurangi kerusakan lingkungan</p> <p>4) Terbangunnya instalasi penanganan limbah terpusat bagi pelaku usaha / industry kecil dan rumah tangga.</p> <p>5) Persentase terbangunnya jumlah irigasi terpadu</p> <p>6) Terjalannya kerjasama yang efektif dalam pengembangan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi</p>
--	---	--	---

<p>sistem pengolahan limbah terpusat bagi pelaku usaha/ industri kecil dan rumah tangga;</p> <p>5) Kurang tercukupinya kebutuhan jaringan irigasi yang baik untuk meningkatkan produksi pertanian.</p> <p>6) Masih diperlukannya koordinasi yang intensif dengan provinsi terutama terkait pembangunan dan pemeliharaan plengsengan / tanggul yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>Adapun beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang di Kota Kediri antara lain:</p> <p>1) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan bangunan di Kota Kediri terlihat dari rendahnya rasio bangunan ber-IMB;</p> <p>2) Belum optimalnya RTRW dan RDTRK</p>	<p>limbah terpusat bagi pelaku usaha/ industri kecil dan rumah tangga;</p> <p>5) Mengembangkan jaringan irigasi yang baik terpadu untuk meningkatkan produksi pertanian.</p> <p>6) Melakukan dan memprogramkan koordinasi yang intensif dengan provinsi terutama terkait pembangunan dan pemeliharaan plengsengan / tanggul yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>Mengatasi beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang di Kota Kediri antara lain:</p> <p>1) Mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan bangunan di Kota Kediri untuk mencapai standar rasio bangunan ber-IMB;</p> <p>2) Mengoptimalkan RTRW dan RDTRK sebagai acuan/pedoman pembangunan di Kota Kediri oleh seluruh pemangku</p>	<p>1) Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai fungsinya</p> <p>2) Tersusunnya RTRW dan RDTRK sebagai acuan pembangunan</p>
--	---	---

	<p>sebagai acuan/pedoman pembangunan di Kota Kediri oleh seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.</p>	<p>kepentingan dan partisipasi masyarakat.</p>	
	<p>A. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Cakupan rumah layak huni di Kota Kediri di tahun 2018 sebesar 93,42%, masih belum mencapai target RPJMD 2014-2019 sebesar 98%. Akar masalah terkait belum tercapainya target pelayanan rumah layak huni dan bidang perumahan dan permukiman di Kota Kediri antara lain:</p> <p>Belum optimalnya penataan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Kediri yang disebabkan antara lain:</p> <p>1. Belum tersedianya regulasi kebijakan yang mengatur tentang Penataan</p>	<p>1. Menyusun regulasi kebijakan yang mengatur tentang Penataan Perumahan</p>	<p>1) Tersusunnya regulasi kebijakan tentang penataan kawasan pemukiman</p> <p>2) Terjaganya stabilitas harga pasar dalam</p>

	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>2. Masih adanya backlog dikarenakan harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan di bawah MBR;</p> <p>3. Masih adanya perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya sehingga banyak PSU Perumahan yang rusak belum dapat diperbarui.</p> <p>4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman terutama dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta pemenuhan RTLH, kebersihan, Penerangan Jalan Umum, sanitasi, sistem penanganan kebakaran, air bersih dan penanganan air limbah;</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri</p>	<p>dan Kawasan Permukiman;</p> <p>2. Melakukan negosiasi dan penetapan standar harga pasar untuk mengatasi backlog dikarenakan harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan di bawah MBR;</p> <p>3. Melakukan penertiban PSU bagi perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman terutama dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta pemenuhan RTLH, kebersihan, Penerangan Jalan Umum, sanitasi, sistem penanganan kebakaran, air bersih dan penanganan air limbah;</p> <p>5. Mengembangkan jumlah tempat</p>	<p>mengatasi baclog</p> <p>3) Efektivitas penertiban PSU bagi masyarakat</p> <p>4) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU)</p> <p>5) Tercukupinya jumlah tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah Kota Kediri</p> <p>6) Persentase berkurangnya kawasan kumuh kelurahan</p> <p>7) Terbangunnya pelayanan Rusunawa/Apartemen Rakyat</p>
--	--	--	---

	<p>6. Masih adanya kelurahan yang masuk kawasan kumuh maupun kawasan rawan kumuh yang memerlukan penanganan dan antisipasi agar tidak menurun menjadi kawasan kumuh.</p> <p>7. Belum optimalnya pelayanan Rusunawa/Apartemen Rakyat di Kota Kediri karena keterbatasan fasilitas.</p>	<p>pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri</p> <p>6. Menanggulangi kelurahan yang masuk kawasan kumuh maupun kawasan rawan kumuh yang memerlukan penanganan dan antisipasi agar tidak menurun menjadi kawasan kumuh.</p> <p>7. Mengoptimalkan pelayanan Rusunawa/Apartemen Rakyat di Kota Kediri karena keterbatasan fasilitas.</p>	
	<p>1) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasana penunjang pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat seperti kendaraan operasional satpol PP, Mobil Pemadam Kebakaran, Poskamling yang aktif serta lainnya sehingga terkadang mempengaruhi <i>respons</i></p>	<p>1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasana penunjang pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat seperti kendaraan operasional satpol PP, Mobil Pemadam Kebakaran, Poskamling yang aktif serta lainnya</p>	<p>1) Jumlah kuantitas dan kualitas SDM dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>2) Menurunnya indek angka kriminalitas</p>

	<p><i>time</i> pelayanan;</p> <p>2) Belum optimalnya penurunan tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya, akar masalahnya antara lain :</p> <p>3) Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) seperti peredaran miras, penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika, dan tindak asusila terselubung, bangunan tanpa ijin dan gepeng;</p> <p>4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi perda, seperti pelanggaran pemasangan reklame dan kawasan bebas reklame, kawasan bebas PKL.</p> <p>5) Masih rendahnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri;</p>	<p>2) Menangani tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya,</p> <p>3) Menangani adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) seperti peredaran miras, penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika, dan tindak asusila terselubung, bangunan tanpa ijin dan gepeng;</p> <p>4) Sosialisasi kesadaran masyarakat dalam mematuhi perda, seperti pelanggaran pemasangan reklame dan kawasan bebas reklame, kawasan bebas PKL.</p> <p>5) Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri;</p> <p>6) Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme, terorisme dan</p>	<p>3) Menurunnya jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)</p> <p>4) Tersosialisainya perda tentang kesadaran masyarakat dalam mematuhi pemasangan reklame dan kawasan bebas reklame</p> <p>5) IKD membaik</p> <p>6) Menurunnya angka kriminalitas</p> <p>7) Jumlah sosialisasi dan pemahaman wawasan kebangsaan</p>
--	--	---	---

	<p>6) Perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme, terorisme dan konflik antar elemen masyarakat yang ada;</p> <p>7) Perlunya menumbuhkan kembali rasa Cinta Tanah Air dan Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pergeseran nilai budaya lokal gotong royong dan kekeluargaan; b. Derasnya pengaruh budaya asing dan paham liberalisme, sosialisme, komunisme, radikalisme dengan segala bentuk manifestasinya; c. Pengaruh negatif media sosial. 	<p>konflik antar elemen masyarakat yang ada;</p> <p>7) Menumbuhkan kembali rasa Cinta Tanah Air dan Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI sebagai upaya untuk</p>	
	<p>1) Database kemiskinan masih perlu</p>	<p>1) Database kemiskinan masih perlu</p>	<p>1) Tersusunya database kemiskinan secara terintegrasi dan terkelola dengan baik</p>

	<p>dilakukan <i>updating</i> secara berkala;</p> <p>2) Belum tuntasnya penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan data susenas jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 23.770 jiwa (2015) dan menurun menjadi 21.900 jiwa (2018). Angka tersebut masih cukup tinggi 7,68% jika dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada pemerintahan kota seluruh Jawa Timur;</p> <p>3) Belum optimalnya penanganan PMKS melalui tempat penampungan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan :</p> <p>a. Masih kurangnya kesadaran dari PMKS di Kota Kediri. Tercermin dari adanya penolakan dari PMKS untuk</p>	<p>dilakukan <i>updating</i> secara berkala;</p> <p>2) Implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan data susenas jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 23.770 jiwa (2015) dan menurun menjadi 21.900 jiwa (2018). Angka tersebut masih cukup tinggi 7,68% jika dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada pemerintahan kota seluruh Jawa Timur;</p> <p>3) Mengoptimalkan pelaksanaan program penanganan PMKS melalui tempat penampungan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan Jaminan Kesehatan Nasional:</p> <p>d. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran dari PMKS di Kota Kediri.</p> <p>e. Mengoptimalkan peran barak penampungan untuk PMKS Terlantar;</p>	<p>2) Berhasilnya program penanggulangan kemiskinan dan menurunnya angka kemiskinan</p> <p>3) Menurunnya jumlah PMKS dan tertanganannya PMKS dengan baik</p>
--	--	--	--

	<p>mengikuti program pelatihan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Kediri;</p> <p>b. Belum optimalnya peran barak penampungan untuk PMKS Terlantar;</p> <p>c. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik dan terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>4) Belum optimalnya peran dan fungsi tenaga Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat;</p> <p>5) Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar PMKS belum seluruhnya tepat sasaran;</p> <p>6) Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana sosial</p>	<p>f. Meningkatkan jumlah tenaga yang terdidik dan terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>4) Mengoptimalkan peran dan fungsi tenaga Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat;</p> <p>5) Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang tepat sasaran;</p> <p>6) Mengoptimalkan penanganan bencana alam dan bencana sosial dikarenakan mitigasi bencana yang belum sempurna.</p>	<p>4) Meningkatnya Jumlah penanganan PMKS dimasyarakat</p> <p>5) Penyaluran dana bantuan social sesuai kriteria yang ditentukan</p> <p>6) Terbangunnya kesiapsiagaan dalam kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p>
--	---	---	--

	dikarenakan mitigasi bencana yang belum sempurna.		
	<p>1) Rendahnya penyerapan tenaga kerja yang memiliki daya saing di pasar kerja, hal tersebut dikarenakan :</p> <p>a. Kurang tersedianya tenaga kerja yang sesuai kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan;</p> <p>b. Minimnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja;</p> <p>c. Berkurangnya kontribusi penempatan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) akibat berkurangnya jumlah LPKS (terkait ijin operasional).</p> <p>2) Belum optimalnya pelaksanaan</p>	<p>1) Meningkatkan lapangan / kesempatan pekerjaan bagi tenaga kerja yang memiliki daya saing di pasar kerja,</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang sesuai kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan;</p> <p>e. Menetapkan peraturan tentang ketenagakerjaan guna meningkatkan kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja;</p> <p>f. Meningkatkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam mengurangi jumlah LPKS (terkait kemudahan ijin operasional).</p> <p>2) Menjalinkan hubungan industrial. Dalam</p>	<p>1) Tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang usaha</p> <p>2) Terjalinnnya hubungan kerjasama yang kondusif dengan industrial dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan</p>

	<p>hubungan industrial. Permasalahannya antara lain :</p> <p>a. Belum optimalnya kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kepatuhan hukum peraturan ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian upah sesuai UMK dan pemberian jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja;</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan norma dan syarat syarat kerja secara berkelanjutan;</p> <p>c. Belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri terhadap perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja, pentingnya fungsi dan peran lembaga kerjasama bipartit bagi kelangsungan perusahaan.</p>	<p>mengatasi Permasalahan antara lain:</p> <p>e. Meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kepatuhan hukum peraturan ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian upah sesuai UMK dan pemberian jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja;</p> <p>f. Mengoptimalkan pelaksanaan norma dan syarat syarat kerja secara berkelanjutan;</p> <p>g. Merumuskan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri terhadap perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja, pentingnya fungsi dan peran lembaga kerjasama bipartit bagi kelangsungan perusahaan.</p>	
--	---	--	--

	<p>d. Belum dilibatkannya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam proses penerbitan ijin perusahaan di Kota Kediri. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam perekrutan tenaga kerja lokal.</p>		
	<p>A. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>Beberapa permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Kediri antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusatamaan Gender (PUG) serta belum optimalnya kinerja Pokja PUG Kota Kediri; 2) Masih adanya kasus tindak kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penguatan kelembagaan dan jaringan Pengarusatamaan Gender (PUG) serta mengoptimalkan kinerja Pokja PUG Kota Kediri; 2) Merumuskan peraturan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Indeg kinerja gender yang meningkat 2) Tersusunnya dan terimplementasinya Peraturan Pemerintah terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

	<p>terhadap perempuan dan anak;</p> <p>3) Pencapaian indikator KLA belum optimal;</p> <p>4) Pengaruh teknologi informasi pada anak usia remaja yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar berdampak buruk terjadinya kejahatan seksual, tindak kekerasan dan perdagangan orang, perilaku seks bebas, penggunaan narkoba dan kasus perkawinan usia muda.</p>	<p>terkait dengan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>3) Mensosialisasikan program lingkungan pendidikan bagi anak-anak untuk mencapai indikator Kota Layak Anak (KLA)</p> <p>4) Memberikan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi pada anak usia remaja secara benar dan proporsional guna memberikan pemahaman yang benar untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkannya.</p>	<p>3) Tercapainya standar indek Kelayakan Anak (KLA)</p> <p>4) Jumlah sosialisasi yang dilakukan</p>
	<p>1) Belum Terpenuhinya Pola Konsumsi pangan sesuai PPH Nasional dikarenakan Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi keluarga tentang komposisi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman);</p> <p>2) Belum optimalnya ketersediaan informasi pasar, harga dan akses</p>	<p>1) Sosialisasi berkelanjutan Pola Konsumsi pangan sesuai PPH Nasional dikarenakan Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi keluarga tentang komposisi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman);</p> <p>2) Menyusun databased ketersediaan informasi pasar, harga dan akses</p>	<p>1) Jumlah Sosialisasi pola konsumsi pangan sesuai PPH Nasional</p> <p>2) Tersusunnya databased ketersediaan informasi harga dan akses pangan daerah</p> <p>3) Terkendalikannya mata rantai pasok pangan</p>

	<p>pangan daerah karena belum intensifnya pengumpulan data pasar, harga dan akses pangan;</p> <p>3) Walaupun ketersediaan pangan di Kota Kediri berlebih, namun masih dijumpai beberapa kelurahan yang rentan terhadap kerawanan pangan.</p>	<p>pangan daerah karena belum intensifnya pengumpulan data pasar, harga dan akses pangan;</p> <p>3) Memperlancar distribusi ketersediaan pangan di Kota Kediri yang berlebih, untuk mengantisipasi beberapa kelurahan yang rentan terhadap kerawanan pangan.</p>	<p>Kota Kediri</p>
	<p>1) Proses pengadaan tanah memerlukan waktu yang relatif panjang;</p> <p>2) Sering terjadinya perubahan peraturan dan kurangnya sistem informasi.</p>	<p>1) Memperbaiki proses pengadaan tanah yang memerlukan waktu yang relatif panjang sesuai peruntukannya;</p> <p>2) Memperbaiki dan sosialisasi terjadinya perubahan peraturan dan kurangnya sistem informasi.</p>	<p>1) Prosedur pengadaan lahan yang jelas dan waktu pelayanan yang semakin singkat</p> <p>2) Jumlah sosialisasi peraturan dengan berbagai metode</p>
	<p>1) Terbatasnya lahan TPA perkotaan sehingga diperlukan penguatan kerjasama dalam pembangunan TPA Regional dengan Kabupaten Kediri</p>	<p>1) Mengoptimalkan jalinan kerjasama dalam pengembangan lahan TPA perkotaan melalui penguatan kerjasama dalam pembangunan TPA Regional dengan</p>	<p>1) Terbangunnya jalinan kerjasama antar daerah dan dengan pusat</p>

	<p>yang difasilitasi Provinsi Jawa Timur;</p> <p>2) Masih diperlukannya peningkatan luasan RTH Publik di Kota Kediri dalam mencapai luasan RTH 20% dari luas wilayah;</p> <p>3) Masih kurangnya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);</p> <p>4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan air limbah, baik limbah industri, domestik maupun tinja terutama dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup untuk mengendalikan pencemaran limbah industri pada lingkungan di sekitarnya;</p> <p>5) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air</p>	<p>Kabupaten Kediri yang difasilitasi Provinsi Jawa Timur;</p> <p>2) Meningkatkan luasan RTH Publik di Kota Kediri dalam mencapai luasan RTH 30% dari luas wilayah;</p> <p>3) Memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);</p> <p>4) Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan air limbah, baik limbah industri, domestik maupun tinja terutama dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup untuk mengendalikan pencemaran limbah industri pada lingkungan di sekitarnya;</p> <p>5) Mengoptimalkan pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (<i>system sewerage</i>) IPAL/IPAL Komunal.</p>	<p>2) Tercapainya RTH sesuai dengan ketentuan Undang Undang 30% dari luas wilayah</p> <p>3) Indeks kualitas lingkungan hidup</p> <p>4) Indeks kualitas lingkungan hidup</p> <p>5) Terbangunnya IPAL komunal dalam pengolahan system air limbah terpusat</p>
--	--	---	---

	limbah terpusat (<i>system sewerage</i>) IPAL/IPAL Komunal.		
	<p>1) Kepemilikan dokumen kependudukan untuk seluruh penduduk Kota Kediri belum maksimal;</p> <p>2) Keterbatasan sarana dan prasarana serta aparatur yang berkompeten menjadi administrator database baik di Dispendukcapil maupun tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga terkadang menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat;</p> <p>3) Belum terintegrasinya data kependudukan dan kurangnya koordinasi antar <i>stakeholder</i> (pengguna dan pengelola) untuk mengakses data kependudukan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.</p>	<p>1) Memperbaiki database kepemilikan dokumen kependudukan untuk seluruh penduduk Kota Kediri yang belum maksimal;</p> <p>2) Mengembangkan sarana dan prasarana serta aparatur yang berkompeten menjadi administrator database baik di Dispendukcapil maupun tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga terkadang menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat;</p> <p>3) Melakukan integrasi data kependudukan dan koordinasi antar <i>stakeholder</i> (pengguna dan pengelola) untuk mengakses data kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan secara</p>	<p>1) Terbangunnya database terpadu kependudukan</p> <p>2) Terbangunnya sarana dan prasarana dispendukcapil dalam meningkatkan pelayanan kependudukan</p> <p>3) Tursusunnya system manajemen database dalam peningkatan pelayanan kependudukan</p>

		optimal.	
	<p>Permasalahan terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih besarnya ketergantungan masyarakat kelurahan terhadap bantuan pemerintah, khususnya dalam upaya menggalang keswadayaan masyarakat; 2) Manajemen di tingkat pemerintah kelurahan masih perlu ditingkatkan; 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan teknologi tepat guna dalam proses pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat kelurahan; 4) Belum tercatatnya secara akurat nilai swadaya masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi ketergantungan masyarakat kelurahan terhadap bantuan pemerintah, khususnya dalam upaya menggalang keswadayaan masyarakat; 2) Meningkatkan manajemen di tingkat pemerintah kelurahan dalam mengali potensi lokal; 3) Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan teknologi tepat guna dalam proses pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat kelurahan; 4) Melakukan penertiban indikator-indikator kinerja yang terukur terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kemandirian kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan 2) Berjalannya manajemen pemerintahan kelurahan dalam mengoptimalkan potensi local 3) Keterserapan teknologi tepat guna di masyarakat 4) Tingkat keberhasilan kinerja pemberdayaan masyarakat 5) Terbangunnya model pengelolaan unit keuangan (UPKU) menjadi BUMD berbasis hilirisasi

	<p>mendukung penyertaan program-program pemberdayaan masyarakat;</p> <p>5) Belum optimalnya pengelolaan unit keuangan (UPKU) di kelurahan untuk dapat menjadi Badan Usaha Milik Masyarakat Kelurahan;</p>	<p>nilai swadaya masyarakat dalam mendukung penyertaan program-program pemberdayaan masyarakat;</p> <p>5) Mengoptimalkan model pengelolaan unit keuangan (UPKU) di kelurahan untuk dapat menjadi Badan Usaha Milik Masyarakat Kelurahan berbasis hilirisasi;</p>	
	<p>Beberapa permasalahan di urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal;</p> <p>2) Belum terpenuhinya tenaga fungsional Penyuluh KB/PLKB;</p> <p>3) Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja kurang</p>	<p>1) Memahami penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal;</p> <p>2) Meningkatkan rasio terpenuhinya tenaga fungsional Penyuluh KB/PLKB;</p> <p>3) Memahami dan sosialisasi peran</p>	<p>1) Jumlah sosialisasi program KB</p> <p>2) Tercapainya standar rasio tenaga fungsional penyuluh KB</p> <p>3) Jumlah sosialisasi kepada para remaja terhadap pemahaman reproduksi</p>

	<p>optimal;</p> <p>4) Kurangnya akses permodalan kelompok UPPKS untuk pengembangan usaha, serta masih rendahnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera).</p>	<p>remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja kurang optimal;</p> <p>4) Meningkatkan akses permodalan kelompok UPPKS untuk pengembangan usaha, serta masih rendahnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera).</p>	<p>4) Kinerja UPPKS untuk pengembangan usaha</p>
	<p>Permasalahan pada urusan perhubungan antara lain:</p> <p>1) Capaian indikator rasio ijin trayek dan layanan angkutan umum perkotaan masih relatif rendah sehingga membutuhkan pengembangan jaringan angkutan umum orang perkotaan di Kota Kediri;</p>	<p>Permasalahan pada urusan perhubungan antara lain:</p> <p>1) Meningkatkan capaian indikator rasio ijin trayek dan layanan angkutan umum perkotaan masih membutuhkan pengembangan jaringan angkutan umum orang perkotaan di Kota Kediri;</p> <p>2) Meningkatkan fasilitas perlengkapan</p>	<p>1) Tercapainya indikator rasio ijin trayek dan layanan angkutan umum</p> <p>2) Persentase terbangunnya fasilitas perlengkapan lalu lintas dan menurunnya</p>

	<p>2) Peningkatan fasilitas perlengkapan lalu lintas angkutan jalan sangat diperlukan terkait masih cukup tingginya angka kecelakaan di Kota Kediri;</p> <p>3) Belum optimalnya sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan angkutan umum perkotaan terutama armada bus sekolah dan pelayanan angkot;</p> <p>4) Kurang tersedianya halte di tempat-tempat strategis, serta masih perlunya peningkatan pemeliharaan untuk fasilitas penumpang di halte;</p> <p>5) Kebutuhan pengembangan Terminal Tipe-C di Selomangleng Kel. Pojok, Lapangan Mrican, dan Tempurejo.</p>	<p>lalu lintas angkutan jalan untuk menekan angka kecelakaan di Kota Kediri;</p> <p>3) Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan angkutan umum perkotaan terutama armada bus sekolah dan pelayanan angkot;</p> <p>4) Mengembangkan bangunan halte di tempat-tempat strategis, serta peningkatan pemeliharaan untuk fasilitas penumpang di halte;</p> <p>5) Setudi Amdal pengembangan Terminal Tipe-C di Selomangleng Kel. Pojok, Lapangan Mrican, dan Tempurejo.</p>	<p>jumlah kecelakaan</p> <p>3) Terbangunnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan angkutan perkotaan</p> <p>4) Jumlah halte dan fasilitas halte yang terbangun</p> <p>5) Terlaksananya studi amdal terminal tipe-C di Selomangleng</p>
	<p>Permasalahan terkait dengan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :</p>		

<p>1) Dokumen masterplan pengembangan TIK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini, dan belum disusun <i>blue printnya</i> secara rinci, sehingga perlu adanya review serta penyusunan <i>blue print</i> pengembangan TIK;</p> <p>2) Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI sehingga pelayanan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Kediri belum terpadu dan sistematis sehingga belum memadai untuk dapat menjadi basis pengelolaan data dan informasi;</p> <p>3) Penerapan <i>e-Government</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis</p>	<p>1) Review dokumen masterplan pengembangan TIK yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, dan disusun <i>blue printnya</i> secara rinci, pengembangan TIK;</p> <p>2) Menyusun Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI sehingga pelayanan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Kediri dapat secara terpadu, sistematis dan memadai untuk dapat menjadi basis pengelolaan data dan informasi;</p> <p>3) Menerapkan <i>e-Government</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah</p>	<p>1) Tersusunnya masterplan pengembangan TIK</p> <p>2) Tersusunnya SOP layanan TI dan komunikasi (TIK) di Kota Kediri secara terpadu</p> <p>3) Berjalannya <i>e government</i> dalam meningkatkan pelayanan public</p> <p>4) Terbangunnya System Manajemen database terpadu dalam mengelola dan mengamankan data</p>
---	--	---

	<p>Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah sehingga pemanfaatan teknologi informasi oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemkot Kediri belum optimal;</p> <p>4) Pengelolaan keamanan prasarana perangkat keras yang ada kurang memadai sehingga masih ada kemungkinan besar terjadinya kehilangan data. Untuk mengatasinya masih perlu dikembangkan manajemen pemanfaatan server, back up dan data center;</p> <p>5) Terbatasnya kanal akses masyarakat terhadap informasi publik, sehingga ke depan perlu diperluas kanal akses melalui loket, sms, telpon, email, website, atau surat yang didukung oleh sistem informasi;</p>	<p>sehingga pemanfaatan teknologi informasi oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemkot Kediri dapat optimal;</p> <p>4) Mengelola keamanan prasarana perangkat keras melalui database secara memadai untuk menghindari terjadinya kehilangan data. perlu dikembangkan manajemen pemanfaatan server, back up dan data center;</p> <p>5) Meningkatkan kapasitas kanal akses masyarakat terhadap informasi publik, dengan memperluas kanal akses melalui loket, sms, telpon, email, website, atau surat yang didukung oleh sistem informasi;</p> <p>6) Meningkatkan kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi;</p> <p>7) Mengelola Penggiat teknologi informasi untuk diberdayakan dalam komunitas</p>	<p>5) Terbangunnya jumlah kanal dalam memobilisasi informasi melalui berbagai media</p> <p>6) Jumlah pendidikan dan pelatihan SDM TI</p> <p>7) Terbangunnya manajemen TI untuk kepentingan masyarakat</p>
--	---	---	---

	<p>6) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur teknologi informasi;</p> <p>7) Penggiat teknologi informasi belum diberdayakan dan komunitas TIK belum dikelola dengan baik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) perlu diarahkan pada program yang tepat.</p>	<p>TIK menciptakan. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) perlu diarahkan pada program yang tepat sasaran.</p>	
	<p>Permasalahan terkait dengan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Belum optimalnya pertumbuhan produktifitas Usaha Mikro sehingga daya saing Usaha Mikro rendah, karena kualitas SDM yang rendah dalam pengelolaan manajemen, kelembagaan, pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi;</p> <p>2) Belum terbinanya koperasi secara maksimal baik dalam kelembagaan,</p>	<p>1) Meningkatkan pertumbuhan produktifitas Usaha Mikro dalam mencapai daya saing Usaha Mikro, mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan manajemen, kelembagaan, pemasaran, dan</p>	<p>1) Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan peningkatan kualitas SDM dalam penguasaan TI</p> <p>2) Jumlah pendidikan dan pelatihan pengelolaan koperasi dengan mendatangkan pakar</p>

	<p>maupun usaha koperasi, sehingga koperasi sehat belum terwujud secara optimal;</p> <p>3) Masih kurangnya minat koperasi dan usaha mikro dalam memanfaatkan program penyertaan modal;</p> <p>4) Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro belum sepenuhnya terwujud.</p>	<p>penguasaan teknologi informasi;</p> <p>2) Melakukan pembinaan kepada koperasi secara maksimal baik dalam kelembagaan, maupun usaha koperasi, dengan mengundang para pakar;</p> <p>3) Menyadarkan pada masyarakat pentingnya untuk ber-koperasi dan usaha mikro dalam memanfaatkan program penyertaan modal;</p> <p>4) Mengoptimalkan Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro.</p>	<p>3) Berkembangnya koperasi di masyarakat</p> <p>4) Terbangunnya kemitraan antara koperasi dengan bank</p>
	<p>Permasalahan terkait dengan bidang penanaman modal di Kota Kediri adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Belum optimalnya pelayanan perizinan, penanaman modal dan</p>	<p>1) Mengoptimalkan pelayanan perizinan,</p>	<p>1) Terbangunnya Model pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Satu Pintu dalam</p>

	<p>prosedur perizinan karena keterbatasan infrastruktur penanaman modal;</p> <p>2) Kurang optimalnya pengelolaan dokumen dan olah data pelayanan karena belum terintegrasinya OSS dengan sistem layanan dari kementerian terkait serta dengan sistem layanan perijinan dan penanaman modal di daerah;</p> <p>3) Masih adanya regulasi dari pemerintah pusat yang belum sempurna dan tidak selaras satu dengan yang lain sehingga menyulitkan pembentukan kebijakan pemerintah daerah terkait investasi dan penanaman modal;</p> <p>4) Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan secara periodik kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dalam rangka pengkinian data investasi untuk</p>	<p>penanaman modal dan prosedur perizinan karena keterbatasan infrastruktur penanaman modal Pelayanan Satu Pintu;</p> <p>2) Mengoptimalkan pengelolaan dokumen dan olah data pelayanan secara terintegrasi dengan sistem layanan dari kementerian terkait serta dengan sistem layanan perijinan dan penanaman modal di daerah;</p> <p>3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan menyusun regulasi sesuai kebutuhan daerah dan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dalam mempermudah investasi dan penanaman modal;</p> <p>4) Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan secara periodik kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dalam rangka pengkinian data investasi untuk tujuan</p>	<p>meningkatkan pelayanan yang lebih baik</p> <p>2) Terbangunnya system manajemen database terpadu dalam meningkatkan pelayanan</p> <p>3) Terbangunnya jalinan kerjasama dengan pusat dalam mempermudah investasi dan penanaman modal</p> <p>4) Teridentifikasinya database investasi dan penanaman modal</p> <p>5) Perkembangan Jumlah investasi dan penanaman modal yang ramah lingkungan</p>
--	---	--	---

	<p>tujuan pemantauan realisasi investasi, pembentukan strategi meningkatkan investasi dan memelihara iklim investasi yang kondusif;</p> <p>5) Kurangnya minat atas investasi strategis dan realisasi investasi.</p>	<p>pemantauan realisasi investasi, pembentukan strategi meningkatkan investasi dan memelihara iklim investasi yang kondusif;</p> <p>5) Meningkatkan minat atas investasi strategis dan realisasi investasi.</p>	
	<p>Permasalahan terkait dengan kepemudaan dan olah raga antara lain adalah :</p> <p>1) Sarana dan wadah bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya seni, inovasi dan kreatifitasnya perlu ditingkatkan;</p> <p>2) Sarana dan prasarana olahraga masih perlu ditingkatkan.</p>	<p>1) Memfasilitasi sarana dan wadah bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya seni, inovasi dan kreatifitasnya yang perlu ditingkatkan;</p> <p>2) Mengembangkan sarana dan prasarana olahraga untuk mencapai prestasi olahraga.</p>	
	<p>Permasalahan Terkait dengan statistik adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Belum optimalnya layanan data dan</p>		

	<p>informasi statistik sektoral disebabkan belum terbangunnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok fungsi serta peran wali data sektoral Pemerintah Kota Kediri;</p> <p>2) Belum optimalnya sistem satu data dan pengelolaan statistik sektoral. Akar masalah antara lain :</p> <p>a. karena masih kurangnya tim teknis yang mengelola database dan belum tersosialisasi;</p> <p>b. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;</p> <p>c. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas sarana, prasarana dan infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral;</p> <p>d. Terbatasnya anggaran</p>	<p>1) Mengoptimalkan layanan data dan informasi statistik sektoral dengan meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok fungsi serta peran wali data sektoral Pemerintah Kota Kediri;</p> <p>2) Merancang sistem databased dan pengelolaan statistik sektoral. Akar masalah antara lain :</p> <p>e. Meningkatkan tim teknis yang mengelola database dan belum tersosialisasi;</p> <p>f. Meningkatkan SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;</p> <p>g. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana, prasarana dan infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral;</p>	<p>1) Tersusunnya dokumen informasi statistic sektoral dalam mendukung operasioanl tupoksi</p> <p>2) Terbangunnya system database pengelolaan data statistic per sector</p>
--	--	---	---

	penyelenggaraan statistik sektoral.	h. Mengoptimalkan anggaran penyelenggaraan statistik sektoral.	
	<p>Permasalahan terkait dengan persandian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang terbatas; 2) Pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan; belum semua komponen eselon I memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk mengirimkan informasi yang harus diamankan; belum dioptimalkan fitur <i>kriptograf</i> pada <i>palsan kriptosoft</i> untuk menyimpan dan pemusnahan data; serta belum membuat kebijakan atau menjalankan prosedur back-up dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang terbatas melalui pendidikan dan penelitian; 2) Manajemen system database, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi yang belum teramankan; mengoptimalkan semua komponen eselon I memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk mengirimkan informasi yang harus diamankan; fitur <i>kriptograf</i> pada <i>palsan kriptosoft</i> untuk menyimpan dan pemusnahan data; serta menyusun kebijakan atau menjalankan prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah SDM yang menguasai persandian 2) Terbangunnya sitem manajemen database yang terkelola dengan baik dalam mengamankan sandi data-data informasi 3) Penyebaran informasi melalui dokumen pemerintah untuk memastikan keaslian data

	<p>aman;</p> <p>3) Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>) antara lain ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, penyebaran informasi di antara masyarakat yang belum diketahui kebenarannya.</p>	<p>back-up dengan aman;</p> <p>3) Meningkatkan kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>) antara lain ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, penyebaran informasi di antara masyarakat yang belum diketahui kebenarannya.</p>	
	<p>B. Bidang Kebudayaan</p> <p>Permasalahan terkait Urusan Kebudayaan di Kota Kediri adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Masih perlu dioptimalkan integrasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan;</p>	<p>1) Mengoptimalkan integrasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan;</p>	<p>1) Terlestarikannya situs budaya dan pariwisata</p> <p>2) Jumlah penghargaan yang diberikan pada</p>

	<p>2) Masih terbatasnya apresiasi terhadap budaya lokal Kota Kediri;</p> <p>3) Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal.</p>	<p>2) Meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal Kota Kediri;</p> <p>3) Mengantisipasi pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal melalui program-program inovatif dan kreatif bagi masyarakat yang didasari iman dan akhlak.</p>	<p>prestasi budaya local</p> <p>3) Membentengi keimanan dan ketakwaan untuk menyaring masuknya budaya asing yang negative</p>
	<p>C.</p> <p>Permasalahan terkait dengan perpustakaan adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Kurangnya sarana prasarana infrasturktur Perpustakaan Umum Daerah sehingga tingkat apresiasi terhadap perpustakaan dan partisipasi pemanfaatan perpustakaan masih rendah;</p> <p>2) Gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masih bersifat</p>	<p>1) Meningkatkan fasilitas sarana prasarana infrasturktur Perpustakaan Umum Daerah dan memberikan apresiasi terhadap perpustakaan dan partisipasi pemanfaatan perpustakaan;</p> <p>2) Mensosialisasikan dan memprogramkan gerakan membaca</p>	<p>1) Persentase pembangunan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur perpustakaan umum</p> <p>2) Jumlah sosialisasi dan program gerakan membaca</p>

	<p>parsial belum terintegrasi;</p> <p>3) Kurangnya promosi layanan dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang belum maksimal sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan informasi dan bahan bacaan yang tersedia;</p> <p>4) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan;</p> <p>5) Penyelenggaraan perpustakaan masih perlu ditingkatkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.</p>	<p>dalam kegiatan literasi secara masif yang terintegrasi dan pemahaman yang utuh dan benar;</p> <p>3) Mempromosikan layanan dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara maksimal untuk mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan informasi dan bahan bacaan yang tersedia;</p> <p>4) Meningkatkan kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan;</p> <p>5) Meningkatkan kemampuan manajemen perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.</p>	<p>3) Jumlah promosi dan penyebaran informasi melalui teknologi informasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat</p> <p>4) Jumlah tenaga kepastakaan yang disekolahkan dan jumlah pelatihan</p> <p>5) Tercapainya standar operasional prosedur sesuai standar nasional</p>
	Permasalahan terkait dengan kearsipan		

	<p>adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya tenaga arsiparis dan pengelola arsip yang handal dari segi kualitas dan kuantitas; 2) Kurangnya sadarnya pemangku kepentingan dan kewenangan pentingnya arsip sehingga banyak program kearsipan yang belum dapat dilaksanakan; 3) Kurangnya fasilitas kearsipan (sarana dan prasarana) menjadikan belum optimalnya penanganan arsip perangkat daerah disimpan arsipnya di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan tenaga arsiparis dan pengelola arsip yang handal dari segi kualitas dan kuantitas; 2) Meningkatkan tingkat kesadaran pemangku kepentingan dan kewenangan pentingnya arsip untuk meningkatkan kinerja program kearsipan yang belum dapat dilaksanakan; 3) Meningkatkan fasilitas kearsipan (sarana dan prasarana) untuk mengoptimalkan penanganan arsip perangkat daerah disimpan arsipnya di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga pengarsipan 2) Tarbangunnya manajemen pemerintahan berbasis kearsipan yang handal 3) Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan dalam mendukung kebijakan pemerintah
	Permasalahan Kelautan dan Perikanan di		

	<p>Kota Kediri antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah; 2) Masih kurangnya pemahaman terhadap sistem budidaya dan pemasaran ikan yang baik; 3) Belum adanya pasar ikan yang representatif; 4) Harga jual ikan air tawar tidak stabil tergantung harga pakan, cuaca dan pemasok ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi gemar konsumsi ikan di masyarakat dalam perbaikan gizi; 2) Meningkatkan pemahaman terhadap sistem budidaya dan pemasaran ikan yang baik; 3) Belum adanya pasar ikan yang representatif; 4) Menstabilkan harga jual ikan air tawar tidak melalui manajemen pakan yang baik serta mengantisipasi harga pakan, cuaca dan pemasok ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah sosialisasi gemar konsumsi ikan 2) Budaya pemasaran yang baik dan system budidaya ikan yang baik pula. 3) Terbangunnya pasar ikan yang representative 4) Tingkat kesetabilan harga yang memadai
	<p>Permasalahan Pariwisata di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurang kepedulian lingkungan masyarakat sekitar obyek wisata untuk dapat berpartisipasi dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kepedulian lingkungan masyarakat sekitar obyek wisata untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terlestarikannya obyek dan daya Tarik wisata

	<p>pengembangan obyek wisata;</p> <p>2) Kurang seriusnya penggalian potensi dan penanganan objek wisata serta terbatasnya obyek wisata yang ada di Kota Kediri;</p> <p>3) Kurang tersedianya informasi terkait hal-hal menarik dari tempat-tempat wisata di Kota Kediri.</p>	<p>dapat berpartisipasi dalam pengembangan obyek wisata;</p> <p>2) Mengoptimalkan penggalian potensi dan penanganan objek wisata serta melakukan inovasi pengelolaan dengan terbatasnya obyek wisata yang ada di Kota Kediri;</p> <p>3) Mengadakan database terkait dengan tersedianya informasi terkait hal-hal menarik dari tempat-tempat wisata di Kota Kediri.</p>	<p>2) Tersusunnya data potensi wisata dan inovasi pengelolaan obyek wisata</p> <p>3) Terbangunnya database terkait dengan tersedianya informasi menarik dari obyek wisata di Kota Keiri</p>
	<p>Beberapa permasalahan pada urusan pertanian antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian produktif dan peternakan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan industri serta komoditas lainnya dan intensitas</p>	<p>1) Merumuskan kebijakan terkait dengan pemanfaatan luas lahan pertanian produktif dan peternakan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan</p>	<p>1) Tersusunnya rumusan kebijakan pemanfaatan luas lahan. Dan pengembangan pertanian produktif.</p>

<p>pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi;</p> <p>2) Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian serta Kurangnya penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang modern dan efisien yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian;</p> <p>3) Kesuburan tanah yang semakin berkurang karena kadar organik tanah yang rendah; akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia;</p> <p>4) Banyaknya organisme pengganggu tumbuhan yang mengakibatkan turunnya produktivitas;</p> <p>5) Rendahnya regenerasi petani dan</p>	<p>industri serta komoditas lainnya dan intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi;</p> <p>2) Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian serta meningkatkan penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang modern dan efisien dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian;</p> <p>3) Menjaga kesuburan tanah yang semakin berkurang karena kadar organik tanah yang rendah; akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia;</p> <p>4) Meneliti dan memperbaiki organisme pengganggu tumbuhan yang mengakibatkan turunnya produktivitas;</p> <p>5) Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan</p>	<p>2) Jumlah perkembangan teknologi tepat guna budidaya pertanian dalam meningkatkan produktivitas</p> <p>3) Jumlah pemakaian pupuk organik dalam mengurangi pupuk pestisida dan lainnya</p> <p>4) Ditemukannya organisme pengganggu tumbuhan yang menyebabkan turunnya produktivitas</p> <p>5) Jumlah sosialisasi dan pelatihan bagi regenerasi petani dan peternak</p> <p>6) Jumlah inovasi baru dalamantisipasi perubahan iklim</p> <p>7) Persentase pembangunan sarana rumah potong hewan</p>
--	--	---

	<p>peternak;</p> <p>6) Anomali iklim yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian dan gagal panen;</p> <p>7) Kurangnya sarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang standart untuk memenuhi kebutuhan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);</p> <p>8) Kurangnya sarana pendukung dalam kegiatan Puskeswan.</p>	<p>dalam regenerasi petani dan peternak;</p> <p>6) Mencari terobosan baru dalam mengantisipasi adanya anomali iklim yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian dan gagal panen;</p> <p>7) Mengembangkan sarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang standart untuk memenuhi kebutuhan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);</p> <p>8) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Puskeswan.</p>	<p>8) Terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana Puskeswan</p>
	<p>Permasalahan perdagangan di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam</p>	<p>1) Melakukan sosialisasi dan pemerataan penerapan standar produk dan</p>	<p>1) Jumlah sosialisasi dan penerapan ttg dan teknologi informasi dalam mendukung perdagangan</p>

<p>perdagangan;</p> <p>2) Makin besarnya persaingan baik produk maupun harga antara barang impor dan buatan dalam negeri yang jadi komoditas perdagangan;</p> <p>3) Terbatasnya kerjasama dan akses IKM dalam kegiatan ekspor impor serta terbatasnya diversifikasi tujuan pasar ekspor;</p> <p>4) Antisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak importasi;</p> <p>5) Belum optimalnya pembinaan pedagang kaki lima;</p> <p>6) Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok dan</p>	<p>teknologi informasi dalam perdagangan;</p> <p>2) Menciptakan inovasi-inovasi produk dalam mengantisipasi persaingan baik produk maupun harga antara barang impor dan buatan dalam negeri yang jadi komoditas perdagangan;</p> <p>3) Meningkatkan kerjasama dan akses IKM dalam kegiatan ekspor impor serta melakukan diversifikasi tujuan pasar ekspor;</p> <p>4) Meningkatkan manajemen Koperasi dan UMKM secara inovatif, berbasis kerakyatan dan hilirisasi produk dalam mengantisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak importasi;</p> <p>5) Memberikan solusi, penertiban dan</p>	<p>2) Jumlah inovasi yang dihasilkan untuk mengantisipasi persaingan</p> <p>3) Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti dalam perluasan pasar ekspor</p> <p>4) Jumlah pendidikan dan pelatihan pengelolaan koperasi berbasis hilirisasi multi usaha</p> <p>5) Jumlah pembinaan dan solusi yang dilakukan kepada pedagang kaki lima</p> <p>6) Jumlah pembinaan pencapaian standar produksi dan jalinan kerjasama yang ditindaklanjuti</p> <p>7) Menyusun database rantai pasok kebutuhan bahan pokok</p>
--	--	--

	<p>penting;</p> <p>7) Belum optimalnya pengawasan peredaran barang pokok dan penting; dan</p> <p>8) Kurangnya SDM (tenaga fungsional penera) untuk pelayanan metrologi legal.</p>	<p>pembinaan pedagang kaki lima;</p> <p>6) Mengembangkan jaringan pasar yang baik dan jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok dan penting;</p> <p>7) Mengoptimalkan pengawasan peredaran barang pokok dan penting; dan</p> <p>8) Meningkatkan jumlah SDM (tenaga fungsional penera) untuk pelayanan metrologi legal.</p>	<p>8) Jumlah SDM yang disekolahkan dana tau dilatih</p>
	<p>Permasalahan sektor Industri di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagai upaya untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas</p>	<p>1) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagai upaya untuk menekan biaya produksi</p>	<p>1) Jumlah pendampingan dan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kapasitas produksi</p>

	<p>produksi;</p> <p>2) Lemahnya kualitas sumber daya aparatur sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi dalam pengolahan produk, peningkatan kualitas/mutu, diversifikasi produk dan packaging;</p> <p>3) Kurangnya daya saing industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri dikarenakan kurangnya kualitas dan mutu produk IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri kreatif;</p> <p>4) Belum optimalnya pengetahuan teknologi informasi pemasaran serta lemahnya akses pemasaran terhadap hasil-hasil produksi;</p> <p>5) Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi;</p> <p>6) Kurangnya industri yang berwawasan lingkungan sehingga masih belum banyak penanganan</p>	<p>sekaligus meningkatkan kapasitas produksi;</p> <p>2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi dalam pengolahan produk, peningkatan kualitas/mutu, diversifikasi produk dan packaging;</p> <p>3) Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri diimbangi dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri kreatif;</p> <p>4) Mengoptimalkan pengetahuan teknologi informasi pemasaran sebagai alternative akses pemasaran terhadap hasil-hasil produksi;</p> <p>5) Menyusun regulasi dan kebijakan dalam memproteksi bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan yang</p>	<p>2) Jumlah SDM yang tersertifikasi dalam pengelolaan produk, kualitas dan diversifikasi produk serta packaging</p> <p>3) Jumlah IKM yang memiliki produk standar mutu dan hasil inovasi</p> <p>4) Jumlah Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan TI dalam meningkatkan akses pasar</p> <p>5) Terbitnya regulasi dan kebijakan proteksi bahan baku dan produksi</p> <p>6) Jumlah Sosialisasi dan regulasi industry yang berwawasan lingkungan</p>
--	---	---	--

	limbah industri.	biaya produksi tinggi; 6) Kurangnya industri yang berwawasan lingkungan sehingga masih belum banyak penanganan limbah industri.	
	<p>Beberapa permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah :</p> <p>1) Adanya dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan mendahului legalisasi dokumen perencanaan nasional maupun provinsi yang seharusnya dijadikan acuan. Sehingga dengan terbitnya RPJMN maupun RPJMD Provinsi yang baru perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap dokumen perencanaan lima tahunan yang telah ditetapkan;</p> <p>2) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sehingga tidak ada</p>	<p>1) Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan mendahului legalisasi dokumen perencanaan nasional maupun provinsi yang seharusnya dijadikan acuan. Sehingga dengan terbitnya RPJMN maupun RPJMD Provinsi yang baru perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap dokumen perencanaan lima tahunan yang telah ditetapkan;</p> <p>2) Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan melalui <i>feedback</i></p>	<p>1) Terjadinya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah</p> <p>2) Efektifnya pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan berdasarkan target dan realisasinya</p> <p>3) Terjadinya perencanaan pembangunan yang partisipatif mulai dari tingkat kelurahan</p>

	<p><i>feedback</i> terhadap permasalahan yang muncul terhadap perencanaan tahap berikutnya;</p> <p>3) Penentuan program dan kegiatan perlu adanya peran aktif dan konsisten perangkat daerah dalam perumusan perencanaan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;</p> <p>4) Masih kurangnya koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal serta lintas sektoral dalam perumusan rencana pembangunan daerah;</p> <p>5) Belum terintegrasi secara optimalnya pelaksanaan <i>e-database</i>, <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i>, dan <i>e-monev</i>.</p>	<p>terhadap permasalahan yang muncul terhadap perencanaan tahap berikutnya;</p> <p>3) Menentukan program dan kegiatan perlu secara aktif dan konsisten dalam perumusan perencanaan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;</p> <p>4) Meningkatkan koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal serta lintas sektoral dalam perumusan rencana pembangunan daerah;</p> <p>5) Belum terintegrasi secara optimalnya pelaksanaan <i>e-database</i>, <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i>, dan <i>e-monev</i>.</p>	<p>sampai kota</p> <p>4) Sinkronisasi dan koordinasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan yang tidak ego sektoral</p> <p>5) Terbangunnya system manajemen database secara terintegrasi dlam mendukung pelaksanaan <i>e-database</i>, <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i>, dan <i>e-monev</i>.</p>
	<p>Beberapa permasalahan bidang keuangan pembangunan adalah :</p> <p>1) Kurangnya kesadaran wajib pajak;</p>		<p>1) Jumlah sosialisasi dan efektivitas metode</p>

	<p>2) Masih perlu peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah;</p> <p>3) Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan belum teragendakan secara teratur oleh perangkat daerah.</p>	<p>1) Sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak;</p> <p>2) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah melalui pendidikan dan pelatihan;</p> <p>3) Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan melalui perencanaan agenda secara terkonsep dan teratur oleh perangkat daerah.</p>	<p>sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak</p> <p>2) Jumlah pendidikan dan pelatihan berkaitan pengelolaan aset</p> <p>3) Terlaksananya agenda-agenda pembangunan sesuai perencanaan</p>
	<p>Beberapa permasalahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah :</p> <p>1) Belum adanya instrumen yang tepat untuk mengukur kinerja pegawai guna menentukan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang jelas;</p> <p>2) Perencanaan manajemen kepegawaian perlu ditingkatkan;</p> <p>3) Belum optimalnya pengembangan kompetensi PNS Kota Kediri sehingga</p>	<p>1) Mengembangkan instrumen yang tepat untuk mengukur kinerja pegawai guna menentukan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang jelas;</p> <p>2) Meningkatkan perencanaan manajemen kepegawaian secara terstruktur dan adil dengan kriteria penilaian kinerja</p>	<p>1) Terbangunnya instrument penilaian kinerja organisasi pemerintah yang obyektif dan mampu meningkatkan motivasi dan berkinerja baik</p> <p>2) Tersusunnya perencanaan manajemen kepegawaian, tupoksi dengan kriteria penghargaan yang jelas</p> <p>3) Tercapainya standar kompetensi PNS</p>

	<p>belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;</p> <p>4) Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal.</p>	<p>yang jelas.</p> <p>3) Mengoptimalkan pengembangan kompetensi PNS Kota Kediri sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;</p> <p>4) Melakukan Reformasi birokrasi yang terealisasi secara optimal.</p>	<p>4) Terlaksananya target reformasi birokrasi dalam pencapaian kinerja organisasi</p>
	<p>Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu :</p> <p>1) Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;</p> <p>2) Persentase hasil riset, penelitian, pengembangan dan IPTEK yang diterapkan dan dimanfaatkan belum</p>	<p>1) Menerapkan Perber Kemenristek dan Kemendagri No 3 dan No 36 2012 melalui Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara optimal;</p> <p>2) Meningkatkan persentase hasil riset, penelitian, pengembangan dan IPTEK yang diterapkan dan dimanfaatkan</p>	<p>1) Tersusunnya Roadmap Penguatan SIDa yang inovatif dan terintegrasi</p> <p>2) Persentase hasil riset yang berkualitas dalam menunjang pembangunan</p>

	optimal.	secara optimal.	
	<p>Permasalahan terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, pengawasan, Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi SAKIP pada beberapa perangkat daerah masih perlu dioptimalkan. 2) Kurangnya pengendalian dalam pelayanan publik kepada masyarakat terlihat dari pelayanan publik yang masih memiliki nilai C dalam Indeks Kepuasan Masyarakat; 3) Belum semua kesepakatan kerjasama ditindak lanjuti secara optimal oleh perangkat daerah terkait; 4) Belum optimalnya implementasi SPM dalam penyelenggaraan urusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi SAKIP pada beberapa perangkat daerah secara optimal. 2) Meningkatkan pengendalian dalam pelayanan publik kepada masyarakat untuk meningkatkan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat; 3) Menindaklanjuti semua kesepakatan kerjasama ditindak lanjuti secara optimal oleh perangkat daerah terkait; 4) Mengoptimalkan implementasi SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 5) Meningkatkan ketaatan Obyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan laporan SAKIP yang memadai dan berkinerja 2) Tercapainya indeks kepuasan masyarakat 3) Jumlah MOU yang ditindaklanjuti 4) Dipatuhinya SPM yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan 5) Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dalam mencapai kinerja organisasi 6) Terjadinya perbaikan melalui sosialisasi dan pendampingan dalam memahami obyek

	<p>pemerintahan daerah;</p> <p>5) Masih kurangnya ketaatan Obyek Pemeriksaan (Obrik) terhadap aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun kinerja, sehingga selama ini masih sering terjadi adanya temuan yang berulang;</p> <p>6) Terlalu lamanya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan daya tanggap obyek pemeriksaan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;</p> <p>7) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat seringkali mengalami keterlambatan penanganan dikarenakan masih sering terjadi kendala dalam menghadirkan pihak-</p>	<p>Pemeriksaan (Obrik) terhadap aturan-aturan yang berlaku, berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun kinerja, untuk menekan adanya temuan yang berulang;</p> <p>6) Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan daya tanggap obyek pemeriksaan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;</p> <p>7) Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang sering mengalami keterlambatan penanganan disebabkan sering terjadi kendala dalam menghadirkan pihak-pihak eksternal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan lambatnya penanganan</p>	<p>pemeriksaan dan pengawasan</p> <p>7) Jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan</p> <p>8) Berjalannya secara optimal manajemen organisasi pemerintahan</p> <p>9) Jumlah BUMD yang sehat dengan tatakelola yang baik</p> <p>10) Jumlah BUMD yang berkinerja baik</p>
--	---	--	---

	<p>pihak eksternal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan lambatnya penanganan pengaduan tersebut;</p> <p>8) Disiplin aparatur yang kurang baik, budaya kerja yang terjalin belum optimal, koordinasi di lingkungan staf masih terhambat, kurang optimal memanfaatkan peluang, adanya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja aparat serta koordinasi antar instansi sering terlambat;</p> <p>9) Belum efektifnya BUMD melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</p> <p>10) Ketidakstabilan Peningkatan Laba Bersih BUMD;</p> <p>11) Masih banyaknya lembaga keagamaan/sosial yang memerlukan</p>	<p>pengaduan tersebut;</p> <p>8) Meningkatkan kedisiplinan aparatur, budaya kerja yang optimal, koordinasi di lingkungan staf, memanfaatkan peluang, adanya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja aparat serta koordinasi antar instansi;</p> <p>9) Meningkatkan kinerja BUMD yang efektif dengan melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</p> <p>10) Meningkatkan manajemen yang profesional dalam meningkatkan Laba Bersih BUMD;</p> <p>11) Mengembangkan lembaga keagamaan/sosial yang memerlukan bantuan;</p> <p>12) Memfasilitasi kegiatan perorangan/kelompok masyarakat dibidang keagamaan, sosial, budaya yang memerlukan dukungan pemerintah;</p>	<p>11) Jumlah lembaga keagamaan dan social yang dibantu</p> <p>12) Jumlah fasilitasi keagamaan dan kegiatan social bagi masyarakat</p>
--	---	---	--

	<p>bantuan;</p> <p>12) Masih banyaknya kegiatan perorangan/kelompok masyarakat dibidang keagamaan, sosial, budaya yang memerlukan dukungan pemerintah;</p>		
	<p>Pada Aspek Daya Saing Daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tindak pidana kriminalitas masih perlu diturunkan; 2. Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI) di Kota Kediri perlu ditekan. <p>Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013, Kota Kediri dikategorikan sebagai daerah dengan IRDI yang sedang untuk bencana gempa dan banjir. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Kota Kediri untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif dalam menekan Jumlah tindak pidana kriminalitas; 4. Memperbaiki Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI) di Kota Kediri perlu ditekan. <p>Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013, Kota Kediri dikategorikan sebagai daerah dengan IRDI yang sedang untuk bencana gempa dan banjir. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3) Menurunnya angka kriminalitas 4) Menurunnya indeks rasio bencana

	maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.	masyarakat Kota Kediri untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.	
1	A. Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
2	Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata	-Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
3	Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur - Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi - Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian - Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur 	Terbangunnya SDM aparatur (ASN) Pemerintahan yang profesional

4	<p>Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Pemerintah Kota Kediri perlu membangun, mengembangkan dan mengoptimalkan <i>e-Government</i> dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir diberbagai urusan dan layanan menuju Kota Kediri <i>SMART CITY</i>. 	<p>Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan berbasis Teknologi informasi mendukung Kota Kediri Smart City</p>
	<p>Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penataan sistem manajemen SDM aparatur.</p>	<p>a) Peningkatan kepatuhan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota</p>	<p>Terbangunnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah</p>

		<p><i>Kediri dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN sesuai peraturan yang berlaku;</i></p> <p>b) Standarisasi penilaian dan evaluasi kinerja PNS Kota Kediri belum terstandar dan belum berbasis online sehingga tidak memungkinkan adanya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang baik;</p> <p>c) Penyusunan perencanaan/pemetaan jabatan PNS Kota Kediri, sehingga rekrutmen ASN dapat berdasarkan pada kebutuhan formasi jabatan dan standar</p>	
--	--	---	--

		kompetensi;	
5	Akses pendidikan yang kurang merata kalangan dimasyarakat dan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan pendidikan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.	Terciptanya pemerataan akses pendidikan dan standar manajemen yang sama, serta meningkatnya kualitas pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan
6	Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal	Peningkatan pelayanan kesehatan dimulai dari peningkatan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia (tenaga medis dan paramedis) dan tata kelola sistem pelayanan. Beberapa kegiatan pelayanan kesehatan antara lain: promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.	Masyarakat memiliki kualitas hidup yang sehat dan produktifitas yang tinggi. Angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Kota Kediri pada tahun 2018 tercapai sebesar 46,70 per 100.000 kelahiran hidup, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 93,17 per 100.000 kelahiran hidup. AKI tahun 2018 berhasil menurun setelah beberapa tahun terakhir AKI tidak mencapai target bahkan capaiannya dibawah provinsi.
7	Akses pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional di Kota Kediri belum optimal	Perlu menerapkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh warga Kota Kediri.	Dengan berbagai upaya tersebut, maka diharapkan indeks pembangunan manusia di Kota Kediri dapat meningkat menjadi 3 besar di Jawa Timur.
8	Masih terjadinya kesenjangan sosial, dan kondisi	Pemerintah Kota Kediri melakukan upaya serius untuk	Menurunnya angka kemiskinan di Kota Kediri.

	<p>sebagian masyarakat yang menghadapi tekanan kemiskinan, pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap untuk bersaing di era global yang makin kompetitif.</p>	<p>menangani masalah kemiskinan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui beberapa program kegiatan <i>pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment</i>.</p> <p>Selain itu, upaya mengatasi kemiskinan juga terkait dengan pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Kondisi yang terjadi selama tiga tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan trend penurunan</p>
9	<p>Ketidakserasian pertumbuhan antar wilayah serta tersentralisasinya aktivitas di pusat kawasan perdagangan, jasa dan pelayanan publik, mengakibatkan terjadinya kemacetan di beberapa titik simpul jalan</p>	<p>Melakukan revitalisasi dan penambahan jembatan dan prasarana jalan yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik kota serta mempercepat pertumbuhan wilayah.</p>	<p>Terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah dalam mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi</p>
10	<p>Masalah infrastruktur terutama jalan dan jembatan antara lain pengalihan jalur bagi kendaraan-kendaraan angkutan berat yang saat ini masih melintas tengah Kota Kediri, segera direalisasikannya tol Kertosono-Kediri yang exit tol tidak jauh dari batas kota, pembangunan bandara kediri yang letaknya dekat dengan batas kota</p>	<p>Melakukan alternatif pembangunan ruas jalan baru dan segera meerealisasikan pembangunan jalan lingkar barat dan timur. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Ngronggo, Pembangunan Jembatan Mrican dan Kelurahan Banjarmlati serta pengembangan jalan lingkar dapat menjadi alternatif untuk mengurai simpul kemacetan yang akan terjadi.</p> <p>pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan umur pakai panjang, pengendalian pemakaian trotoar oleh PKL, perkerasan jalan dengan teknologi resapan,</p>	<p>Transportasi jalan dapat mengurai tingkat kemacetan yang merata</p>

		revitalisasi sumber air, pembangunan dan rehabilitasi saluran irigai, pembuatan dan peningkatan drainase, gorong-gorong dan saluran pembuangan air limbah serta peningkatan infrastruktur hijau dengan menyediakan jalur pejalan kaki (pedestrian), jalur sepeda dan jalur hijau.	
11	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanganan masalah bencana yang sering terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti banjir dan kebakaran; 2) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya; 3) Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana; 4) Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana; 5) Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum 	<p>Aspek pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait secara terintegrasi, terpadu, menyeluruh dan simultan mulai dari penyusunan peraturan, implementasinya secara teknis, hingga pengawasan dan evaluasi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kota Kediri sebagai kota yang layak huni bagi masyarakatnya maka akan dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pembangunan termasuk berbagai aktivitas kegiatan perekonomian dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan 	<p>Aspek ketersediaan air bersih, bencana banjir, ketersediaan ruang terbuka hijau dapat diperoleh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Terjadinya pembangunan yang terintegrasi dalam peningkatan aspek ketangguhan terhadap bencana (<i>resilience</i>) untuk meningkatkan pengurangan resiko bencana yang komprehensif.</p> <p>Berkembangnya konsep pembangunan untuk mengurangi dampak bencana terhadap kota, seperti perlindungan infrastruktur dan pengendalian tata guna lahan, serta perlindungan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dianggap sangat penting.</p>

	menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan.	<p>kelestarian lingkungan;</p> <p>2) Menjaga ekosistem dengan meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman-taman kota hingga 30% dari luasan kota;</p> <p>3) Menyediakan infrastruktur sanitasi kota yang memadai;</p> <p>4) Peningkatan kesadaran dan budaya masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat dan sadar lingkungan untuk kehidupan generasi yang akan datang.</p>	
11	kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perekonomian, karena belum adanya efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi, serta masih sangat tergantung pada perkembangan aktivitas PT. Gudang Garam. Pada kisaran 80% perekonomian Kota Kediri masih tergantung pada aktivitas PT. Gudang Garam.	Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan berfluktuasi memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.	<p>Perekonomian perdagangan dan jasa mengalami stabil dan berkembang</p> <p>Pertumbuhan ekonomi non industry hasil tembakau meningkat.</p> <p>Sektor industry meningkat bertumbuhnya ekonomi kerakyata</p> <p>Diharapkan pengendalian laju inflasi akan mampu menjaga serta meningkatkan</p>

	<p>Tahun 2017, Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 79,71% pada pembentukan PRDB Kota Kediri dengan kecenderungan perlambatan laju pertumbuhan sebesar 0,47% per tahun.</p> <p>Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar kedua sebesar 10,40% di tahun 2017 dengan laju percepatan pertumbuhan sebesar 1,74 % per tahun.</p> <p>Struktur perekonomian Kota Kediri sangat tergantung pada pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri memang dapat dicapai melalui peningkatan dan pengembangan peran, aktivitas, dan efisiensi sektor industri, perdagangan dan jasa.</p>		<p>pertumbuhan ekonomi Kota Kediri daerah pada masa mendatang.</p>
--	--	--	--

12	Terdapatnya permasalahan dalam pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu masih rendahnya kapasitas UMK Kota Kediri dalam era persaingan global.	<p>Mempermudah dan menyederhanakan perijinan, dari 153 perijinan pada tahun 2015 telah disederhanakan menjadi tinggal 56 perijinan.</p> <p>Melakukan <i>rebranding</i> sebagai kota perdagangan dan jasa.</p> <p>Mendorong investor untuk tertarik masuk sehingga modal dan uang akan berputar di Kota Kediri.</p> <p>Meningkatkan kemampuan pelaku industri mikro, kecil dan menengah, tidak lagi sekedar diberi pelatihan-pelatihan tetapi juga diajak mengikuti pameran-pameran besar seperti <i>inacraft</i>, pameran terbesar kerajinan di Indonesia.</p> <p>Pengembangan kerajinan batik dan tenun didatangkan desainer-desainer terkemuka lalu produknya diikutkan dalam <i>Jakarta fashion weeks</i>. Dalam forum seperti itu para pelaku UMK akan bisa belajar dari para kompetitornya sehingga tergerak untuk lebih maju lagi.</p>	<p>Peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor UMKM</p> <p>Bertumbuhnya ekonomi kerakyatan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Daya saing UMKM Kota Kediri meningkat diikuti profesionalisme tenaga kerja</p>
	Sebagai daerah yang tidak kaya akan sumber daya alam, kegiatan usaha produksi yang berbasis sumber daya alam di Kota Kediri kurang berkembang.	1) Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan	1) Meningkatnya pelayanan public dari sector usaha

		<p>mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (<i>public services</i>) dan mencari keuntungan (<i>provit motive</i>);</p> <p>2) Meningkatkan perekonomian dari sector industry olahan, perdagangan dan jasa, yang bias memanfaatkan pasokan bahan baku dari Kabupaten sekitarnya.</p> <p>3) Mendatangkan investor untuk mendukung pengembangan sector industry olahan, kuliner, perdagangan dan pariwisata.</p>	<p>2) Berkembangnya sector industry olahan non tembakau yang dapat menopang perekonomian rakyat</p> <p>3) Masuknya investor yang bergerak disektor industry olahan makanan, perdagangan dan jasa, serta kerajinan rakyat.</p>
	<p>Permasalahan terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah sebagai berikut :</p> <p>6) Masih besarnya ketergantungan masyarakat kelurahan terhadap bantuan pemerintah, khususnya dalam upaya menggalang keswadayaan</p>	<p>1. Mengurangi tingkat ketergantungan bantuan dari pusat dalam kswadayaan masyarakat.</p> <p>2. Mengadakan pelatihan-pelatihan pengembangan manajemen kelurahan dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM</p>	

	<p>masyarakat;</p> <p>7) Manajemen di tingkat pemerintah kelurahan masih perlu ditingkatkan;</p> <p>8) Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan teknologi tepat guna dalam proses pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat kelurahan;</p> <p>9) Belum tercatatnya secara akurat nilai swadaya masyarakat dalam mendukung penyertaan program-program pemberdayaan masyarakat;</p> <p>10) Belum optimalnya pengelolaan unit keuangan (UPKU) di kelurahan untuk dapat menjadi Badan Usaha Milik Masyarakat Kelurahan;</p>	<p>kelurahan</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang dalam berproduksi yang dikaitkan dengan permintaan pasar.</p> <p>4. Penertiban dokumentasi administrasi dalam mendukung pengambilan kebijakan bagi manajemen.</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan</p>	
--	---	--	--

BAB III

KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Dalam bagian bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Visi dan Misi dalam pembangunan Kota Kediri tahun 2020-2024 yaitu: “**Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni**” dalam konteks pengembangan SIDA relevan dengan utamanya misi ke-3 Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan.

Dalam mencapai misi tersebut, perlu dioperasionalkan kedalam rumusan kebijakan umum dan program-program secara konsisten dan spesifik menggunakan kerangka konsep pembangunan yang memadai dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah lima tahunan dan jangka pendek tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD. Sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD/SKPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Penguatan SIDA dengan tema “Klaster IKM/UMKM, Perdagangan Berbasis Ekowisata” dengan klaster unggulan yaitu: dengan produk unggulan Industri Olahan, Pertanian dan Kerajinan Rakyat pada kawasan Kecamatan Kota, Pesantren dan Kecamatan Jogoroto sesuai dengan potensi kewilayahan masing-masing, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh *stakeholder*. Guna mengoperasionalkan berbagai klaster unggulan yang diangkat guna mendukung dan menyamakan persepsi istilah berikut ini dikemukakan beberapa konsep/ definisi antara lain sebagai berikut:

a. IKM/UMKM

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Adapun definisi industri kecil secara umum adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.^[1] Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan minimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah.^[2] Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, berpendapat bahwa IKM yang mendominasi populasi industri di dalam negeri berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini dikarenakan pertumbuhan IKM yang relatif stabil. Tidak hanya itu,

kemampuan IKM untuk menyerap tenaga kerja sangat tinggi, mencapai 97,22% pada awal tahun 2016.

b. Agroindustri Olahan Makanan dan Minuman:

Agroindustri merupakan bagian penting dari pangan dan mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi. Agroindustri harus mampu berperan dalam peningkatan nilai tambah (utility), penyerapan dan produktivitas kelembagaan tenaga kerja, dan memperluas jangkauan kelembagaan pemasaran. Menurut Roosganda Elizabeth (2010) terdapat empat elemen kunci dalam pengembangan agroindustri yaitu: 1) aglomerasi perusahaan (cluster); 2) peningkatan nilai tambah (value added) dan mata rantai nilai pasok (value chain); 3) jaringan pemasok dan pelanggan; dan 4) jaringan infrastruktur ekonomi fisik dan nonfisik (Supriyati et al. 2006). Transformasi kelembagaan tradisional yang berkaitan dengan pengembangan agroindustri di pedesaan adalah dalam hal tenaga kerja (SDM) dan pemasaran, terutama dalam penerapan teknologi inovatif pascapanen, mutlak diperlukan untuk terwujudnya agroindustri berbasis produk pertanian.

Kota Kediri terkenal sebagai Kota Kuliner dengan Tahu Takwa salah sebagai produk unggulan. Terdapat banyak industri olahan makanan aneka keripik, tahu takwa, jajan pasar dan aneka masakan restoran.

c. **Perdagangan**

Perdagangan atau **perniagaan** adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kejadiannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap pelaku agribisnis dituntut meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Daya saing produk dapat ditelaah dari berbagai aspek; mulai dari mutu produk yang lebih baik, harga jual yang lebih rendah, desain dan kemasan yang lebih menarik, sampai pada pelayanan purna jual yang lebih terjamin. Inovasi secara hilirisasi memungkinkan pelaku agribisnis meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Melalui inovasi akan terjadi perbaikan-perbaikan dalam proses

produksi, baik melalui adopsi teknologi maju diluar perusahaan, maupun melalui penelitian dan pengembangan dalam perusahaan sendiri. Hal demikian dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik berupa peningkatan kualitas produk, peningkatan desain produk, atau peningkatan efisiensi produksi.

Setiap inovasi produk harus selalu diarahkan kepada kebutuhan pelanggan. Inovasi tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan dapat mengakibatkan kegagalan dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Sembilan sistem inovasi sesuai dengan segmentasi sistem agribisnis, yaitu: (a) pengelolaan sumber daya, (b) sistem produksi, (c) pasca panen/pengolahan, (d) logistik/distribusi, (e) pengelolaan lingkungan, (f) pemasaran hasil, (g) inovasi kelembagaan, (h) dukungan manajemen, dan (i) blok program.

b) Klaster Kerajinan Rakyat:

Kerajinan Rakyat adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (kerajinan tangan) yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam membuat barang-barang.

Kerajinan terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bahan-bahan alam seperti: serat, bambu, rotan, kayu.
2. Kerajinan bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan seperti: plastik, gips, sabun, lilin, logam, produk songkok, sarung dan sajadah dll.

Kerajinan tangan juga bisa terbuat dari barang-barang bekas seperti botol bekas, kardus, dan plastik makanan.

Sebuah inovasi baru dibutuhkan militansi usaha yang gigih dan inovatif serta memiliki Jiwa kewirausahaan dalam pengembangan kerajinan rakyat. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai proses kemanusiaan (human process) yang berkaitan dengan adanya kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu dapat terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba ataupun nilai untuk jangka waktu yang lama.

c. Pengembangan Ekowisata:

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas: **Ekowisata** atau **ekoturisme** merupakan salah satu kegiatan [pariwisata](#) yang berwawasan [lingkungan](#) dengan mengutamakan aspek [konservasi alam](#), aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Secara umum objek kegiatan ekowisata tidak jauh

berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, namun memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya.

Jenis kegiatan wisata yang dikembangkan di Kota Kediri meliputi kegiatan sektor wisata :

- Wisata religi
- Wisata kesenian dan budaya
- Wisata minat khusus Selo Mangleng
- Wisata belanja
- Wisata kerajinan
- Wisata alam Sungai Brantas
- Wisata buatan

Kegiatan pariwisata yang direncanakan menjadi andalan adalah wisata religi dan wisata air Sungai Brantas serta wisata kuliner. Pengembangan kegiatan wisata

Adapun uraian arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dapat menunjang penguatan SIDA adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai Kota Kediri

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pilar 1 : Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Terbitnya perda atau peraturan lain yang mendukung untuk operasionalisasi penguatan SIDA Kota Kediri;
			Terbangunnya basis data/ indikator penting inovasi dan mudah diakses
			Terbangunnya lembaga pendidikan menengah kejuruan unggulan dan pendidikan tinggi yang berkualitas
			Terbangunnya sistem perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan kompetitif
			Terbangunnya Ruang Publik Kreatif (RPK) sebagai sarana untuk meningkatkan kreatifitas warga interaksi antar masyarakat dan fasilitasi integrasi SIDA, dan memenuhi ruang terbuka hijau
			Meningkatnya alokasi anggaran iptekin dari APBD
		Elemen 2:	Berfungsinya kelembagaan

		Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/ atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	<p>penguatan sistem inovasi Kota Kediri</p> <p>Kualitas SDM iptekin meningkat</p> <p>Daya serap masyarakat terhadap iptekin meningkat</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p> <p>Elemen 4: Budaya inovasi</p> <p>Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah</p> <p>Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global</p>	<p>Kaidah-kaidah PSIDa sudah tersosialisasi di seluruh aktor di daerah</p> <p>Berkembangnya aktivitas masyarakat di RPK</p> <p>Berperannya posyantek dan wartek dalam mendifusikan iptekin dan hasil litbangyasa</p> <p>Berjalannya apresiasi terhadap kegiatan inovatif dan kreatif</p> <p>Berperannya relawan berinovasi, dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah</p> <p>Munculnya budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan pendidikan menengah</p> <p>Berjalannya secara optimal kerjasama antar daerah sekitar Kota Kediri bagi pembangunan daerah</p> <p>Berjalannya secara optimal kerjasama antar pusat dengan Kota Kediri bagi pembangunan daerah</p> <p>Meningkatnya kesetaraan gender</p> <p>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan</p> <p>Meningkatnya kesadaran HKI di masyarakat</p> <p>Tersedianya fasilitas untuk masyarakat di ruang publik dan kantor pemerintah berbasis gender</p>
2	Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<p>Berfungsinya kelembagaan pengelola pengembangan klaster pada kawasan Sentra Industri Mamin & Kerajinan Rakyat Berbasis Eko Wisata</p> <p>Terbitnya Peraturan Kota</p>

			<p>Kediri bagi pengembangan kluster industri prioritas daerah</p> <p>Terlaksananya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) dan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (Ripow) Kota Kediri;</p>
			<p>Meningkatnya kualitas akses jalan darat dan sarana angkutan umum menuju objek wisata pada kawasan Sentra IKM/UMKM dan Perdagangan serta Kerajinan Rakyat Berbasis Ekowisata</p> <p>Berkembangnya operator wisata pada kawasan Sentra Industri dan Pusat-Pusat Perdagangan & Kerajinan Rakyat Berbasis Industri dan Ekowisata yang profesional;</p> <p>Fasilitas akomodasi, kesehatan, kuliner dan <i>merchandise</i> telah berkembang dan memenuhi standar fasilitas wisata nasional maupun internasional</p> <p>Tersedianya pusat informasi kepariwisataan Kota Kediri yang profesional</p> <p>Meningkatnya pelaksanaan dari Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Industri olahan makanan dan minuman</p> <p>Berkembangnya aktivitas ekonomi integrasi kluster IKM dan Perdagangan didukung kerajinan rakyat berbasis ekowisata.</p>
		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) / atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbang-yasa) serta kemampuan absorpsi industri, khusus-nya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>Tersedianya pasokan iptekin di secara terintegrasi pada kluster IKM/UMKM dan Perdagangan didukung kerajinan rakyat berbasis ekowisata</p>
			<p>Tersedianya pasokan iptekin Industri Kecil Menengah/UMKM dan</p>

			kerajinan rakyat
			Meningkatnya daya serap iptekin pelaku Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat
			Tersedianya pasokan iptekin bagi Industri Kecil Menengah/UMKM didukung kerajinan rakyat Berbasis Ekowisata
			Meningkatnya daya serap iptekin pelaku industri pariwisata pada kawasan Sentra IKM & Kerajinan Rakyat Berbasis Ekowisata
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Optimalnya interaksi antara para pemangku kepentingan di IKM dan Perdagangan serta kerajinan rakyat dengan pemasok iptekin
			Optimalnya interaksi antara para pemangku kepentingan di sentra IKM dan pariwisata dengan pemasok iptekin
		Elemen 4: Budaya inovasi	Berkembangnya budaya inovasi di industri IKM/UMKM dan kerajinan rakyat
			Berkembangnya budaya inovasi di industri pariwisata
			Harmonisnya hubungan sosial pelaku bisnis dan masyarakat sekitar
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Menguatnya rantai nilai di kluster IKM dan perdagangan didukung kerajinan rakyat (indikator: produktivitas kluster IKM dan Perdagangan dan kerajinan rakyat meningkat);

			Menguatnya rantai nilai di kluster Industri Kecil Menengah/UMKM dan Perdagangan didukung Kerajinan Rakyat Berbasis Ekowisata
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Aktifitas kluster Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat telah memenuhi kaidah kelestarian lingkungan;
			Aktifitas kluster Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis Ekowisata berstandar

			internasional.
3	Pilar 3: Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Perizinan bagi pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis industri dan Ekowisata di Kota Kediri
			Terbit Perbup tentang Kawasan Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis Ekowisata Kota Kediri
			Tersusunnya Zo-ningcode/ <i>regulation</i> dan AMDAL zonasi
			Selesainya penyusunan DED kawasan dan dimulainya ground breaking, dimulainya pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan; beroperasinya kawasan pendidikan dan industri
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi	Tersedianya Pusat Litbangyasa
			Terbangunnya Perguruan Tinggi di Kawasan Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis Ekowisata
			Terbangunnya pengguna iptekin di Kawasan Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis Ekowisata
		industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Meningkatnya jumlah HKI terdaftar (per 10.000 penduduk)
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Terbentuknya lembaga pengelola kawasan Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis Ekowisata;
			Terbangunnya pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i> di Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis

			Ekowisata; Terbangunnya jaringan yang menghubungkan antara pusat inovasi di Kawasan Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis Ekowisata dengan simpul-simpul pelayanan teknologi di kecamatan dan kelurahan serta dengan simpul iptek di luar Kota Kediri.
		Elemen 4: Budaya inovasi	Berkembangnya budaya berjejaring antara aktor inovasi
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Terbangunnya kerjasama antar Kawasan agribisnis perikanan & Kerajinan Rakyat Berbasis Industri dan Wisata Kota Kediri dengan pelaku asosiasi di bidang agribisnis dan asosiasi pengembangan kerajinan rakyat ditingkat lokal, nasional maupun internasional;
			Terbangunnya sinergitas antara Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Kota Kediri dengan pusat-pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) di Koridor Ekonomi Jatim dan Koridor Ekonomi lain
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Meningkatnya produk bersertifikasi Meningkatnya jumlah pertemuan skala internasional; Meningkatnya kesadaran HKI.
4	Pilar 4: Penguatan Teknopreneur	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Tersedianya bantuan fasilitasi KUMKM yang fokus pada Industri Kecil Menengah/UMKM dan kerajinan rakyat Berbasis Industri dan Ekowisata Tersedianya skema pembiayaan bagi pengembangan bisnis inovatif ; Adanya insentif dari Pemda untuk pengembangan wirausaha berbasis inovasi (enteprenuer)
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu	Terbentuknya kelembagaan pusat inovasi Meningkatnya kapasitas

		pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/ atau penelitian, pengembangan dan perekayasa-an (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	absorpsi iptekin UMKM; Meningkatnya Inisiatif berwirausaha berbasis iptekin dari kalangan pemuda.
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Meningkatnya jumlah UKM inovatif di Kota Kediri. Berkembangnya kerjasama antara penghasil teknologi dan UMKM
		Elemen 4: Budaya inovasi	Berkembangnya budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan pendidikan tinggi
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Berkembangnya jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri prioritas

		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Produk bisnis inovatif terstandar, baik nasional maupun internasional; Terjalinnnya kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif
5	Pilar 5: Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Tersedianya rencana induk dan pedoman/ panduan <i>green innovation development (GID)</i> mencakup energi bersih, air bersih, transportasi, informasi & komunikasi dan lingkungan
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/ atau penelitian, pengembangan dan perekaya-saan (litbang-yasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Terbangunnya kelembagaan yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development (GID)</i> di Kota Kediri Meningkatnya pasokan iptekin air bersih, telekomunikasi dan informasi, energi, transportasi, dan lingkungan Meningkatnya kapasitas absorpsi masyarakat terhadap iptekin air bersih, telekomunikasi dan informasi,

			energi, transportasi, dan lingkungan air bersih
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Terbangunnya interaksi pengembangan <i>green innovation development (GID)</i>
			Meningkatnya kerjasama litbangyasa energi, air bersih, informasi dan komunikasi, transportasi dan lingkungan
		Elemen 4: Budaya inovasi	Meningkatnya komunitas GID
			Meningkatnya penerapan GID dalam kurikulum pendidikan
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Terbitnya kebijakan-kebijakan daerah dalam pembangunan hijau (energi, air bersih, transportasi, informasi & komunikasi, dan lingkungan)
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Terbangunnya kerjasama internasional pembangunan hijau infrastruktur (energi, air bersih, transportasi, informasi & komunikasi, dan lingkungan)

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN SIDA

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan melalui penguatan sistem inovasi Kota Kediri, diperlukan adanya strategi dan arah kebijakan yang tepat. Strategi yang digunakan untuk penguatan SIDA dikembangkan dari pilar-pilar strategis penguatan sistem inovasi sesuai dengan konteks sasaran. Sedangkan arah kebijakan, yang bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, menggunakan enam elemen Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) sesuai dengan konteks sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

4.1. Visi

Visi Kota Kediri dalam periode Tahun 2020-2024, adalah “**Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni**”. Secara filosofis, visi Kota Kediri tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Kota Kediri Unggul

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

Kota Kediri Makmur

Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai.

Kota Kediri Harmoni

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

4.2. Misi

Visi “**Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni**”, secara substansi dijabarkan didalam 4 misi, sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasikan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegras yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Misi 2

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3

Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi 4

Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat merwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

4.3. Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Strategi yang digunakan untuk penguatan SIDa dikembangkan dari pilar-pilar strategis penguatan sistem inovasi yang terdiri atas:

1. Prakarsa Penguatan SIDa.

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, dalam hal ini penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional serta

untuk membangun ekosistem bagi berkembangnya inovasi dan bisnis sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Dalam hal ini, salah satu Prakarsa Penguatan SIDA melalui penentuan zonasi ekonomi sosial budaya sebagai dasar penentuan kerangka kutup-kutup pertumbuhan dan kawasan aglomerasi yang diangkat dalam mengembangkan SIDA selanjutnya akan dikohesikan dengan klaster industri.

2. Pengembangan Klaster Industri.

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi terbaik sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing industri sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Adapun klaster industri tematik yang ditetapkan bagi pengembangan SIDA Kota Kediri adalah “IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata”

3. Pengembangan Jaringan Inovasi.

Strategi ini sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasi aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

4. Pengembangan Teknopreneur

Strategi ini sebagai wahana modernisasi teknologi, bisnis/ekonomi, dan sosial, serta pengembangan budaya sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

5. Pengembangan Pilar-Pilar Kebijakan Tematik.

Strategi ini bertujuan memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual sesuai potensi kewilayahan dan sasaran yang akan dicapai.

4.4. Arah Kebijakan Penguatan SIDA

Arah kebijakan penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan SIDA. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan dibuat dalam beberapa tahap (setiap tahun). Arah kebijakan penguatan SIDA menggunakan 6 (enam) elemen Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI):

1. Mengembangkan kerangka umum kebijakan inovasi dan bisnis;
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/ atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi IPTEKIN oleh industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik terbaik (good/best practice), dan/atau hasil litbangyasa;
4. Membangun budaya inovasi di daerah;
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan inovasi di daerah;

6. Meningkatnya penyelarasan dengan perkembangan global.

Tabel 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kota Kediri

VISI : “Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni”.			
Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
Misi 1			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi			
Tujuan 1: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi.	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 4. Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian 6. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur	2. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
		7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah 8. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP, meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern 10. Mengoptimalkan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

VISI : “Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni”.			
Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		11. Memperluas zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 12. Melaksanakan evaluasi pembangunan daerah secara periodik dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran pembangunan daerah	
	2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	13. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) 14. Meningkatkan kinerja BUMD menuju tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) 15. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendapatan	4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	16. Meningkatkan kualitas manajemen dan inovasi layanan public 17. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi layanan publik 18. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik berbasis kartu	5. Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau
	4. Meningkatnya penerapan <i>smart city</i>	19. Membangun dan mengimplementasi 6 pilar <i>smart city</i> (<i>smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart social, dan smart environment</i>) secara berkelanjutan	6. Peningkatan penerapan <i>smart city</i>

Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya			
Tujuan 2:	5. Meningkatnya akses dan kualitas	20. Meningkatkan kualitas pendidikan	7. Peningkatan kualitas layanan

Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya	pendidikan masyarakat	<p>melalui standarisasi pelayanan pendidikan dasar yang mengacu pada standar pendidikan nasional</p> <p>21. Meningkatkan akses pendidikan melalui pendidikan gratis, bantuan pendidikan, pemberian beasiswa, dukungan sarana-prasarana dan angkutan sekolah gratis</p> <p>22. Meningkatkan jumlah sekolah inklusi</p> <p>23. Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>24. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan non formal dengan:</p> <p>a)Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;</p> <p>b)Menynergikan program-program pendidikan non formal kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan) untuk memperluas kesempatan kerja; Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan.</p> <p>25. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga</p> <p>26. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</p>	pendidikan yang terjangkau dan merata
		<p>27. Merevitalisasi perpustakaan daerah dan sekolah</p> <p>28. Mengembangkan taman baca masyarakat</p>	8. Peningkatan budaya baca masyarakat
		6. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat	29. Meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Universal Health

		<p>Coverage (UHC)</p> <p>30. Meningkatkan kualitas layanan puskesmas</p> <p>31. Meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>32. Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui <i>home care</i></p> <p>33. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kesehatan</p> <p>34. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian</p> <p>35. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan melalui Poskeskel</p> <p>36. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>37. Meningkatkan jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat</p>	<p>peningkatan pola hidup sehat</p>
--	--	--	-------------------------------------

<p>Misi 3 Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan</p>			
<p>Tujuan 3: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>7. Meningkatkan produk domestik regional bruto</p>	<p>38. Menciptakan iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif</p> <p>39. Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri kecil dan menengah</p> <p>40. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menyongsong revolusi industri 4.0</p> <p>41. Meningkatkan produktivitas pertanian dan produksi perikanan dan peternakan</p>	<p>10. Peningkatan usaha perdagangan, industri, pertanian dan perikanan</p>

		<p>42. Meningkatkan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro</p> <p>43. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk koperasi dan usaha mikro</p> <p>44. Mengembangkan kelembagaan koperasi dan usaha mikro</p> <p>45. Mengembangkan usaha milik RW (koperasi RW)</p> <p>46. Menciptakan wirausaha baru</p> <p>47. Memperluas akses permodalan melalui pinjaman lunak dan pendampingan akses ke lembaga keuangan</p>	11. Pengembangan koperasi dan usaha mikro
	8. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah	<p>48. Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk-produk unggulan daerah</p> <p>49. Peningkatan kualitas produk lokal melalui inovasi produk dan teknologi</p> <p>50. Perluasan pangsa pasar bagi produk unggulan daerah</p> <p>51. Standarisasi produk unggulan daerah</p> <p>52. Menumbuhkan sentra sentra industri</p>	12. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
	9. Meningkatnya ekonomi kreatif	<p>53. Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha ekonomi kreatif</p> <p>54. Meningkatkan pangsa pasar ekonomi kreatif</p>	13. Pengembangan ekonomi kreatif

	10. Meningkatnya jumlah investasi	55. Meningkatkan kualitas layanan perijinan 56. Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah 57. Meningkatkan promosi jenis-jenis usaha potensial untuk meningkatkan daya tarik investasi	14. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu
	11. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	58. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan 59. Mewujudkan jalan lingkar Kota Kediri 60. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase dan trotoar perkotaan 61. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pengairan dan irigasi 62. Meningkatkan sarana-prasarana perdagangan	15. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian
	12. Meningkatnya daya tarik wisata	63. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata 64. Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata 65. Meningkatkan promosi kepariwisataan 66. Mengembangkan Budaya Daerah 67. Meningkatkan sarana-prasarana <i>meeting, incentive, convention, exhibition</i> (MICE) 68. Mengembangkan kampung keren (kreatif dan independen) 69. Mengembangkan identitas Kota Kediri untuk peningkatan kunjungan wisata	16. Pengembangan potensi wisata daerah
Tujuan 4: Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta	13. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	70. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sector 71. Melaksanakan	17. Peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan

percepatan penurunan tingkat kemiskinan		pembangunan secara menyeluruh	
		72. Meningkatkan layanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 73. Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS 74. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat plus	
		75. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan daerah 76. Meningkatkan informasi lapangan kerja 77. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 78. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha dan industry	18. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja

Misi 4: Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Tujuan 5: Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	14. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	79. Meningkatkan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban 80. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme 81. Meningkatkan efektivitas bantuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan 82. Meningkatkan komunikasi dan keharmonisan antar elemen masyarakat 83. Meningkatkan Pengarusutamaan gender 84. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	19. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
--	--	---	---

Tujuan 6: Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	15. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	85. Meningkatkan sinergi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	20. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	
	16. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	86. Penataan kawasan perkotaan dengan penyediaan hunian dan ruang publik yang layak, terjangkau dan ramah disabilitas	21. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	
		87. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sanitasi dan air bersih		
		88. Meningkatkan Kota Layak Anak		
		89. Meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan pemakaman yang berkualitas		
		90. Meningkatkan sarana-prasarana lalu-lintas angkutan jalan	22. Peningkatan kualitas layanan jalan	
		91. Menyediakan transportasi bagi pelajar.		
	92. Meningkatkan layanan kebersihan melalui pengelolaan sampah terpadu, pemenuhan sarana prasarana serta implementasi teknologi ramah lingkungan	23. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan		
	93. Mengembangkan TPA Regional			
	94. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan			
	17. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	95. Mengembangkan kelurahan tanggap bencana	24. Peningkatan efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	
		96.		
	18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	97. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap	25. Peningkatan pengendalian pencemaran dan	

	dan luasan RTH	<p>pencemaran tanah, air dan udara.</p> <p>98. Merehabilitasi dan mengelola kawasan lindung</p> <p>99. Meningkatkan pelestarian, revitalisasi dan pengelolaan sumber mata air</p> <p>100. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH melalui pembangunan taman pada skala kota maupun kelurahan (1 kelurahan 1 RTH), serta RTH lainnya.</p>	kerusakan lingkungan serta peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
--	----------------	--	--

BAB V

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDA

5.1. Fokus Penguatan SIDA

Fokus penguatan SIDA merupakan uraian rinci dari setiap elemen Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) untuk menyusun fokus program disetiap elemen KKI, berikut beberapa fokus setiap KKI:

1. Elemen 1: Fokus pengembangan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis mencakup:
 - a. Pengembangan basis data (indikator penting) inovasi dan bisnis;

- b. Pengembangan regulasi yang kondusif;
 - c. Besaran investasi dibidang IPTEKIN;
 - d. Perbaikan pelayanan publik;
 - e. Pengadaan pemerintah yang pro bisnis inovatif;
 - f. Pengembangan infrastruktur dasar inovasi dan bisnis;
 - g. Pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis.
2. Elemen 2: Fokus penguatan kelembagaan dan daya dukung IPTEKIN atau penelitian dan pengembangan/ kelitbangan serta mengembangkan kemampuan absorpsi IPTEKIN UMKM antara lain:
 - a. Pengembangan dan penguatan kelembagaan IPTEKIN;
 - b. Pengembangan daya dukung IPTEKIN;
 - c. Pengembangan daya absorpsi IPTEKIN UMKM.
 3. Elemen 3: Fokus penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik / terbaik, dan / atau hasil kelitbangan, antara lain:
 - a. Pengembangan / penguatan kelembagaan kolaborasi;
 - b. Peningkatan difusi inovasi, praktik hasil kelitbangan;
 - c. Pengembangan / penguatan pelayanan berbasis teknologi.
 4. Elemen 4: Fokus dalam mendorong budaya inovasi antara lain mencakup:
 - a. Pengembangan / penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi;
 - b. Penguatan kohesi sosial;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kreativitas keinovasian;
 - d. Pengembangan apresiasi dan kampanye inovasi;
 - e. Penciptaan usaha baru yang inovatif.
 5. Elemen 5: Fokus penumbuhkembangan dan penguatan keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah meliputi:
 - a. Penguatan / pengembangan prakarsa terpadu sistem inovasi;
 - b. Pengembangan / penguatan koordinasi kebijakan daerah, dan daerah nasional;
 - c. Pengembangan / penguatan kelembagaan khusus.
 6. Elemen 6: Fokus penyelerasan dengan perkembangan global terbagi atas:
 - a. Pengembangan kelestarian lingkungan atau prakarsa inovasi / teknologi hijau;

- b. Pengembangan / penguatan penerapan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan penjaminan kualitas (measurement, standardization, testing, and quality assurance (MSTQ));
- c. Pengembangan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- d. Peningkatan kepedulian isu-isu dan penyelarasan dengan dinamika internasional yang relevan (seperti ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, Gender (HAM), dll);
- e. Pengembangan regional branding dan / atau posisi global daerah.

5.2. Program Prioritas Penguatan SIDA

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Demikian juga untuk penguatan SIDA dengan tema “klaster IKM/UMKM, Perdagangan Berbasis Ekowisata Kota Kediri” dengan klaster unggulan yaitu Olahan makanan, Pertanian/Agribis dan Kerajinan Rakyat yang menitikberatkan pada kawasan Kecamatan Kota, Mojojoto dan Kecamatan Pesantren perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh stakeholder. Diharapkan seluruh SKPD mendukung dalam wujud

program dan kegiatan, sehingga mampu mewujudkan daerah unggulan di Kota Kediri yang mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.

Adapun beberapa program prioritas yang penting dilaksanakan dalam menunjang Penguatan Roadmap SIDA IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata Kota Kediri adalah:

1. Pembangunan ruang publik kreatif Taman Kota tepi Sungai Brantas sebagai pusat pengembangan wisata edukasi, olahraga yang dikolaborasikan dengan kuliner dan wisata religi terkait dengan pondok pesantren.
2. Pembangunan infrastruktur jalan menuju wisata kuliner dan kerajinan rakyat secara terintegrasi dengan terminal wisata, museum atau islamic center di Alun-Alun, sentra industri kerajinan rakyat di pasa besar, dan didukung pengembangan ruang publik kreatif SIDA ditepi Sungai Brantas, Selomangleng, dan pusat kerajinan rakyat, pasar loakan dan kawasan strategis lainnya yang bisa dikembangkan sebagai kluster IKM dan agribis berbasis ekowisata.
3. Pembangunan agribis tanaman bahan makanan dikecamatan pesantren terpadu dengan desa wisata dan kuliner dikelurahan
4. Pembangunan hutan kota dan taman kota sungai brantas, rest area sebagai ruang publik kreatif menuju Kota Kediri Hijau.
5. Terbangunnya fasilitas olah raga terpadu, kuliner, dan wisata edukasi dalam kawasan tertentu dalam mendukung generasi muda sehat Kota Kediri.
6. Pengembangan sentra industri kerajinan rakyat dalam mendukung SIDA IKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata.
7. Kajian penataan kawasan industri dan investasi yang berwawasan lingkungan
8. Integrasi CSR dan program pembangunan Koperasi dan UMKM dalam mendukung UMKM di masyarakat.
9. Pengembangan Tele Cener dan paket wisata religi, wisata industri/ wisata edukasi terpadu dalam mendukung pariwisata Kota Kediri.
10. Pembangunan infrastruktur pertanian dan destinasi wisata di Kecamatan Pesantren dan sekitarnya.
11. Pengembangan Koperasi Berbasis Hilirisasi disektor, Perdagangan, dan Industri Kerajinan Rakyat terintegrasi dengan Pariwisata

Langkah berikutnya mengoperasionalisasi program prioritas SIDA dan sinergitasnya dengan program prioritas pembangunan secara keseluruhan.

Tabel 5.1. Program Prioritas Penguatan SIDA Kota Kediri

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM SIDA	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB(OPD)
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	Pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan	BPPKAD
Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Program Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	68	81	Peningkatan pelayanan publik melalui profesionalisme SDM Aparatur Daerah\	INSPEKTORAT
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Sasaran Pembangunan Daerah	93,33	100		BPPKAD
		Program Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	Level SPIP	3	4		BPPKAD
		Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	BB	A		INSPEKTORAT
			Peringkat Hasil EKPPD Nasional	12	8		INSPEKTORAT
		Program Perluasan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah WBK/ WBBM	1	8		INSPEKTORAT
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Berbagai Sumber Penerimaan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	20	22		BPPKAD

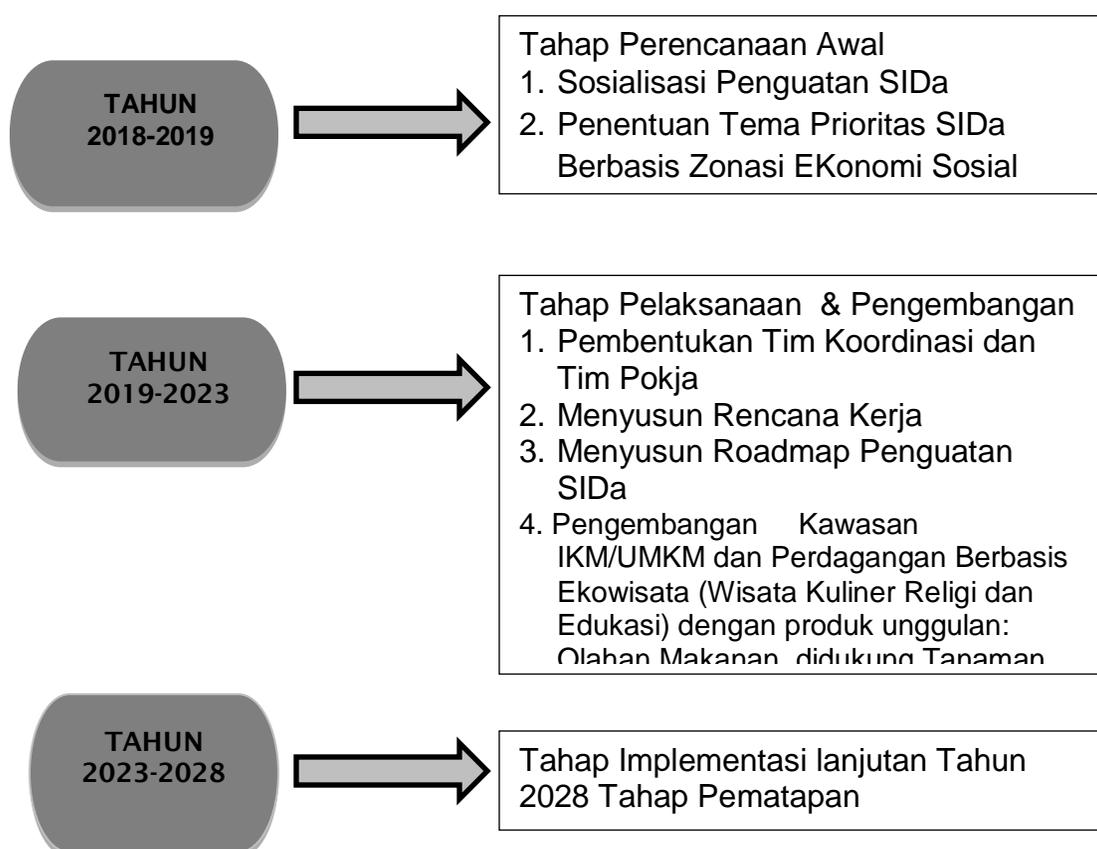
		Program Peningkatan Kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	33,33	100	Program Pembangunan BUMD terintegrasi dengan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	DINKOPUMTK
Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau	Program Peningkatan kualitas Manajemen dan Inovasi Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (3,40)	A (3,80)	Pengembangan inovasi daerah melalui inovasi produk dan teknologi di masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan	DISPERDAGIN
	Peningkatan penerapan <i>smart city</i>	Program Peningkatan Penerapan <i>smart city</i>	Persentase Implementasi Smart City	70	90	Peningkatan pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kerakyatan	DISPERDAGIN
	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,86	0,90		DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan budaya baca masyarakat	Program Peningkatan minat baca masyarakat	Indeks Minat Baca	85,10	90		DINAS PENDIDIKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata serta peningkatan pola hidup sehat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,84	74,01	Program pengembangan Kesehatan dalam pengurusan PIRT	
Meningkatkan perekonomian Kota Kediri dibidang perdagangan, industri, dan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat	Peningkatan usaha perdagangan, industri, pertanian dan perikanan	Program Peningkatan usaha perdagangan, industri, pertanian dan perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	8,5-12,5 T	8,5-12,5 T	Pembangunan infrastruktur pasar, dan sentra industri terintegrasi dengan pariwisata	DINKOPUMTK
Membangun ekonomi kelembagaan koperasi dan usaha mikro secara terintegrasi	Pengembangan koperasi dan usaha mikro	Program Pengembangan koperasi dan usaha mikro	Pertumbuhan Ekonomi Non Industri Tembakau	7%-8%	7%-8%	Pengembangan dan pendampingan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Berbasis Hilirisasi	

Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk lokal dalam mencapai daya saing daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Lokal	Persentase pertumbuhan produk unggulan daerah	7%-8%	7%-8%	Pendampingan dan Pelatihan Pengembangan inovasi produk dan Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan	
Menciptakan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di masyarakat	Pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7%-8%	7%-8%	Lomba Festival Inovasi Produk dan Teknologi dalam mendukung Ekonomi Kerakyatan	
Menciptakan iklim investasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu	Program Peningkatan Iklim Investasi	Nilai Investasi	718M	850M	Pengembangan Investasi yang Mengarah Pada Industri, Perdagangan Berbasis Ekowisata	DPMPTSP
Menetapkan kebijakan fiskal daerah melalui pembangunan infrastruktur dasar sebagai pendukung perekonomian	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian	Program peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian	Indeks Infrastruktur	70	90	Pengembangan Infrastruktur Pasar dan Kawasan Industri untuk mendukung ekonomi kerakyatan	DPUPR
Mengoptimalkan pembangunan destinasi wisata terintegrasi	Pengembangan potensi wisata daerah	Program Pengembangan potensi wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	1.850.000	2.000.000	Pengembangan Pariwisata terpadu mengedepankan ekowisata	DISBUDPARPORA
Mengefektifkan program-program penanggulangan kemiskinan	Peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan	Program peningkatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	19.386	15.443	Program penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelmbagaan Koperasi dan Usaha Mikro Berbasis Hilirsasi	DINAS SOSIAL
Meningkatkan peluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	Program Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,5	3,01	Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha sektor informal	DINKOPUMTK
Menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan di masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	100	100	Pengembangan ekonomi kreatif bagi generasi muda dalam mendukung ketertiban dan ketrentaman lingkungan	DINAS SOSIAL

Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	Program Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	Persentase Luas Lahan Yang Peruntukannya Sesuai RTRW	80,24	82,24	Pemanfaatan RTH dan Ruang Publik Kreatif untuk Mendukung SIDA terintegrasi sesuai RTRW	DPUPR
Meningkatkan penataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman masyarakat	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Program peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	93,77	94,49	Program Menanam Pohon secara masif menuju Kota Kediri Hijau	DLHKP
Meningkatkan Kualitas layanan jalan secara terintegrasi dan terencana	Peningkatan Kualitas Layanan Jalan	Program peningkatan Kualitas Layanan Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan	0,9 (C)	0,65 (A)	Pembangunan Petunjuk Arah Menuju Destinasi Wisata secara terintegrasi	DISBUDPARPORA
Meningkatkan pengelolaan persampahan menuju Kota Kediri Hijau	Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Program peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	98,80	98,84	Program Pengembangan Bank Sampah dan Pembuatan Kompos Bagi Program Posdaya (Program Pemberdayaan Keluarga)	DLHKP
Meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana	Peningkatan efektifitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Program peningkatan efektifitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Bencana	0,5	0,75	Lomba inovasi Teknologi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
Meningkatkan perencanaan dan pengendalian kerusakan lingkungan menuju Kota Kediri Hijau	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,20	66,35	Pembangunan Ruang Publik Kreatif: Taman Kota dan RTH secara terpadu untuk memenuhi ketentuan Luasan RTH	DPUPR
			Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	16	16,08		DPUPR

BAB VI RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

Rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan wujud implementasi strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan Sistem Inovasi Daerah, pendanaan dan penanggungjawab. Adapun tahapan rencana aksi (*action plan*) penguatan SIDA Kota Kediri dapat dilihat pada Gambar 6.1. dan untuk Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.2.



Gambar 6.1. Tahapan Rencana Aksi (*Action Plan*) IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata didukung Kerajinan Rakyat di Kecamatan Kota, Mojojoto, dan Pesantren, Kota Kediri

Tahap pematapan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Kediri dapat menjadi masukan/pertimbangan rencana strategi/ visi dan misi Pimpinan Daerah periode berikutnya (tahun 2023 sampai dengan tahun 2028). Kesuksesan pelaksanaan penguatan SIDA tidak terlepas dari kolaborasi antara pihak Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas Masyarakat (Community) dan Government (ABCG) sebagai Penta Helix. Adapun anggaran untuk mendukung kawasan IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata di Kecamatan Kota, Mojojoto, dan Pesantren, didukung kawasan strategis pusat Kota Kediri, Taman Kota tepi Sungai Brantas, selomangleng, Sentra Industri Tahu, Kerajinan Rakyat

Roadmap SIDA Kota Kediri| 1

Batik / Tenun Ikat, dan didukung masyarakat pesantren dan destinasi wisata lainnya. selain bersumber dari APBD Kota Kediri, dapat melalui bantuan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur, APBN maupun pihak swasta.

Untuk program prioritas mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri dan perdagangan Kota Kediri. dan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) dan dokumen pendukung lainnya, sehingga yang perlu dipersiapkan dalam jangka waktu dekat adalah:

Tabel 6.1. Program Prioritas Penguatan SIDA Kota Kediri Tahun 2019 – 2023

Tabel 6.1. Program Prioritas Penguatan SIDA Kota Kediri Tahun 2019 – 2023		
No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OPD / SKPD
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	DINAS KESEHATAN
4	Program Upaya Kesehatan Keluarga	DINAS KESEHATAN
5	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
6	Program Pembinaan lingkungan Sosial	DINAS KESEHATAN
7	Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan	
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	DINAS KESEHATAN
9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru	RSUD GAMBIRAN
10	Program Pembinaan lingkungan Sosial	RSUD GAMBIRAN
11	Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN (BLUD)
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS MRICAN
14	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS MRICAN
15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS CAMPUREJO
16	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS CAMPUREJO
17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS SUKORAME
18	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS SUKORAME
19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA
20	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA
21	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN
22	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN
23	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS BALOWERTI
24	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS BALOWERTI
25	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS PESANTREN 1
26	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS PESANTREN 1
27	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS PESANTREN 2
28	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS PESANTREN 2
29	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PUSKESMAS NGLETIH
30	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	PUSKESMAS NGLETIH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
36	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPUPR
37	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	DPUPR
38	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	DPUPR
39	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPUPR
40	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	
41	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	DPUPR

42	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPUPR
43	Program Pengendalian Banjir	DPUPR
44	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	DPUPR
45	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DPUPR
46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	
47	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	DPUPR
48	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR
49	Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum	DPUPR
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
50	Program Pengembangan Perumahan	DISPERKIM
51	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
52	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	DISPERKIM
53	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	DISPERKIM
54	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup perumahan dan pemukiman	DISPERKIM
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
55	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DISPERKIM
56	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	DISPERKIM
57	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
58	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DISPERKIM
59	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	
60	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	
61	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DISPERKIM
	PERTANAHAN	DISPERKIM
62	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	DISPERKIM
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
63	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	KESBANGPOL
64	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	KESBANGPOL
65	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	KESBANGPOL
66	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	KESBANGPOL
67	Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
68	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATPOL PP
69	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
70	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
71	Program Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	BPBD
72	Program Kedaruratan dan Logistik	BPBD
73	Program Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SOSIAL
75	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS SOSIAL
76	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS SOSIAL
77	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera	DINAS SOSIAL
78	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL
79	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	
80	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	
81	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL
82	Program Pembinaan Orang Terlantar	DINAS SOSIAL
83	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	DINAS SOSIAL

	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
84	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DP3AP2KB
85	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB
86	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	DP3AP2KB
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
87	Program Keluarga Berencana	DP3AP2KB
88	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	DP3AP2KB
89	Program Pelayanan Kontrasepsi	DP3AP2KB
90	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	DP3AP2KB
91	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	DP3AP2KB
92	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	DP3AP2KB
93	Program Pengendalian Penduduk	DP3AP2KB
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	PANGAN	
94	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	DKPP
95	Program Penganekaragaman Pangan dan Gizi	DKPP
96	Program Kewaspadaan Pangan dan Keamanan Pangan	DKPP
97	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketahanan Pangan	DKPP
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
98	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DKPP
99	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Perikanan	DKPP
	PERTANIAN	
100	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DKPP
101	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	DKPP
102	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	DKPP
103	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DKPP
104	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang	DKPP
105	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	DKPP
106	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DKPP
107	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	DKPP
108	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pertanian	DKPP
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
	LINGKUNGAN HIDUP	
109	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLHKP
110	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHKP
111	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLHKP
112	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DLHKP
113	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLHKP
114		DLHKP
115	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Lingkungan Hidup	DLHKP
116	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	DLHKP
117	Program Pengembangan Penerimaan Daerah dari Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan pertamanan	DLHKP
118	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Persampahan	DLHKP
119	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang RTH	DLHKP

	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
120	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISPENDUKCAPIL
121	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISPENDUKCAPIL
122	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DISPENDUKCAPIL
123	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DISPENDUKCAPIL
124	Program Perencanaan dan Penganggaran	
125	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISPENDUKCAPIL
	DINAS PERHUBUNGAN	
	PERHUBUNGAN	
126	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUB
127	Pogram Pengembangan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	DISHUB
128	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DISHUB
129	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan	DISHUB
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
130	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DISKOMINFO
131	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	DISKOMINFO
132	Program Pengembangan Komunikasi	DISKOMINFO
133	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	DISKOMINFO
134	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
135	Program Penguatan Tata Kelola Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
136	Program Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi	DISKOMINFO
137	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	DISKOMINFO
138	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
	STATISTIK	
139	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	DISKOMINFO
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
140	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINKOPUMTK
141	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	DINKOPUMTK
142	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro	DINKOPUMTK
143	Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	DINKOPUMTK
144	Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Konduksif Bagi Usaha Mikro	DINKOPUMTK
145	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro	DINKOPUMTK
	TENAGA KERJA	DINKOPUMTK
146	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINKOPUMTK
147	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
148	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINKOPUMTK
149	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan	DINKOPUMTK
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PENANAMAN MODAL	
150	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPPTSP
151	Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	DPMPPTSP
152	Program Pengendalian Penanaman Modal	DPMPPTSP
153	Program Optimalisasi Pemanfaatan Data Dan Teknologi Informasi	DPMPPTSP

	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
154	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	DISBUDPARPORA
155	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	
156	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	DISBUDPARPORA
157	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	DISBUDPARPORA
	KEBUDAYAAN	DISBUDPARPORA
158	Program Pengembangan Nilai Budaya	DISBUDPARPORA
159	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DISBUDPARPORA
160	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DISBUDPARPORA
161	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	DISBUDPARPORA
	PARIWISATA	
162	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DISBUDPARPORA
163	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DISBUDPARPORA
164	Program Pengembangan Kemitraan	DISBUDPARPORA
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	PERPUSTAKAAN	
165	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	DISARPUS
	KEARSIPAN	DISARPUS
166	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	DISARPUS
167	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	DISARPUS
168	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	DISARPUS
169	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	DISARPUS
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	PERDAGANGAN	
170	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	DISPERDAGIN
171	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
172	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	DISPERDAGIN
173	Program Pembinaan dan Pengembangan Kemetreologian Daerah	DISPERDAGIN
174	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Perdagangan	DISPERDAGIN
	PERINDUSTRIAN	
175	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	DISPERDAGIN
176	Program Pemberdayaan Industri	DISPERDAGIN
177	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	DISPERDAGIN
178	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif	DISPERDAGIN
179	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	DISPERDAGIN
180	Program Pembinaan Industri	DISPERDAGIN
	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN DAERAH	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
181	Program Pembinaan Administrasi Kecamatan/ Kelurahan	BAG. PEMERINTAHAN
182	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	BAG. PEMERINTAHAN
183	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	BAG. PEMERINTAHAN
184	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	BAG. PEMERINTAHAN
185	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BAG. PEMERINTAHAN
186	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BAG. PEMERINTAHAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BAG. PEMERINTAHAN
187	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	BAG. PEMERINTAHAN
188	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	BAG. PEMERINTAHAN

189	Program Fasilitas Prodama	BAG. PEMERINTAHAN
190	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	
191	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
192	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
193	Program Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
194	Program Dukungan Layanan Administrasi Masyarakat Bidang Keagamaan dan Spiritual	BAG. KESRA
195	Program Dukungan Layanan Administrasi Masyarakat Bidang Kesehatan dan Bina Sosial	BAG. KESRA
196	Program Dukungan Layanan Administrasi Masyarakat Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	BAG. KESRA
	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
197	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
198	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
199	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitas dan Evaluasi Bidang Perekonomian	BAG. ADM. PEREKONOMIAN
200	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	BAG. ADM. PEREKONOMIAN
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
201	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
	BAGIAN HUKUM	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
202	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	BAG. HUKUM
203	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	BAG. HUKUM
	BAGIAN ORGANISASI	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
204	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	BAG. ORGANISASI
	BAGIAN UMUM	
	KESEKRETARIATAN DAERAH	
205	Program Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BAG. UMUM
206	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	BAG. UMUM
207	Program Peningkatan Layanan Kesekretariatan Daerah	

	SEKRETARIAT DPRD	
	KESEKRETARIATAN DPRD	
208	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD
	Program Pembentukan Peraturan Daerah	
	INSPEKTORAT	
	PENGAWASAN	
209	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	INSPEKTORAT
210	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	INSPEKTORAT
211	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	INSPEKTORAT
212	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	INSPEKTORAT
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	PERENCANAAN	
213	Program Pengembangan Data/Informasi	BARENLITBANG
214	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	BARENLITBANG
215	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BARENLITBANG
216	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	BARENLITBANG
217	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	BARENLITBANG
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
208	Program Penelitian dan Pengembangan	BARENLITBANG
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	KEUANGAN	
209	Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	BPPKAD
210	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
211	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	BPPKAD
212	Program Peningkatan Pengelolaan BMD	BPPKAD
213	Program Peningkatan Kualitas Perbendaharaan Daerah	BPPKAD
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	KEPEGAWAIAN	
214	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	BKPPD
215	Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Informasi ASN	BKPPD
216	Program Pelayanan ASN	BKPPD
217	Program Pengembangan Aparatur	BKPPD
	KECAMATAN MOJOROTO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
218	Program Peningkatan Pelayanan Prima	KEC. MOJOROTO
219	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	KEC. MOJOROTO
220	Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	
221	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
222	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
	KELURAHAN BANDAR LOR	
	PEMERINTAHAN UMUM	
223	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BANDAR LOR

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
224	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Lor	KEL. BANDAR LOR
225	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BANDAR LOR
	KELURAHAN BANDAR KIDUL	
	PEMERINTAHAN UMUM	
226	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BANDAR KIDUL
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
227	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul	KEL. BANDAR KIDUL
228	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BANDAR KIDUL
	KELURAHAN BANJARMLATI	
	PEMERINTAHAN UMUM	
229	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BANJARMLATI
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
230	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarmlati	KEL. BANJARMLATI
231	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BANJARMLATI
	KELURAHAN POJOK	
	PEMERINTAHAN UMUM	
232	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. POJOK
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
233	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pojok	KEL. POJOK
234	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. POJOK
	KELURAHAN SUKORAME	
	PEMERINTAHAN UMUM	
235	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. SUKORAME
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
236	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukorame	KEL. SUKORAME
237	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. SUKORAME
	KELURAHAN BUJEL	
	PEMERINTAHAN UMUM	
238	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BUJEL
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
239	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bujel	KEL. BUJEL
240	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BUJEL
	KELURAHAN GAYAM	
	PEMERINTAHAN UMUM	
	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. GAYAM
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
241	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam	KEL. GAYAM
242	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. GAYAM
	KELURAHAN MRICAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
243	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. MRICAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
244	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mrican	KEL. MRICAN
245	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. MRICAN

	KELURAHAN DERMO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
246	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. DERMO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
247	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo	KEL. DERMO
248	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. DERMO
	KELURAHAN NGAMPEL	
	PEMERINTAHAN UMUM	
249	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. NGAMPEL
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
250	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampel	KEL. NGAMPEL
251	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. NGAMPEL
	KELURAHAN MOJOROTO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
252	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. MOJOROTO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
253	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojoroto	KEL. MOJOROTO
254	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. MOJOROTO
	KELURAHAN CAMPUREJO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
255	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. CAMPUREJO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
256	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campurejo	KEL. CAMPUREJO
257	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. CAMPUREJO
	KELURAHAN LIRBOYO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
258	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. LIRBOYO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
259	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lirboyo	KEL. LIRBOYO
260	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. LIRBOYO
	KELURAHAN TAMANAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
261	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. TAMANAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
262	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan	KEL. TAMANAN
263	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. TAMANAN
	KECAMATAN KOTA	
	PEMERINTAHAN UMUM	
264	Program Peningkatan Pelayanan Prima	KEC. KOTA
265	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	KEC. KOTA
266	Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	
267	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
268	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	

	KELURAHAN SEMAMPIR	
	PEMERINTAHAN UMUM	
269	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. SEMAMPIR
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
270	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semampir	KEL. SEMAMPIR
271	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. SEMAMPIR
	KELURAHAN BALOWERTI	
	PEMERINTAHAN UMUM	
272	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BALOWERTI
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
273	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balowerti	KEL. BALOWERTI
274	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BALOWERTI
	KELURAHAN DANDANGAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
275	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. DANDANGAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
276	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dandangan	KEL. DANDANGAN
277	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. DANDANGAN
	KELURAHAN NGADIREJO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
278	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. NGADIREJO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
279	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngadirejo	KEL. NGADIREJO
280	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. NGADIREJO
	KELURAHAN BANJARAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
281	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BANJARAN
	URUSAN WAJIB	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
282	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjaran	KEL. BANJARAN
283	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BANJARAN
	KELURAHAN KALIOMBO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
284	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. KALIOMBO
	URUSAN WAJIB	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliombo	KEL. KALIOMBO
285	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. KALIOMBO
	KELURAHAN NGRONGGO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
286	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. NGRONGGO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
287	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngronggo	KEL. NGRONGGO
288	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. NGRONGGO

	KELURAHAN MANISRENGGO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
289	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. MANISRENGGO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
290	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrenggo	KEL. MANISRENGGO
291	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. MANISRENGGO
	KELURAHAN REJOMULYO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
292	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. REJOMULYO
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
293	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	KEL. REJOMULYO
294	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. REJOMULYO
	KELURAHAN KEMASAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
295	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. KEMASAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
296	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemas	KEL. KEMASAN
297	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. KEMASAN
	KELURAHAN POCANAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
298	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. POCANAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
299	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pocanan	KEL. POCANAN
300	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. POCANAN
	KELURAHAN RINGINANOM	
	PEMERINTAHAN UMUM	
301	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. RINGINANOM
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
302	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ringinanom	KEL. RINGINANOM
303	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. RINGINANOM
	KELURAHAN KAMPUNGDALEM	
	PEMERINTAHAN UMUM	
304	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. KAMPUNGDALEM
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
305	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem	KEL. KAMPUNGDALEM
306	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. KAMPUNGDALEM
	KELURAHAN SETONO PANDE	
	PEMERINTAHAN UMUM	KEL. SETONO PANDE
307	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. SETONO PANDE
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
308	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Pande	KEL. SETONO PANDE
309	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. SETONO PANDE

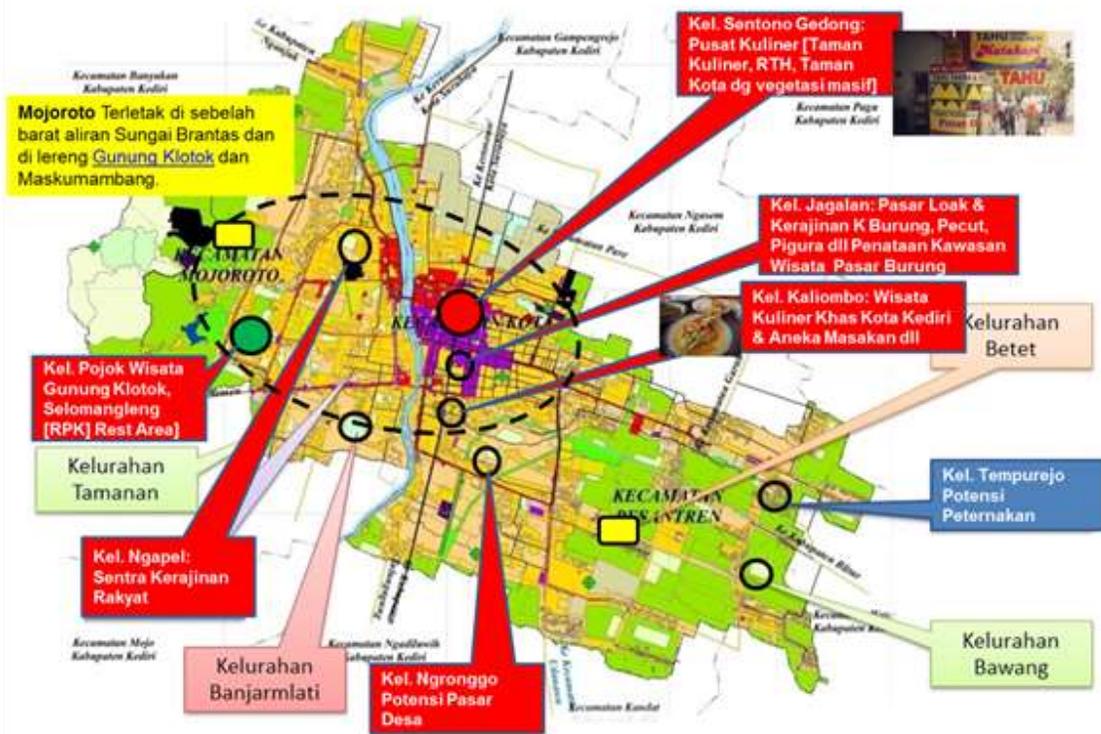
	KELURAHAN JAGALAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
310	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. JAGALAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
311	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan	KEL. JAGALAN
312	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. JAGALAN
	KELURAHAN PAKELAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
313	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. PAKELAN
	URUSAN WAJIB	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
314	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakelan	KEL. PAKELAN
315	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. PAKELAN
	KELURAHAN SETONO GEDONG	
	PEMERINTAHAN UMUM	KEL. SETONO
316	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. SETONO GEDONG
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
317	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Gedong	KEL. SETONO GEDONG
318	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. SETONO
	KECAMATAN PESANTREN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
319	Program Peningkatan Pelayanan Prima	KEC. PESANTREN
320	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	KEC. PESANTREN
321	Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	
322	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
323	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
	KELURAHAN BANGSAL	
	PEMERINTAHAN UMUM	
324	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BANGSAL
	PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
325	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangsal	KEL. BANGSAL
326	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BANGSAL
	KELURAHAN PAKUNDEN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
327	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. PAKUNDEN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
328	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakunden	KEL. PAKUNDEN
329	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. PAKUNDEN
	KELURAHAN TOSAREN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
330	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. TOSAREN
	331 PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA	
332	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tosaren	KEL. TOSAREN
333	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. TOSAREN

	KELURAHAN JAMSAREN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
334	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. JAMSAREN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
335	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jamsaren	KEL. JAMSAREN
336	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. JAMSAREN
	KELURAHAN SINGONEGARAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
337	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. SINGONEGARAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
338	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Singonegaran	KEL. SINGONEGARAN
339	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. SINGONEGARAN
	KELURAHAN BLABAK	
	PEMERINTAHAN UMUM	
340	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BLABAK
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
341	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Blabak	KEL. BLABAK
342	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BLABAK
	KELURAHAN BETET	
	PEMERINTAHAN UMUM	
343	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BETET
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
344	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Betet	KEL. BETET
345	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BETET
	KELURAHAN TINALAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
346	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. TINALAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
347	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinalan	KEL. TINALAN
348	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. TINALAN
	KELURAHAN BAWANG	
	PEMERINTAHAN UMUM	
349	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BAWANG
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
350	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bawang	KEL. BAWANG
351	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BAWANG
	KELURAHAN NGLETIH	
	PEMERINTAHAN UMUM	
352	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. NGLETIH
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
353	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngletih	KEL. NGLETIH
354	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. NGLETIH
	KELURAHAN TEMPUREJO	
	PEMERINTAHAN UMUM	
355	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. TEMPUREJO

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
356	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tempurejo	KEL. TEMPUREJO
357	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. TEMPUREJO
	KELURAHAN KETAMI	
	PEMERINTAHAN UMUM	
358	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. KETAMI
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
359	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketami	KEL. KETAMI
360	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. KETAMI
	KELURAHAN PESANTREN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
361	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. PESANTREN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
362	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pesantren	KEL. PESANTREN
363	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. PESANTREN
	KELURAHAN BANARAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
364	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BANARAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
365	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banaran	KEL. BANARAN
366	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BANARAN
	KELURAHAN BURENGAN	
	PEMERINTAHAN UMUM	
367	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	KEL. BURENGAN
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
368	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Burengan	KEL. BURENGAN
369	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	KEL. BURENGAN

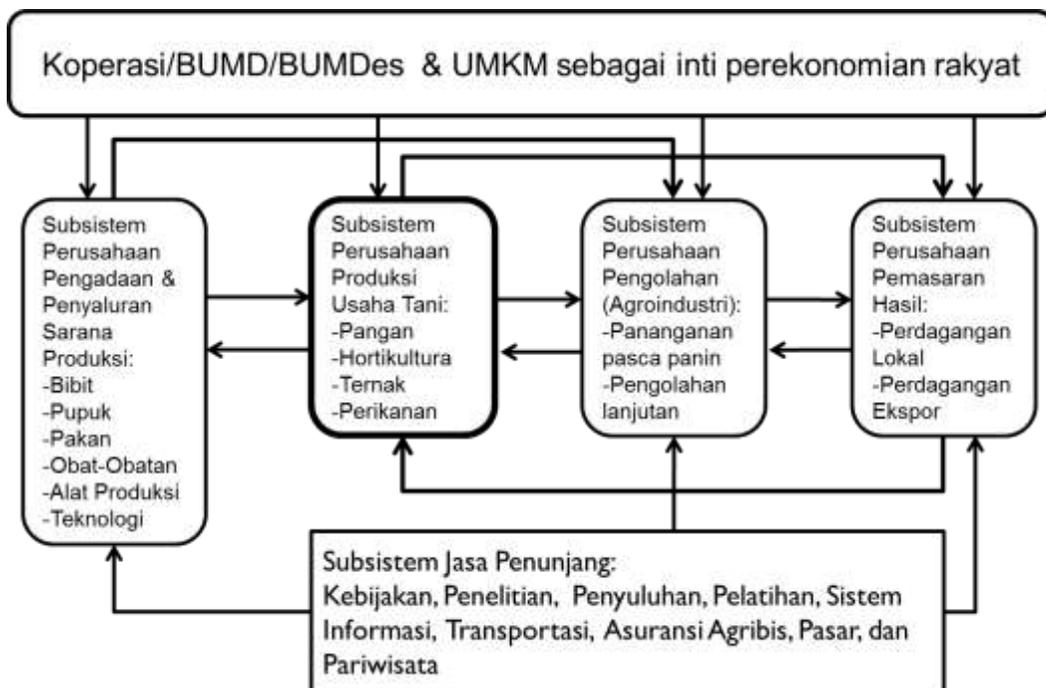
Berdasarkan program prioritas SIDA yang telah dituangkan pada Tabel 6.1. dapat dipadukan dengan kerangka kawasan bagi implementasi Sistem Inovasi Daerah Kota Kediri yakni klaster IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata, dapat ditunjukkan pada Gambar 6.1.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI MIKRO/KECIL



Gambar: 6.1: Peta Kutup-Kutup Pertumbuhan sebagai Kerangka Kawasan Inovatif bagi Implementasi SIDA Kota Kediri

Penjelasan selanjutnya sebagai kerangka operasionalisasi kluster IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata, secara skematis, program pengembangan kluster industri didukung kelembagaan Koperasi dan UMKM dapat ditunjukkan pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2. Strategi Sistem Agribis Kota Kediri Dan Kelembagaan Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan kluster industri IKM/UMKM dan Perdagangan Berbasis Ekowisata dengan produk unggulan olahan makanan, kerajinan rakyat, dan tanaman pangan dan hortikultura serta penempatan kutup-kutup pertumbuhan sebagai pijakan pengembangan kerangka kawasan terintegrasi dan terjaminnya proses hilirisasi produk maka, agar lebih kongkrit dan teroperasionalisasi mulai dari arah kebijakan fokus program SIDA, indikator kinerja program dan rencana aksi dalam bentuk kegiatan dilengkapi pendanaan dan periode jangka waktu yang ditentukan dapat dijabarkan kedalam Tabel 6.2.

Misi, Arah Kebijakan Fokus Program Prioritas dan Kegiatan SIDA	Indikator Kinerja Program (Operasional SIDA)	Satuan	Kondisi SIDA Saat ini (Base Line RPJMD 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir SIDA Yang Akan Dicapai		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
"Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni"																
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi																
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi																
PERTANAHAN																
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	Pengendalian Pemanfaatan Pertanian	Persen (%)	60%	60%	70,000,000	60%	70,700,000	62%	71,407,000	63%	72,121,070	64%	72,842,281	100%	357,070,351	DISPERKIM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	% kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	Persen (%)	95.79%	96%	1,400,000,000	97%	1,414,000,000	97%	1,428,140,000	98%	1,442,421,400	98%	1,456,845,614	98%	7,141,407,014	DISPENDUKCA PIL
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	% Berkembangnya komunikasi informasi dan media massa	Persen (%)	44.00%	55%	430,000,000	66%	434,300,000	77%	438,643,000	88%	443,029,430	90%	447,459,724	90%	2,193,432,154	DISKOMINFO
Pengelolaan Radio Pemerintah Daerah	Tersebarluaskan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah melalui radio pemerintah	Waktu 6 Program Siaran Radio/hari dan lamanya Dialog Interaktif		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		DISKOMINFO
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang	Terpenuhnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media luar ruang secara optimal	Lamanya waktu Pembuatan dan pemasangan balih, spanduk, back drop		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		DISKOMINFO
Penerbitan dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhnya diseminasi dan distribusi informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah melalui majalah barometer	Persentase Penerbitan majalah barometer 2 edisi dalam setahun		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		DISKOMINFO
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Terpenuhnya Informasi tentang arah dan tujuan pembangunan melalui program-program pembangunan	Persen (%)	93.00%	93%	220,000,000	93%	222,200,000	93%	224,422,000	93%	226,666,220	93%	228,932,882	93%	1,122,221,102	DISKOMINFO
Pengelolaan Radio Pemerintah Daerah	Tersebarluaskan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah melalui radio pemerintah	Waktu penyebarluasan informasi		12 bulan	191,716,000	12 bulan	191,716,000	12 bulan	191,716,000	12 bulan	191,716,000	12 bulan	191,716,000	12 bulan	191,716,000	DISKOMINFO

Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang	Terpenuhinya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media luar ruang secara optimal	Waktu penyebarluasan informasi		1 tahun	37,500,000	DISKOMINFO										
Penerbitan dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya diseminasi dan distribusi informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah melalui majalah barometer	Persentasi penyebarluasan informasi		90 %	208,876,000	90 %	208,876,000	90 %	208,876,000	90 %	208,876,000	90 %	208,876,000	90 %	208,876,000	DISKOMINFO
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program pemerintah 2. Terpenuhinya diseminasi informasi kepada masyarakat	Persentase penyelesaian Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat		90 %	80,000,000	90 %	80,000,000	90 %	80,000,000	90 %	80,000,000	90 %	80,000,000	90 %	80,000,000	
Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah	1. Terpenuhinya penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah pusat/daerah melalui sosialisasi, media massa 2. Terpenuhinya Layanan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase penyelesaian 1. Cetak/penggandaan buku produk hukum/ deseminasi informasi 2. Terpenuhinya Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		90 %	147,815,000	90 %	147,815,000	90 %	147,815,000	90 %	147,815,000	90 %	147,815,000	90 %	147,815,000	
Program Pengembangan Komunikasi	Terpenuhinya informasi tentang arah dan tujuan pembangunan melalui program-program pembangunan	Persen (%)	90%	90%	150,000,000	91%	151,500,000	92%	153,015,000	93%	154,545,150	94%	156,090,602	94%	157,635,752	DISKOMINFO

Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi	1. Tercapainya KIM yang handal 2. Tereleksinya KIM Tingkat Kota 3. Tersedianya Informasi Informasi Pembangunan Melalui Pertura 4. Tercapainya Program KIM dan LCCK Yang Dapat di Tindaklanjuti 5. Terjadinya komunikasi yang efektif/ dialog antara pemerintah dan komunitas 6. Tercapainya Workshop Vlog 7. Tercapainya Workshop Jurnalistik	1. Sosialisasi KIM 2. Seleksi KIM Tingkat Kota 3. Sosialisasi Pertura 4. Monitoring dan Evaluasi KIM dan LCCK KIM 5. Terwadainya aspirasi komunitas 6. Terlaksananya Workshop Vlog 7. Terlaksananya Workshop Jurnalistik		90%	150,059,275	90%	150,059,275	90%	150,059,275	90%	150,059,275	90%	150,059,275	90%	150,059,275	DISKOMINFO
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	% Fasilitas SDM Komunikasi dan Informatika	Persen (%)	90%	90%	260,000,000	91%	262,600,000	92%	265,226,000	93%	267,878,260	94%	270,557,043	94%	1,326,261,303	DISKOMINFO
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi	1. Terlaksananya Pembuatan Blog, Website, Workshop Jurnalistik, Workshop Film, Festival Film dan Workshop Vlog 2. Terlaksananya Pembinaan Hasil Dari Pengembangan SDM	Persentase Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi		90%	261,200,000	90%	261,200,000	90%	261,200,000	90%	261,200,000	90%	261,200,000	90%	261,200,000	DISKOMINFO
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% peningkatan kualitas layanan aplikasi informatika SPBE	Persen (%)	90%	90%	3,900,000,000	91%	3,939,000,000	92%	3,978,390,000	93%	4,018,173,900	94%	4,058,355,639	94%	19,893,919,539	DISKOMINFO
Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya akses internet dan intranet	Pengelolaan NOC dan data center		1 tahun	1,783,180,000	DISKOMINFO										
Layanan Infrastruktur Dasar Data Centre, Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK	Tersedianya layanan jaringan dan data center	Bahan Perencanaan Infrastruktur TIK		1 tahun	517,576,000	DISKOMINFO										
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Infrastruktur TIK	Tersedianya Dokumen Laporan Monev Operasional Infrastruktur TIK	1. Pengembangan aplikasi e-gov 2. Pengelolaan aplikasi e-gov 3. Pengelolaan database e-gov 4. Peningkatan Kompetensi administrator operasional aplikasi e-gov		90 %	68,644,000	90 %	68,644,000	90 %	68,644,000	90 %	68,644,000	90 %	68,644,000	90 %	68,644,000	DISKOMINFO

Layanan Pengembangan & Pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi	Meningkatnya jaminan ketersediaan, kelancaran dan keamanan layanan publik serta pemerintahan berbasis elektronik	1. Pembangunan gateway integrasi 2. Pengelolaan gateway integrasi 3. Peningkatan Kapasitas administrator operasional gateway integrasi		1 tahun	287,698,500	DISKOMINFO										
Integrasi layanan publik dan pemerintahan	Meningkatnya interoperabilitas dan konsistensi data/informasi yang terdapat dalam aplikasi layanan publik dan pemerintahan	1. Pelayanan hosting website 2. Pelayanan registrasi domain & subdomain website 3. Dukungan SDM operasional website (SDM TI) 4. Pembinaan pengelolaan website (assesment) 5. Peningkatan kompetensi Administrator operasional webhost/website		1 tahun	206,131,000	DISKOMINFO										
Layanan Website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja operasioanl website melalui content update yang tinggi	1. Workshop layanan pemerintah berbasis elektronik 2 paket 2. promosi onsite (kunjungan lapangan) 50 titik 3. Pembuatan media promosi digital 2 paket 4. Survey popularitas layanan elektronik 2 paket		1 tahun	1,071,840,000	DISKOMINFO										
Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	Meningkatnya pemahaman proses bisnis ataupun teknis terkait operasional aplikasi layanan publik dan pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi		1 tahun	0	DISKOMINFO										
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan melalui ketersediaan dokumentasi pelaporan yang baik			1 tahun	6,841,500	DISKOMINFO										

Persen (%)	80%	80%	360,000,000	81%	363,600,000	82%	367,236,000	80%	370,908,360	80%	374,617,444	80%	1,836,361,804	DISKOMINFO
1. Terlaksananya sosialisasi rencana induk pengembangan TIK kepada seluruh OPD 2. Terlaksananya kegiatan pengelolaan TIK	90 %	90 %	34,855,125	90 %	34,855,125	90 %	34,855,125	90 %	34,855,125	90 %	34,855,125	90 %	34,855,125	DISKOMINFO
1. Terlaksananya sosialisasi smartcity yang melibatkan seluruh stakeholder 2. Terbitnya buku mengenai smartcity	12 bulan	12 bulan	182,660,000	DISKOMINFO										
1. Terlaksananya Bimtek /Kursus/ Pelatihan bagi ASN di Pemkot Kediri tentang E-Government 2. Terlaksananya Bimtek/ Kursus/ Pelatihan bagi Masyarakat tentang TI	90 %	90 %	148,335,100	90 %	148,335,100	90 %	148,335,100	90 %	148,335,100	90 %	148,335,100	90 %	148,335,100	DISKOMINFO
Persen (%)	90%	90%	5,000,000	91%	5,050,000	92%	5,100,500	93%	5,151,505	94%	5,203,020	94%	25,505,025	DISKOMINFO
Kegiatan koordinasi kehumasan		1 tahun	5,000,000	DISKOMINFO										
Persen (%)	80%	80%	250,000,000	81%	252,500,000	82%	255,025,000	83%	257,575,250	84%	260,151,003	80%	1,275,251,253	DISKOMINFO
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi		1 Tahun	257,095,050	DISKOMINFO										
Persen (%)	90%	90%	160,000,000	91%	161,600,000	92%	163,216,000	93%	164,848,160	94%	166,496,642	94%	816,160,802	DISKOMINFO

Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	1. Terdistribusi dan Tertanganinya Pengaduan Masyarakat ke masing-masing OPD 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan Pengaduan	1. Berjalannya Sekretariat dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat		1 Tahun	165,250,000											
STATISTIK					110,000,000		111,100,000		112,211,000		113,333,110		114,466,441			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% Tersedianya data dan statistik sektoral di lingkup Pemerintahan Kota Kediri		90%	90%	358,000,000	91%	361,580,000	92%	365,195,800	93%	368,847,758	93%	372,536,236	93%	1,826,159,794	DISKOMINFO
Pengolahan Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat	1. Perencanaan Kebutuhan Data Statistik Sektoral 2. Pengumpulan Data Statistik Sektoral 3. Pengolahan Data Statistik Sektoral 4. Updating Data Statistik Sektoral		90%	104,632,950	90%	104,632,950	90%	104,632,950	90%	104,632,950	90%	104,632,950	90%	104,632,950	DISKOMINFO
Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terdiseminasinya Data Statistik Sektoral Melalui Infografis dan Vidiografis	1. Desiminasi Data Statistik Sektoral Melalui Infografis dan Vidiografis		90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	9,000,000	90%	9,000,000	DISKOMINFO
PERPUSTAKAAN							-		-		-		-			
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	Persen (%)	65%	65%	820,000,000	66%	828,200,000	67%	836,482,000	68%	844,846,820	68%	853,295,288	68%	4,182,824,108	DISARPUS
KEARSIPAN		Persen (%)					-		-		-		-			DISARPUS
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	% SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	Persen (%)	65%	65%	34,000,000	66%	34,340,000	67%	34,683,400	68%	35,030,234	69%	35,380,536	69%	173,434,170	DISARPUS
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase SKPD yang menerapkan penyelamatan dan pelestarian arsip sesuai ketentuan	Persen (%)	65%	65%	250,000,000	66%	252,500,000	67%	255,025,000	68%	257,575,250	69%	260,151,003	69%	1,275,251,253	DISARPUS
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana kearsipan	Persen (%)	70%	70%	62,000,000	71%	62,620,000	72%	63,246,200	73%	63,878,662	74%	64,517,449	74%	316,262,311	DISARPUS
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase SKPD yang menerapkan penyimpanan dan pengelolaan Arsip secara Baku	Persen (%)	65%	65%	26,000,000	66%	26,260,000	67%	26,522,600	68%	26,787,826	69%	27,055,704	69%	132,626,130	DISARPUS

URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN DAERAH																	
Program Pembinaan Administrasi Kecamatan/ Kelurahan	% terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan kelurahan	Persen (%)	80%	80%	180,000,000	82%	181,800,000	83%	183,618,000	84%	185,454,180	85%	187,308,722	85%	918,180,902	BAG. PEMERINTAHAN	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% terpenuhinya cakupan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH	Persen (%)	88%	88%	350,000,000	89%	353,500,000	90%	357,035,000	91%	360,605,350	92%	364,211,404	92%	1,785,351,754	BAG. PEMERINTAHAN	
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	% kerjasama antar pemerintah daerah	Persen (%)	72%	72%	350,000,000	73%	353,500,000	74%	357,035,000	75%	360,605,350	76%	364,211,404	76%	1,785,351,754	BAG. PEMERINTAHAN	
Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Daerah	Peringatan HUT Prov. Jawa Timur	Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Prov. Jawa Timur		95%	60,000,000	95%	60,600,000	95%	61,206,000	95%	61,818,060	95%	62,436,241	95%	306,060,301	BAG. PEMERINTAHAN	
Fasilitas Kegiatan Hari Ulang Tahun Daerah (Bantuan Keuangan Propinsi)	Peringatan HUT Prov. Jawa Timur dan kegiatan olah raga masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Peringatan HUT Prov. Jawa Timur dan Pelaksanaan Kegiatan olah raga		95%	50,000,000	95%	50,500,000	95%	51,005,000	95%	51,515,050	95%	52,030,201	95%	255,050,251	BAG. PEMERINTAHAN	
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Hubungan kerjasama antar daerah, pemerintah daerah dengan lembaga/ instansi pemerintah/ non pemerintah dll	Pelaksanaan kerjasama dengan APEKSI, Lembaga dan daerah lain		80%	242,500,000	80%	244,925,000	80%	247,374,250	80%	249,847,993	80%	252,346,472		1,236,993,715	BAG. PEMERINTAHAN	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	% terlaksananya monitoring tugu batas wilayah kota kediri dengan kabupaten kediri yang akurat	Persen (%)	90%	90%	270,000,000	91%	272,700,000	92%	275,427,000	93%	278,181,270	94%	280,963,083	94%	1,377,271,353	BAG. PEMERINTAHAN	
Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Rupa Bumi	Tersusunnya data nama-nama unsur rupa bumi di Kota Kediri	46 kelurahan	100%	100%	60,000,000	100%	60,600,000	100%	61,206,000	100%	61,818,060	100%	62,436,241	100%	306,060,301	BAG. PEMERINTAHAN	
Monitoring Batas Wilayah	Terpeliharanya titik koordinat patok batas daerah	Batas Wilayah		40 Batas Wilayah	50,000,000	40 Batas Wilayah	50,500,000	40 Batas Wilayah	51,005,000	40 Batas Wilayah	51,515,050	40 Batas Wilayah	52,030,201	40 Batas Wilayah	255,050,251	BAG. PEMERINTAHAN	
Penetapan Batas Wilayah Kelurahan	Tugu batas antar kelurahan yang akurat	Batas Wilayah		3 Kecamatan	160,000,000	3 Kecamatan									160,000,000	BAG. PEMERINTAHAN	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% terwujudnya peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan	Persen (%)	80%	80%	25,000,000	81%	25,250,000	82%	25,502,500	83%	25,757,525	84%	26,015,100	84%	127,525,125	BAG. PEMERINTAHAN	
Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya pelayanan di Kecamatan dengan melaksanakan evaluasi kinerja Kecamatan	Persen (%)	98%	98%	25,000,000	98%	25,250,000	98%	25,502,500	98%	25,757,525	98%	26,015,100	98%	127,525,125	BAG. PEMERINTAHAN	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	% Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Kelurahan Non PNS	Persen (%)	95%	95%	260,000,000	96%	262,600,000	97%	265,226,000	98%	267,878,260	99%	270,557,043	99%	1,326,261,303	BAG. PEMERINTAHAN	

Peningkatan fasilitasi Kesejahteraan Perangkat Kelurahan eks Perangkat Desa Non PNS	Meningkatnya kesejahteraan bagi perangkat kelurahan Non PNS di Kota Kediri	15 Kelurahan	98%	98%	267,500,000	98%	267,500,000	98%	267,500,000	98%	267,500,000	98%	267,500,000	98%	267,500,000	BAG. PEMERINTAHAN
KESEKRETARIATAN DPRD	Persentase aparatur pemerintahan kecamatan yang terbina						-		-		-		-		-	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	% peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen (%)	70%	80%	25,110,042,000	81%	25,361,142,420	82%	25,614,753,844	83%	25,870,901,383	84%	26,129,610,396	84%	128,086,450,043	SEKRETARIAT DPRD
Program Pembentukan Peraturan Daerah	% Perda Yang ditetapkan	Persen (%)	-	80%	13,000,000,000	81%	13,130,000,000	82%	13,261,300,000	83%	13,393,913,000	84%	13,527,852,130	84%		
PENGAWASAN							-		-		-		-		-	
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	% penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen (%)	90%	92%	155,000,000	95%	156,550,000	86%	158,115,500	100%	159,696,655	100%	161,293,622	100%	635,655,777	INSPEKTORAT
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	4,400,000,000	91%	4,444,000,000	92%	4,488,440,000	93%	4,533,324,400	94%	4,578,657,644	94%	22,444,422,044	DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	670,000,000	91%	676,700,000	92%	683,467,000	93%	690,301,670	94%	697,204,687	94%	3,417,673,357	DINAS PENDIDIKAN
Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen (%)	100%	100%	30,000,000	100%	30,300,000	100%	30,603,000	100%	30,909,030	100%	31,218,120	100%	153,030,150	DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini	- APK PAUD (%)	Persen (%)	98.99%	99%	4,197,000,000	100%	4,238,970,000	100%	4,281,359,700	101%	4,324,173,297	101%	4,367,415,030	101%	21,408,918,027	DINAS PENDIDIKAN
	- APK TK (%)	Persen (%)	100%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	Persen (%)	99.97%	100%	27,500,000,000	100%	27,775,000,000	100%	28,052,750,000	100%	28,333,277,500	100%	28,616,610,275	100%	140,277,637,775	DINAS PENDIDIKAN
	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf diatas 15 th	Persen (%)	100.00%	100%	8,000,000,000	100%	8,080,000,000	100%	8,160,800,000	100%	8,242,408,000	100%	8,324,832,080	100%	40,808,040,080	DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen (%)	89.00%	90%	3,600,000,000	91%	3,636,000,000	92%	3,672,360,000	93%	3,709,083,600	94%	3,746,174,436	99%	18,363,618,036	DINAS PENDIDIKAN
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	% pelayanan pendidikan kepada masyarakat	Persen (%)	100.00%	100%	5,300,000,000	100%	5,353,000,000	100%	5,406,530,000	100%	5,460,595,300	100%	5,515,201,253	100%	27,035,326,553	DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KEDIRI							-		-		-		-		-	
PENDIDIKAN							-		-		-		-		-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	340,000,000	91%	343,400,000	92%	346,834,000	93%	350,302,340	94%	353,805,363	94%	1,734,341,703	SMPN 1 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	12,000,000	91%	12,120,000	92%	12,241,200	93%	12,363,612	94%	12,487,248	94%	61,212,060	SMPN 1 KEDIRI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,500,000,000	100%	1,515,000,000	101%	1,530,150,000	101%	1,545,451,500	101%	1,560,906,015	101%	7,651,507,515	SMPN 1 KEDIRI
							-		-		-		-		-	

SMP NEGERI 2 KEDIRI																
PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	181,000,000	91%	182,810,000	92%	184,638,100	93%	186,484,481	94%	188,349,326	98%	923,281,907	SMPN 2 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	193,000,000	91%	194,930,000	92%	196,879,300	93%	198,848,093	94%	200,836,574	94%	984,493,967	SMPN 2 KEDIRI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,900,000,000	100%	1,919,000,000	101%	1,938,190,000	101%	1,957,571,900	101%	1,977,147,619	101%	9,691,909,519	SMPN 2 KEDIRI
SMP NEGERI 3 KEDIRI																
PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	356,000,000	91%	359,560,000	92%	363,155,600	93%	366,787,156	94%	370,455,028	94%	1,815,957,784	SMPN 3 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	41,600,000	91%	42,016,000	92%	42,436,160	93%	42,860,522	94%	43,289,127	94%	212,201,808	SMPN 3 KEDIRI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,550,000,000	100%	1,565,500,000	101%	1,581,155,000	101%	1,596,966,550	101%	1,612,936,216	101%	7,906,557,766	SMPN 3 KEDIRI
SMP NEGERI 4 KEDIRI																
PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	320,000,000	91%	323,200,000	92%	326,432,000	93%	329,696,320	94%	332,993,283	94%	1,632,321,603	SMPN 4 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%		91%		92%		93%		94%		94%		SMPN 4 KEDIRI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,640,000,000	100%	1,656,400,000	100%	1,672,964,000	100%	1,689,693,640	100%	1,706,590,576	100%	8,365,648,216	SMPN 4 KEDIRI
SMP NEGERI 5 KEDIRI																
PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	230,000,000	91%	232,300,000	92%	234,623,000	93%	236,969,230	94%	239,338,922	94%	1,173,231,152	SMPN 5 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	25,000,000	91%	25,250,000	92%	25,502,500	93%	25,757,525	94%	26,015,100	94%	127,525,125	SMPN 5 KEDIRI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,750,000,000	100%	1,767,500,000	100%	1,785,175,000	100%	1,803,026,750	100%	1,821,057,018	100%	8,926,758,768	SMPN 5 KEDIRI
SMP NEGERI 6 KEDIRI																
PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	265,000,000	91%	267,650,000	92%	270,326,500	93%	273,029,765	94%	275,760,063	94%	1,351,766,328	SMPN 6 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	90,000,000	91%	90,900,000	92%	91,809,000	93%	92,727,090	94%	93,654,361	94%	459,090,451	SMPN 6 KEDIRI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,600,000,000	100%	1,616,000,000	100%	1,632,160,000	100%	1,648,481,600	100%	1,664,966,416	100%	8,161,608,016	SMPN 6 KEDIRI
SMP NEGERI 7 KEDIRI																
PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	255,000,000	91%	257,550,000	92%	260,125,500	93%	262,726,755	94%	265,354,023	94%	1,300,756,278	SMPN 7 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	8,000,000	91%	8,080,000	92%	8,160,800	93%	8,242,408	94%	8,324,832	94%	40,808,040	SMPN 7 KEDIRI

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,650,000,000	100%	1,666,500,000	100%	1,683,165,000	100%	1,699,996,650	100%	1,716,996,617	100%	8,416,658,267	SMPN 7 KEDIRI
							-		-		-		-			
SMP NEGERI 8 KEDIRI																
PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen (%)	85%	90%	310,000,000	91%	313,100,000	92%	316,231,000	93%	319,393,310	94%	322,587,243	94%	1,581,311,553	SMPN 8 KEDIRI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	20,000,000	91%	20,200,000	92%	20,402,000	93%	20,606,020	94%	20,812,080	94%	102,020,100	SMPN 8 KEDIRI
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs/Paket B (%)	Persen (%)	99.97%	100%	1,670,000,000	100%	1,686,700,000	100%	1,703,567,000	100%	1,720,602,670	100%	1,737,808,697	100%	8,518,678,367	SMPN 8 KEDIRI
							-		-		-		-			
DINAS KESEHATAN																
KESEHATAN																
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	Persen (%)	90%	90%	280,000,000	92%	282,800,000	95%	285,628,000	95%	288,484,280	100%	291,369,123	100%	1,428,281,403	DINAS KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	2,685,000,000	92%	2,711,850,000	93%	2,738,968,500	94%	2,766,358,185	95%	2,794,021,767	95%	13,696,198,452	DINAS KESEHATAN
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	% Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang berfungsi baik	Persen (%)	80%	82%	800,000,000	83%	808,000,000	84%	816,080,000	85%	824,240,800	90%	832,483,208	90%	4,080,804,008	DINAS KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan Keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan keluarga	Persen (%)	75%	90%	8,400,000,000	91%	8,484,000,000	92%	8,568,840,000	95%	8,654,528,400	98%	8,741,073,684	98%	42,848,442,084	DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan jalinan kemitraan antar tenaga kesehatan dan peningkatan keprofesional bagi tenaga fungsional	Persen (%)	90%	90%	7,500,000,000	92%	7,575,000,000	94%	7,650,750,000	96%	7,727,257,500	98%	7,804,530,075	98%	38,257,537,575	DINAS KESEHATAN
Program Pembinaan lingkungan Sosial	% peningkatan derajat hidup kesehatan masyarakat	Persen (%)	80%	80%	16,179,538,888	80%	25,250,000,000	80%	27,000,000,000	80%	27,500,000,000	80%	28,000,000,000	80%	123,929,538,888	DINAS KESEHATAN
Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan	% peningkatan derajat hidup kesehatan masyarakat	Persen (%)	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persen (%)	80%	80%	2,500,000,000	82%	2,525,000,000	83%	2,550,250,000	85%	2,575,752,500	87%	2,601,510,025	87%	12,752,512,525	DINAS KESEHATAN
							-		-		-		-			
RSUD GAMBIRAN																
KESEHATAN																
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru	% Prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik	Persen (%)	85%	85%	-	85%	-	85%	-	85%	-	85%	-	85%		RSUD GAMBIRAN
Program Pembinaan lingkungan Sosial	% Sarana prasarana kesehatan rumah sakit yang berfungsi baik	Persen (%)	80%	85%	2,500,000,000	85%	3,030,000,000	85%	4,500,000,000	85%	6,500,000,000	85%	6,700,000,000	85%	23,230,000,000	RSUD GAMBIRAN
Program Pembinaan lingkungan Sosial bidang Kesehatan	% peningkatan derajat hidup kesehatan masyarakat	Persen (%)	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		

Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	99,000,000,000	92%	99,990,000,000	93%	100,989,900,000	94%	101,999,799,000	95%	103,019,796,990	95%	504,999,495,990	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN (BLUD)
PUSKESMAS MRICAN KESEHATAN							-		-		-		-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,363,000,000	92%	1,376,630,000	93%	1,390,396,300	94%	1,404,300,263	95%	1,418,343,266	95%	6,952,669,829	PUSKESMAS MRICAN
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat						-		-		-		-		-	PUSKESMAS MRICAN
PUSKESMAS CAMPUREJO KESEHATAN							-		-		-		-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,368,000,000	92%	1,381,680,000	78%	1,395,496,800	94%	1,409,451,768	95%	1,423,546,286	80%	6,978,174,854	PUSKESMAS CAMPUREJO
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat						-		-		-		-		-	PUSKESMAS CAMPUREJO
PUSKESMAS SUKORAME KESEHATAN							-		-		-		-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,495,000,000	92%	1,509,950,000	93%	1,525,049,500	94%	1,540,299,995	95%	1,555,702,995	95%	7,626,002,490	PUSKESMAS SUKORAME
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat						-		-		-		-		-	PUSKESMAS SUKORAME
PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KESEHATAN							-		-		-		-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	922,000,000	92%	931,220,000	93%	940,532,200	94%	949,937,522	95%	959,436,897	95%	4,703,126,619	PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat						-		-		-		-		-	PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA
PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN KESEHATAN							-		-		-		-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,089,000,000	92%	1,099,890,000	93%	1,110,888,900	94%	1,121,997,789	95%	1,133,217,767	95%	5,554,994,456	PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat						-		-		-		-		-	PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN
PUSKESMAS BALOWERTI KESEHATAN							-		-		-		-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,508,000,000	92%	1,523,080,000	93%	1,538,310,800	94%	1,553,693,908	95%	1,569,230,847	80%	7,692,315,555	PUSKESMAS BALOWERTI
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persen (%)					-		-		-		-		-	PUSKESMAS BALOWERTI
PUSKESMAS PESANTREN 1 KESEHATAN							-		-		-		-			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,168,000,000	92%	1,179,680,000	93%	1,191,476,800	94%	1,203,391,568	95%	1,215,425,484	95%	5,957,973,852	PUSKESMAS PESANTREN 1
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat						-		-		-		-		-	PUSKESMAS PESANTREN 1

PUSKESMAS PESANTREN 2								-		-		-						
KESEHATAN								-		-		-						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,443,000,000	92%	1,457,430,000	93%	1,472,004,300	94%	1,486,724,343	95%	1,501,591,586	95%	7,360,750,229	PUSKESMAS PESANTREN 2		
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat							-		-		-			-	PUSKESMAS PESANTREN 2		
PUSKESMAS NGLETIH								-		-		-						
KESEHATAN								-		-		-						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	90%	91%	1,157,000,000	92%	1,168,570,000	93%	1,180,255,700	94%	1,192,058,257	95%	1,203,978,840	95%	5,901,862,797	PUSKESMAS NGLETIH		
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat							-		-		-			-	PUSKESMAS NGLETIH		
Misi 3: Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan																		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif																	DPUPR (Pekerjaan Umum & Penataan)	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN								-		-		-						
PANGAN								-		-		-						
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Persen (%)	80%	90%	270,000,000	91%	272,700,000	92%	275,427,000	92%	278,181,270	93%	280,963,083	93%	1,377,271,353	DKPP		
Program Penganekaragaman Pangan dan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan	Persen (%)	88%	90%	330,000,000	91%	333,300,000	92%	336,633,000	92%	339,999,330	93%	343,399,323	93%	1,683,331,653	DKPP		
Program Kewaspadaan Pangan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen (%)	70%	80%	29,000,000	81%	29,290,000	82%	29,582,900	82%	29,878,729	83%	30,177,516	83%	147,929,145	DKPP		
Pengembangan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi)	Terlaksananya Pengembangan SKPG	Rapat Tim SKPG		4 kali	29,619,000	DKPP												
	Terlaksananya Pengembangan SKPG	Tinjauan Lapang/Investigasi														DKPP		
Pengumpulan Data Secara Dini Kondisi Pangan dan Gizi Masyarakat oleh Tim SKPG Kota Kediri	Terlaksananya Pengembangan SKPG	Data Kondisi Pangan		3 Kec		3 Kec		3 Kec		3 Kec		3 Kec		3 Kec		DKPP		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketahanan Pangan	% pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja lingkup ketahanan pangan	Persen (%)	90%	90%	180,000,000	91%	181,800,000	92%	183,618,000	93%	185,454,180	94%	187,308,722	94%	918,180,902	DKPP		
KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan (kw)	kw/ton	-	182 ton	191,745,000	182 ton	958,725,000	DKPP										
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tersedianya Bibit Ikan Unggul	Jumlah hasil pembibitan (ton)		182 ton	85,970,000	182 ton	85,970,000	DKPP										
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tersedianya Bibit Ikan Unggul	Jumlah pakan ikan starter dan finisher		1 ton		1 ton		1 ton		1 ton		1 ton		1 ton		1 ton	DKPP	
	Tersedianya Bibit Ikan Unggul	Telur gurami		170,000		170,000		170,000		170,000		170,000		170,000		170,000	DKPP	
	Tersedianya Bibit Ikan Unggul	Benih gurami		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000	DKPP	
	Tersedianya Bibit Ikan Unggul	Larva Koi		53,500		53,500		53,500		53,500		53,500		53,500		53,500	DKPP	
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya lomba masak serba ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur	Kali		1 kali	105,775,000	1 kali	105,775,000	DKPP										

	Terperuhnya pemberian hibah cacing sutera pada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		DKPP
	Terperuhnya hibah cacing sutera Pokdakan Karya Mina Kelurahan Ketami	orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		DKPP
Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita di Posyandu 3 Kecamatan	Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk balita di posyandu			1000 orang		DKPP										
	Terlaksananya lomba masak serba ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur	Kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		DKPP
	Terperuhnya pemberian hibah cacing sutera pada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	Jumlah galon		120		120		120		120		120		120		DKPP
	Terperuhnya hibah cacing sutera Pokdakan Karya Mina Kelurahan Ketami	Galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		
	Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk balita di posyandu	Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		
Hibah Cacing Sutera Kepada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	Terlaksananya lomba masak serba ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur	Galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		
Hibah Cacing Sutera Kepada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	Terperuhnya pemberian hibah cacing sutera pada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	Galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		
Hibah Cacing Sutera Kepada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	Terperuhnya pemberian hibah cacing sutera pada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	Galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		
	Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk balita di posyandu	Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		
	Terlaksananya lomba masak serba ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur	Kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
	Terperuhnya pemberian hibah cacing sutera pada Pokdakan Mitra Mina Mandiri Kelurahan Ketami	Galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		120 galon		

	Terpenuhinya hibah cacing sutera Pokdakan Karya Mina Kelurahan Ketami	Galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		90 galon		
	Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk balita di posyandu	Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Perikanan	% pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja lingkup perikanan	Persen (%)	80%	80%	70,000,000	81%	70,700,000	82%	71,407,000	83%	72,121,070	83%	72,842,281	83%	357,070,351	DKPP
PERTANIAN																
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	% Kelompok Tani yang dibina	Persen (%)	75%	75%	140,000,000	76%	141,400,000	80%	142,814,000	82%	144,242,140	83%	145,684,561	83%	714,140,701	DKPP
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	% kelompok Tani yang dibantu pemasarannya	Persen (%)	11%	11%	25,000,000	11%	25,250,000	50%	25,502,500	60%	25,757,525	70%	26,015,100	70%	127,525,125	DKPP
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	% kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi	Persen (%)	34%	34%	175,000,000	34%	176,750,000	48%	178,517,500	50%	180,302,675	56%	182,105,702	56%	892,675,877	DKPP
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman di lahan pertanian/perkebunan		1 tahun	50,390,000	Dinas Pertanian										
	Terlaksananya Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Gerakan pengendalian OPT		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		Dinas Pertanian
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu	Meningkatnya Upaya Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu di Lahan pertanian/perkebunan	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu di lahan Pertanian dan Perkebunan		5 klai	125,000,000	Dinas Pertanian										
Pendampingan Lahan Percontohan Budidaya Tanaman Sehat (BTS)	Meningkatnya Upaya Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu di Lahan pertanian/perkebunan	Kelompok		1 Klp		1 Klp		1 Klp		1 Klp		1 Klp		1 Klp		Dinas Pertanian
Workshop	Meningkatnya Upaya Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu di Lahan pertanian/perkebunan	Kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
Penanaman Bibit Bunga	Meningkatnya Upaya Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu di Lahan pertanian/perkebunan	Batang		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		Dinas Pertanian

Sosialisasi Pembenihan	Meningkatnya Upaya Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu di Lahan pertanian/perkebunan	Kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	produksi tanaman pangan padi (ton)	Persen (%)	13,483	13,483	352,000,000	13,483	355,520,000	13,483	359,075,200	13,483	362,665,952	13,483	366,292,612	13,483	1,795,553,764	DKPP
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya pembinaan sarana dan prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah petani		30 petani	195,282,950	Dinas Pertanian										
Pembinaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Terlaksananya pembangunan gudang dan ruang pertemuan Kelompok Tani "Tani Makmur " Kelurahan Tosaren	Jumlah petani		30 petani		30 petani		30 petani		30 petani		30 petani		30 petani		Dinas Pertanian
Pembangunan bangunan gudang dan ruang pertemuan Kelompok Tani " Tani Makmur" Kelurahan Tosaren	Terlaksananya pembinaan sarana dan prasarana Pertanian/Perkebunan	Paket		1 paket		1 paket										Dinas Pertanian
Pembangunan bangunan gudang dan ruang pertemuan Kelompok Tani " Tani Makmur" Kelurahan Tosaren	Terlaksananya pembangunan gudang dan ruang pertemuan Kelompok Tani "Tani Makmur " Kelurahan Tosaren	Paket		1 paket		1 paket										Dinas Pertanian
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pupuk, pestisida, sarana, prasarana dan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Poktan		62 poktan	54,895,600	Dinas Pertanian										
Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi	Data ubinan swakarsa	Poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		Dinas Pertanian
Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pupuk, pestisida, sarana, prasarana dan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kios		10 kios		10 kios		10 kios		10 kios		10 kios		10 kios		Dinas Pertanian
Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi	Data ubinan swakarsa	Kios		10 kios		10 kios		10 kios		10 kios		10 kios		10 kios		Dinas Pertanian
Pembinaan pengawasan dan pemantauan ubinan swakarsa	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pupuk, pestisida, sarana, prasarana dan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		62 poktan		Dinas Pertanian
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pengetahuan bidang pertanian , petugas, kelompok tani/masyarakat Kota Kediri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Kebun Edukasi Pertanian		5 paket	102,374,900	Dinas Pertanian										

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan kebun edukasi pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Kebun Edukasi Pertanian	Jumlah paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		Dinas Pertanian
Pelatihan bidang pertanian dan pengembangan kebun edukasi	Meningkatnya pengetahuan bidang pertanian, petugas, kelompok tani/masyarakat Kota Kediri	Jumlah Paket Bibit & Benih		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Dinas Pertanian
	Tersedianya bibit dan benih untuk pengembangan Kebun Edukasi Pertanian	Jumlah Paket Bibit & Benih		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Dinas Pertanian
	Tersedianya bibit untuk pemeliharaan kebun PKK mendukung Lomba	Jumlah Lomba Daerah		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Dinas Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang	% penyuluh yang mengikuti pelatihan	Persen (%)	100%	100%	120,000,000	100%	121,200,000	100%	122,412,000	100%	123,636,120	100%	124,872,481	100%	612,120,601	DKPP
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah Rapat Koordinasi, Penilaian Angka Kredit		12 kali	123,865,500	Dinas Pertanian										
	Tersusunnya Program Penyuluh Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian	Jumlah Rapat Koordinasi, Penilaian Angka Kredit		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		Dinas Pertanian
	Terpenuhinya pembekalan kemampuan teknis Penyuluhan Pertanian	Jumlah Rapat Koordinasi, Penilaian Angka Kredit		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		Dinas Pertanian
	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)	Jumlah Rapat Koordinasi, Penilaian Angka Kredit		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		Dinas Pertanian
	Terfasilitasinya Penyuluh Swadaya	Kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		Dinas Pertanian
	Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah Program Penyuluhan Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
	Tersusunnya Program Penyuluh Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian	Jumlah Program Penyuluhan Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		Dinas Pertanian
	Terpenuhinya pembekalan kemampuan teknis Penyuluhan Pertanian	Jumlah Program Penyuluhan Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		Dinas Pertanian

	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)	Jumlah Program Penyuluhan Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian		1 Kali	Dinas Pertanian										
	Terfasilitasinya Penyuluh Swadaya	Jumlah Program Penyuluhan Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian		1 Kali	Dinas Pertanian										
	Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah Pelatihan Teknis Penyuluhan Pertanian		6 Kali	Dinas Pertanian										
	Tersusunnya Programa Penyuluh Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelatihan Teknis Penyuluhan Pertanian		6 Kali	Dinas Pertanian										
	Terpenuhinya pembekalan kemampuan teknis Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelatihan Teknis Penyuluhan Pertanian		6 Kali	Dinas Pertanian										
	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)	Jumlah Pelatihan Teknis Penyuluhan Pertanian		6 Kali	Dinas Pertanian										
	Terfasilitasinya Penyuluh Swadaya	Jumlah Pelatihan Teknis Penyuluhan Pertanian		6 Kali	Dinas Pertanian										
	Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga Penyuluh Pertanian	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)		1 Bulan	Dinas Pertanian										
	Tersusunnya Programa Penyuluh Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)		1 Bulan	Dinas Pertanian										
	Terpenuhinya pembekalan kemampuan teknis Penyuluhan Pertanian	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)		1 Bulan	Dinas Pertanian										
	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)		1 Bulan	Dinas Pertanian										
	Terfasilitasinya Penyuluh Swadaya	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)		1 Bulan	Dinas Pertanian										
	Terfasilitasinya pemberdayaan tenaga Penyuluh Pertanian	Periode Fasilitasi Penyuluh Swadaya		12 Bulan	Dinas Pertanian										
	Tersusunnya Programa Penyuluh Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian	Periode Fasilitasi Penyuluh Swadaya		12 Bulan	Dinas Pertanian										

	Terpenuhinya pembekalan kemampuan teknis Penyuluh Pertanian	Periode Fasilitas Penyuluh Swadaya		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		Dinas Pertanian
	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak (THL-TB PP)	Periode Fasilitas Penyuluh Swadaya		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		Dinas Pertanian
	Terfasilitasinya Penyuluh Swadaya	Periode Fasilitas Penyuluh Swadaya		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	% menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak	Persen (%)	20%	20%	160,000,000	20%	161,600,000	20%	163,216,000	20%	164,848,160	20%	166,496,642	20%	816,160,802	Dinas Pertanian
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Lama Pelayanan Peternakan Terpadu		5 hari												
	Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Monitoring Pasar Hewan Qurban		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
	Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah kegiatan		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
	Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah obat-obatan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Dinas Pertanian
Pemeliharaan Kesehatan dan peningkatan sapras keswan dan kesmavet	Meningkatnya jumlah pasien yang tertangani	Banyaknya Belanja Operasional UPTD. Puskesmas		12 bulan	56,515,000	12 bulan	56,515,000	12 bulan	56,515,000	12 bulan	56,515,000	12 bulan	56,515,000	12 bulan	56,515,000	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	produksi hasil peternakan (kg)	Persen (%)	3028 kg	3028 kg	150,000,000	3028 kg	151,500,000	3028 kg	153,015,000	3028 kg	154,545,150	3028 kg	156,090,602	3028 kg	765,150,752	Dinas Pertanian
Pembibitan dan Perawatan Ternak	Meningkatnya populasi ternak demplot	Jumlah Pembinaan Kelompok Ternak		3 kali	110,493,000	3 kali	110,493,000	3 kali	110,493,000	3 kali	110,493,000	3 kali	110,493,000	3 kali	110,493,000	Dinas Pertanian
Pengembangan Agribisnis Peternakan	Meningkatnya populasi ternak demplot	Jumlah Monitoring Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha		1 Kali	41.640.000	1 kali	41.640.000	Dinas Pertanian								
	Meningkatnya keamanan produk asal hewan yang ASUH	Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		Dinas Pertanian
	Meningkatnya keamanan produk asal hewan yang ASUH	Pemeriksaan produk hasil peternakan		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		Dinas Pertanian
	Meningkatnya keamanan produk asal hewan yang ASUH	Pelatihan pengolahan susu kambing		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		Dinas Pertanian

	Meningkatnya keamanan produk asal hewan yang ASUH	Operasi Pasar Murah		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	pemasaran produksi hasil peternakan (kg)	Kg	1,479,194	1,479,194	140,000,000	1,479,194	141,400,000	1,479,194	142,814,000	1,479,194	144,242,140	1,479,194	145,684,561	1,479,194	714,140,701	DKPP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana RPH	Besarnya Belanja operasional UPT. Rumah Potong Hewan		12 bulan	143,258,000	Dinas pertanian										
Cetak Form Pemeriksaan	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana RPH	Lembar		500 Lembar		500 Lembar		500 Lembar		500 Lembar		500 Lembar		500 Lembar		Dinas pertanian
Pengadaan Timbangan Sapi Digital	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana RPH	Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Dinas pertanian
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana RPH	Unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		Dinas pertanian
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana RPH	Unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		Dinas pertanian
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pertanian	% pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja lingkup pertanian	Persen (%)	80%	80%	240,000,000	80%	242,400,000	80%	244,824,000	80%	247,272,240	80%	249,744,962	80%	1,224,241,202	DKPP
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Petani dan Pelaku Agribisnis (DBHCHT)	Meningkatkan kemampuan berwirausaha pada kelompok tani/wanita tani	Jumlah Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Pelaku Usaha		1 kali	64,511,000	Dinas Pertanian										
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Pelaku Usaha	Meningkatkan nilai jual dengan kemasan yang baik dan benar	Jumlah pelatihan		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
Pelatihan Teknis Kemasan yang baik/packaging kepada kelompok tani/kelompok wanita tani/pelaku usaha	Meningkatkan kemampuan berwirausaha pada kelompok tani/wanita tani	Jumlah pelatihan		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
Pelatihan Teknis Kemasan yang baik/packaging kepada kelompok tani/kelompok wanita tani/pelaku usaha	Meningkatkan nilai jual dengan kemasan yang baik dan benar	Jumlah pelatihan		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
Fasilitasi Promosi Produksi Pertanian / Perkebunan (DBHCHT)	Terkenalnya pameran hasil pertanian	Jumlah kegiatan promosi		2 paket	83,951,500	Dinas Pertanian										
	Menambah income pendapatan bagi kelompok binaan	Jumlah promosi hasil pertanian		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		Dinas Pertanian
Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap pelaku utama (petani, wanita tani kader pertanian)	Jumlah Pelatihan		6 kali	96,002,500	Dinas Pertanian										

Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Terpenuhinya ketrampilan masyarakat dalam pelatihan hidro Ponik	Jumlah Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)		6 Kali	Dinas Pertanian										
Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Kemudahan Penyampaian Informasi Tehnologi Pertanian Anjuran	Jumlah Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)		6 Kali	Dinas Pertanian										
Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Tergeraknya partisipasi petani dalam Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)		6 Kali	Dinas Pertanian										
Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap pelaku utama (petani, wanita tani kader pertanian)	Jumlah Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang		3 Unit	Dinas Pertanian										
Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang	Terpenuhinya ketrampilan masyarakat dalam pelatihan hidro Ponik	Jumlah Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang		3 Unit	Dinas Pertanian										
Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang	Kemudahan Penyampaian Informasi Tehnologi Pertanian Anjuran	Jumlah Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang		3 Unit	Dinas Pertanian										
Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang	Tergeraknya partisipasi petani dalam Peningkatan Produksi Pertanian	Pelatihan metode Penyuluhan Pertanian : Demplot, Temu lapang		3 Unit	Dinas Pertanian										
Pembinaan HIPPA	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap pelaku utama (petani, wanita tani kader pertanian)	Jumlah Pembinaan HIPPA		15 Kali	Dinas Pertanian										
Pembinaan HIPPA	Terpenuhinya ketrampilan masyarakat dalam pelatihan hidro Ponik	Jumlah Pembinaan HIPPA		15 Kali	Dinas Pertanian										
Pembinaan HIPPA	Kemudahan Penyampaian Informasi Tehnologi Pertanian Anjuran	Jumlah Pembinaan HIPPA		15 Kali	Dinas Pertanian										

Pembinaan HIPPA	Tergeraknya partisipasi petani dalam Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah Pembinaan HIPPA		15 Kali		15 Kali		15 Kali		15 Kali		15 Kali		15 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Hidro Ponik	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap pelaku utama (petani, wanita tani kader pertanian)	Jumlah Pelatihan Hidro Ponik		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Hidro Ponik	Terpenuhinya ketrampilan masyarakat dalam pelatihan hidro Ponik	Jumlah Pelatihan Hidro Ponik		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Hidro Ponik	Kemudahan Penyampaian Informasi Teknologi Pertanian Anjuran	Jumlah Pelatihan Hidro Ponik		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Hidro Ponik	Tergeraknya partisipasi petani dalam Peningkatan Produksi Pertanian	Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengolahan Tanaman Terpadu (SLPTT)		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengolahan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap pelaku utama (petani, wanita tani kader pertanian)	Jumlah Pelatihan		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengolahan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Terpenuhinya ketrampilan masyarakat dalam pelatihan hidro Ponik	Jumlah Pelatihan		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengolahan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Kemudahan Penyampaian Informasi Teknologi Pertanian Anjuran	Jumlah Pelatihan		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali	Dinas Pertanian	
Pelatihan Pertanian Sekolah Lapang Pengolahan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Tergeraknya partisipasi petani dalam Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah Pelatihan		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali	Dinas Pertanian	
Pembinaan dan Pelatihan Bagi Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan (DBHCHT)	Meningkatnya Budidaya dan Produksi Perikanan	Jumlah pelatihan		3 kali	72,937,000	2 kali	72,937,000	Dinas Pertanian								
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (DBHCHT)	Terlaksananya pembinaan, pelatihan, pendampingan di 16 Kelompok KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota	Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan Pengembangan Model KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota		16 klompok	182,598,000	Dinas Pertanian										

	Terlaksananya pembinaan, pelatihan, pendampingan di 16 Kelompok KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota	Pelatihan		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		Dinas Pertanian
	Terlaksananya pembinaan, pelatihan, pendampingan di 16 Kelompok KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota	Lomba KRPL		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
	Terlaksananya pembinaan, pelatihan, pendampingan di 16 Kelompok KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota	Rapat Koordinasi		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		Dinas Pertanian
	Terlaksananya pembinaan, pelatihan, pendampingan di 16 Kelompok KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota	Rapat tim juri		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		Dinas Pertanian
	Terlaksananya pembinaan, pelatihan, pendampingan di 16 Kelompok KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota	Pembinaan		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		Dinas Pertanian
	Terlaksananya pembinaan, pelatihan, pendampingan di 16 Kelompok KRPL dan Lomba KRPL Tingkat Kota	Temu lapang & Evaluasi KRPL		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		Dinas Pertanian
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA							-		-		-		-			
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							-		-		-		-			
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	% koperasi aktif	Persen (%)	75%	75%	1,000,000,000	76%	1,010,000,000	77%	1,020,100,000	78%	1,030,301,000	78%	1,040,604,010	78%	5,101,005,010	DINKOPUMTK
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %	200,000,000	80 %	200,000,000	80 %	200,000,000	80 %	200,000,000	80 %	200,000,000	80 %	200,000,000	DINKOPUMTK
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	DINKOPUMTK
Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %	430,000,000	80 %	430,000,000	80 %	430,000,000	80 %	430,000,000	80 %	430,000,000	80 %	430,000,000	DINKOPUMTK
	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINKOPUMTK
	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINKOPUMTK
	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINKOPUMTK
	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINKOPUMTK

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %	50,000,000	80 %	50,000,000	80 %	50,000,000	80 %	50,000,000	80 %	50,000,000	80 %	50,000,000	DINKOPUMTK
Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %	30,500,000	80 %	30,500,000	80 %	30,500,000	80 %	30,500,000	80 %	30,500,000	80 %	30,500,000	DINKOPUMTK
Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %	175,000,000	80 %	175,000,000	80 %	175,000,000	80 %	175,000,000	80 %	175,000,000	80 %	175,000,000	DINKOPUMTK
	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINKOPUMTK
	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINKOPUMTK
	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINKOPUMTK
Penilaian Kesehatan Koperasi	% koperasi sehat	Persen (%)		80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	80 %	100,000,000	DINKOPUMTK
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	% pelatihan tenaga kerja di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	Persen (%)	85.00%	86%	-	87%	-	88%	-	89%	-	89%	-	89%		DINKOPUMTK
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	Persen (%)	85.00%	86%	-	87%	-	88%	-	89%	-	89%	-	89%		DINKOPUMTK
Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	Persen (%)	4376 UM	5146 UM	1,100,000,000	4624 UM	1,111,000,000	6193 UM	1,122,110,000	6877 UM	1,133,331,100	7709 UM	1,144,664,411	7709 UM	5,611,105,511	DINKOPUMTK
Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi Masyarakat Calon Wirasaha Baru	Jumlah Masyarakat Calon Wirasaha Baru yang Menguasai Materi dalam Pelatihan Pembuatan Tas Rajut	Jumlah orang		30 orang	400,000,000	DINKOPUMTK										
	Jumlah Masyarakat Calon Wirasaha Baru yang Menguasai Materi Pelatihan Pembuatan Kue	Jumlah orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		DINKOPUMTK
	Jumlah Masyarakat Calon Wirasaha Baru yang Menguasai Materi Pelatihan Kokedama	Jumlah orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		DINKOPUMTK
	Jumlah Masyarakat Calon Wirasaha Baru yang Menguasai Materi Pelatihan Tata Boga	Jumlah orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		DINKOPUMTK
Peningkatan Pelayanan Klinik Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi konsultasi klinik/pendampingan	Jumlah orang		450 orang	224,000,000	DINKOPUMTK										
	Jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi konsultasi klinik/pendampingan	Jumlah orang		450 orang		450 orang		450 orang		450 orang		450 orang		450 orang		DINKOPUMTK
	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti shortcourse	Jumlah orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		DINKOPUMTK

	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti shortcourse	Jumlah orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		DINKOPUMTK
Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Menguasai Materi Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk	Jumlah orang		100 orang	300,000,000	DINKOPUMTK										
Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah Setra yang Difasilitasi Dalam Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah orang		2 Sentra	200,000,000	DINKOPUMTK										
Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan Usaha Mikro bagi Masyarakat Unit Pengelolaan dan Usaha	Jumlah anggota/pengurus UPKU yang lulus dalam pelatihan manajemen usaha	Jumlah orang		25 orang	40,000,000	DINKOPUMTK										
	Jumlah anggota/pengurus UPKU yang lulus pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		DINKOPUMTK
Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	Persen (%)	4376 UM	5146 UM	80,000,000	4624 UM	80,800,000	6193 UM	81,608,000	6877 UM	82,424,080	7709 UM	83,248,321	7709 UM	408,080,401	DINKOPUMTK
	Jumlah Wirausaha Baru	Persen (%)	400 WUB	1650 WUB		1650 WUB	-	1650 WUB		DINKOPUMTK						
Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Mikro	jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	50 orang	80,000,000	DINKOPUMTK
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro	Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	Persen (%)	216 UM	275 UM	1,440,000,000	320 UM	1,454,400,000	373 UM	1,468,944,000	440 UM	1,483,633,440	515 UM	1,498,469,774	515 UM	7,345,447,214	DINKOPUMTK
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyedia Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi penyediaan permodalan	Orang		300 orang	100,000,000	DINKOPUMTK										
	Jumlah jenis media sosialisasi penyertaan permodalan	Jenis Media		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		DINKOPUMTK
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro dan Koperasi	Jumlah pengakses dana bergulir yang di monev	pengakses		150 pengakses	250,000,000	DINKOPUMTK										
	Aplikasi program pengelolaan dagulir	aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		DINKOPUMTK
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti sosialisasi jaringan pemasaran produk	Orang		100 orang	150,000,000	DINKOPUMTK										
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam jaringan pemasaran produk melalui temu usaha	usaha mikro		25 usaha mikro		25 usaha mikro		25 usaha mikro		25 usaha mikro		25 usaha mikro		25 usaha mikro		DINKOPUMTK

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro dan Koperasi	Jumlah Produk Usaha Mikro yang Difasilitasi Promosi Melalui Pameran Lokal	produk		70 produk	940,000,000	DINKOPUMTK										
	Jumlah Produk Usaha Mikro yang Difasilitasi dalam Pameran Regional	produk		15 Produk		15 Produk		15 Produk		15 Produk		15 Produk		15 Produk		DINKOPUMTK
	Jumlah Produk Usaha Mikro yang Difasilitasi Dalam Pameran Nasional	produk		10 Produk		10 Produk		10 Produk		10 Produk		10 Produk		10 Produk		DINKOPUMTK
TENAGA KERJA																
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Persen (%)	40%	45%	300,000,000	46%	303,000,000	47%	306,030,000	48%	309,090,300	50%	312,181,203	50%	1,530,301,503	DINKOPUMTK
Pengendalian dan Pembinaan LPK	% Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	68 %	68 %	300,000,000.0	68 %	300,000,000.0	68 %	300,000,000.0	68 %	300,000,000.0	68 %	300,000,000.0	68 %	300,000,000.0	DINKOPUMTK
	% Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	68 %	68 %		68 %		68 %		68 %		68 %		68 %		DINKOPUMTK
	% Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	68 %	68 %		68 %		68 %		68 %		68 %		68 %		DINKOPUMTK
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	Persen (%)	8000	10,000	300,000,000	10,000	303,000,000	10,000	306,030,000	10,000	309,090,300	10,000	312,181,203	10,000	1,530,301,503	DINKOPUMTK
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	4 %	4 %	300,000,000	4 %	300,000,000	4 %	300,000,000	4 %	300,000,000	4 %	300,000,000	4 %	300,000,000	DINKOPUMTK
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)	Persen (%)	79%	79%	375,000,000	80%	378,750,000	85%	382,537,500	90%	386,362,875	95%	390,226,504	95%	1,912,876,879	DINKOPUMTK
	Persentase penyelesaian perselisihan pengusaha - pekerja	Persen (%)	40.00%	40%		40%	-	40%	-	40%	-	40%	-	40%		
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kinerja	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	DINKOPUMTK
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINKOPUMTK
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	DINKOPUMTK
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINKOPUMTK
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	DINKOPUMTK
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	Persen (%)	600	600	2,000,000,000	600	2,085,490,259	600	2,500,000,000	600	3,000,000,000	600	3,500,000,000	600	13,085,490,259	DINKOPUMTK

	Jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	Persen (%)	8000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000		
Binaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	% Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	3 %	1,000,000,000	3 %	1,000,000,000	3 %	1,000,000,000	3 %	1,000,000,000	3 %	1,000,000,000	3 %	1,000,000,000	3 %	1,000,000,000	DINKOPUMTK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	
PENANAMAN MODAL																	
Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	Persen (%)	90%	90%	800,000,000	92%	808,000,000	93%	816,080,000	95%	824,240,800	96%	832,483,208	96%	4,080,804,008	DPMPTSP	
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Kemudahan pelayanan yang dilaksanakan	90 %	186,777,500	90 %	186,777,500	90 %	186,777,500	90 %	186,777,500	90 %	186,777,500	90 %	186,777,500	90 %	186,777,500	DPMPTSP
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Jumlah pemohon izin yang dilayani	2800 Pemohon	396,693,400	2800 Pemohon	396,693,400	DPMPTSP										
Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Jumlah peserta sosialisasi penanaman modal	400 Orang	171,350,000	400 Orang	171,350,000	DPMPTSP										
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Penanganan Pengaduan	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Penyelesaian pengaduan masyarakat	90 %	9,715,000	90 %	9,715,000	90 %	9,715,000	90 %	9,715,000	90 %	9,715,000	90 %	9,715,000	90 %	9,715,000	DPMPTSP
Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Pengaduan	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Tersusunnya SOP Pelayanan Perizinan dan Pengaduan	100 %	35,200,000	100 %	35,200,000	100 %	35,200,000	100 %	35,200,000	100 %	35,200,000	100 %	35,200,000	100 %	35,200,000	DPMPTSP
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Persentase SDM yang berkualitas	85 %	1,000,000	85 %	1,000,000	85 %	1,000,000	85 %	1,000,000	85 %	1,000,000	85 %	1,000,000	85 %	1,000,000	DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	-	-	--	432,950,000	--	432,950,000	--	432,950,000	--	432,950,000	--	432,950,000	--	432,950,000	--	432,950,000	DPMPTSP
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah potensi yang diidentifikasi	15 Buah	82,800,000	15 Buah	82,800,000	DPMPTSP										
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah masukan kebijakan daerah terkait penanaman modal	1 Buah	133,800,000	1 Buah	133,800,000	DPMPTSP										
Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah potensi unggulan yang dipromosikan	2 Buah	104,700,000	2 Buah	104,700,000	DPMPTSP										
Penyelenggaraan Pameran Investasi	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah potensi daerah yang dipromosikan	3 Buah	111,650,000	3 Buah	111,650,000	DPMPTSP										
Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Teridentifikasinya peluang investasi daerah	Buah	1 buah	1 buah	400,000,000	1 buah	404,000,000	1 buah	408,040,000	1 buah	412,120,400	1 buah	416,241,604	5 buah	2,040,402,004	DPMPTSP	
Program Pengendalian Penanaman Modal	Cakupan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persen (%)	90%	90%	250,000,000	93%	252,500,000	94%	255,025,000	95%	257,575,250	96%	260,151,003	96%	1,275,251,253	DPMPTSP	

Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi investasi		192 kali	106,774,000	DPMPTSP										
Peningkatan Kegiatan Fasilitasi dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi investasi		36 kali	107,300,000	DPMPTSP										
Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi investasi		36 kali	41,985,000	DPMPTSP										
Program Optimalisasi Pemanfaatan Data Dan Teknologi Informasi	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam SIPM	Persen (%)	90%	90%	240,000,000	93%	242,400,000	94%	244,824,000	95%	247,272,240	96%	249,744,962	96%	1,224,241,202	DPMPTSP
Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi investasi		95 %	48,000,000	95 %	48,000,000	95 %	48,000,000	95 %	48,000,000	95 %	48,000,000	95 %	48,000,000	DPMPTSP
Pengelolaan Website dan Media Sosial	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi investasi		95 %	66,600,000	95 %	66,600,000	95 %	66,600,000	95 %	66,600,000	95 %	66,600,000	95 %	66,600,000	DPMPTSP
Pengelolaan Dokumen Perizinan	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi investasi		95 %	45,800,000	95 %	45,800,000	95 %	45,800,000	95 %	45,800,000	95 %	45,800,000	95 %	45,800,000	DPMPTSP
Pengolahan Data Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah realisasi investasi		95 %	84,850,000	95 %	84,850,000	95 %	84,850,000	95 %	84,850,000	95 %	84,850,000	95 %	84,850,000	DPMPTSP
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							-		-		-		-			
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							-		-		-		-			
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	% prestasi kepemudaan	Persen (%)	60%	85%	600,000,000	88%	606,000,000	90%	612,060,000	95%	618,180,600	99%	624,362,406	99%	3,060,603,006	DISBUDPARPO RA
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Mencetak Pemuda Kota Kediri yang mempunyai jiwa entrepreneur dan Peran serta Kota Kediri dalam Ajang Prestasi Kota Layak Pemuda	Jumlah Wirasahawan Pemuda Baru dan Profil Kota Layak Pemuda Kota Kediri		90%	648.900.000	90%	648.900.000	90%	648.900.000	90%	648.900.000	90%	648.900.000	90%	648.900.000	DISBUDPARPO RA
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Prestasi Pemuda	Jumlah Pemuda Kota Kediri, masyarakat Kota Kediri, dan Pelajar		90%	571.012.375	90%	571.012.375	90%	571.012.375	90%	571.012.375	90%	571.012.375	90%	571.012.375	DISBUDPARPO RA
Monitoring dan evaluasi hibah Daerah Kota Kediri	Berjalannya Pokmas,KNPI,Koni dan Pramuka secara baik	Persen (%)		100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	DISBUDPARPO RA
Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berprestasi	Prestasi Pemuda	Persen (%)		90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	DISBUDPARPO RA
Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemuda Kota Kediri yang berdaya saing	Persen (%)	90%	90%	500,000,000	92%	505,000,000	93%	510,050,000	94%	515,150,500	95%	520,302,005	95%	2,550,502,505	
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	% prestasi olahraga	Persen (%)	60%	97%	1,300,000,000	98%	1,313,000,000	98%	1,326,130,000	99%	1,339,391,300	100%	1,352,785,213	100%	6,631,306,513	DISBUDPARPO RA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	% sarana dan prasarana olah raga yang berfungsi dengan baik	Persen (%)	60%	86%	125,000,000	87%	126,250,000	87%	127,512,500	88%	128,787,625	88%	130,075,501	88%	637,625,626	DISBUDPARPO RA
KEBUDAYAAN							-		-		-		-			DISBUDPARPO RA
Program Pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya seni dan budaya daerah (%)	Persen (%)	85%	85%	375,000,000	86%	378,750,000	87%	382,537,500	87%	386,362,875	88%	390,226,504	88%	1,912,876,879	DISBUDPARPO RA

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pagelaran Seni budaya selomangleng	Kegiatan		96%	175,000,000	96%	175,000,000	96%	175,000,000	96%	175,000,000	96%	175,000,000	96%	175,000,000	DISBUDPARPO RA
	% benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen (%)	85%	85%	1,400,000,000	88%	1,414,000,000	90%	1,428,140,000	94%	1,442,421,400	96%	1,456,845,614	96%	7,141,407,014	DISBUDPARPO RA
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Sosialisai tentang kemajuan kebudayaan , peningkatan SDM budayawan	Meningkatnya Seni Budaya Kota Kediri		90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	DISBUDPARPO RA
	Terpeliharanya kekayaan budaya dan berkembangnya pariwisata budaya (%)	Persen (%)	80%	85%	800,000,000	86%	808,000,000		816,080,000	88%	824,240,800	90%	832,483,208	90%	4,080,804,008	DISBUDPARPO RA
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	% peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Persen (%)	70%	75%	350,000,000	80%	353,500,000	82%	357,035,000	86%	360,605,350	90%	364,211,404	90%	1,785,351,754	DISBUDPARPO RA
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	meningkatkan Budaya lokal daerah	Persen (%)		85%	35,000,000	85%	35,000,000	85%	35,000,000	85%	35,000,000	85%	35,000,000	85%	35,000,000	DISBUDPARPO RA
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah	Eskavasi Situs Klotok dan Museum	Persen (%)		95%	100,000,000	95%	100,000,000									
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	HUT Kota Kediri (Seni Islami, Night Carnival Pagelaran Musik, Pakaian Adat Manusk Sima, Labuh Bumi, Jaranan, Seni Tari Sajian Kesenian Harmony Fair)	Kunjungan wisatawan		96%	1,300,000,000	96%	1,300,000,000	96%	1,300,000,000	96%	1,300,000,000	96%	1,300,000,000	96%	1,300,000,000	DISBUDPARPO RA
Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	Perbaikan Museum	Persen (%)		96%	40,000,000	96%	40,000,000	96%	40,000,000	96%	40,000,000	96%	40,000,000	96%	40,000,000	DISBUDPARPO RA
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Festival Prov. Jatim, Pagelaran Hari Santri, Grebek Suro	Persen (%)		95%	350,000,000	95%	350,000,000	95%	350,000,000	95%	350,000,000	95%	350,000,000	95%	350,000,000	DISBUDPARPO RA
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Terseleenggaranya Pagelaran Seni Sambut Tamu, Pagelaran Jaranan, Pagelaran HUT Wahyu Krida Budaya	Persen (%)		95%	250,000,000	95%	250,000,000	95%	250,000,000	95%	250,000,000	95%	250,000,000	95%	250,000,000	DISBUDPARPO RA
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Pagelaran Seni Budaya Tradisional dan Modern, Pagelaran Seni Padang Bulan	Persen (%)		90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	90%	200,000,000	DISBUDPARPO RA
PARIWISATA																
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan	Persen (%)	91,571	102,000	1,000,000,000	107,000	1,010,000,000	112,000	1,020,100,000	117,000	1,030,301,000	122,000	1,040,604,010	122,000	5,101,005,010	DISBUDPARPO RA
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	City tour	Persen (%)	98%	98%	50,000,000	98%	50,000,000	98%	50,000,000	98%	50,000,000	98%	50,000,000	98%	50,000,000	DISBUDPARPO RA

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Pengiriman raka raki Jatim, Pemilihan Duta Wisata Panji Galuh, Festival makanan Khas, Pameran Pariwisata, Publikasi dan Milenial Medsos Tourism	Jumlah kunjungan wisatawan	96%	96%	1,000,000,000	96%	1,000,000,000	96%	1,000,000,000	96%	1,000,000,000	96%	1,000,000,000	96%	1,000,000,000	DISBUDPARPO RA
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% potensi obyek wisata yang berfungsi dengan baik	Persen (%)	75%	80%	185,000,000	83%	186,850,000	86%	188,718,500	88%	190,605,685	90%	192,511,742	90%	943,685,927	DISBUDPARPO RA
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pemeliharaan Selomangleng	Persen (%)		96%	185,000,000	96%	185,000,000	96%	185,000,000	96%	185,000,000	96%	185,000,000	96%	185,000,000	DISBUDPARPO RA
Program Pengembangan Kemitraan	% peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata	Persen (%)	70%	75%	250,000,000	78%	252,500,000	80%	255,025,000	82%	257,575,250	83%	260,151,003	83%	1,275,251,253	DISBUDPARPO RA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							-		-		-		-			
PERDAGANGAN							-		-		-		-			
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase penurunan kejadian kelangkaan barang	Persen (%)	60%	50%	410,000,000	45%	414,100,000	40%	418,241,000	35%	422,423,410	30%	426,647,644	30%	2,091,412,054	DISPERDAGIN
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik	Orang	500 orang	600 orang	50,000,000	800 orang	50,500,000	1000 orang	51,005,000	1200 orang	51,515,050	1400 orang	52,030,201	1400 orang	255,050,251	
Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor Perdagangan non tembakau (Milyar Rupiah)	Rp	16309.54	1850000%	450,000,000	#####	454,500,000	2345000%	459,045,000	#####	463,635,450	2750000%	468,271,805	2750000%	2,295,452,255	DISPERDAGIN
Program Pembinaan dan Pengembangan Kemetorologian Daerah	Prosentase pelayanan tera/tera ulang	Persen (%)	84%	85%	460,000,000	86%	464,600,000	87%	469,246,000	88%	473,938,460	89%	478,677,845	89%	2,346,462,305	DISPERDAGIN
Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Perdagangan	% Pelaku Usaha yang terbina	Persen (%)	25.26%	0%		26%	-	28%	-	31%	-	33%	-	33%	-	DISPERDAGIN
PERINDUSTRIAN							-		-		-		-			
Program Pengembangan Sumber Daya Industri	Prosentase industri pengguna TTG	Persen (%)	30%	31%	230,000,000	32%	232,300,000	32%	234,623,000	33%	236,969,230	34%	239,338,922	34%	1,173,231,152	DISPERDAGIN
Program Pemberdayaan Industri	Jumlah Sentra Industri	Sentra	44 Sentra	45 Sentra	100,000,000	45 Sentra	101,000,000	46 Sentra	102,010,000	46 Sentra	103,030,100	47 Sentra	104,060,401	47 Sentra	510,100,501	DISPERDAGIN
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	% IKM yang memenuhi standar	Persen (%)	25%	26%	160,000,000	27%	161,600,000	28%	163,216,000	29%	164,848,160	30%	166,496,642	30%	816,160,802	DISPERDAGIN
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif	Unit	1134 Unit	1239 unit	1,050,000,000	1289 Unit	1,060,500,000	1344 Unit	1,071,105,000	1394 Unit	1,081,816,050	1439 Unit	1,092,634,211	1439 Unit	5,356,055,261	DISPERDAGIN
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Prosentase IKM yang terbina	IKM	0.26799387	30%	280,000,000	32%	282,800,000	34%	285,628,000	37%	288,484,280	40%	291,369,123	40%	1,428,281,403	DISPERDAGIN
Program Pembinaan Industri	Prosentase IHT yang terbina	Persen (%)	100%	100%	20,000,000	100%	20,200,000	100%	20,402,000	100%	20,606,020	100%	20,812,080	100%	102,020,100	DISPERDAGIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							-		-		-		-			
PERENCANAAN							-		-		-		-			
Program Pengembangan Data/Informasi	Prosentase ketersediaan dokumen data/informasi untuk perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah	Persen (%)	80%	80%	350,000,000	82%	353,500,000	84%	357,035,000	86%	360,605,350	88%	364,211,404	88%	1,785,351,754	BARENLITBANG

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Prosentase terwujudnya kebijakan dalam pengembangan kota berbasis lingkungan	Persen (%)	92%	92%	900,000,000	93%	909,000,000	95%	918,090,000	97%	927,270,900	98%	936,543,609	98%	4,590,904,509	BARENLITBANG
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA tepat waktu	Persen (%)	75%	79%	1,900,000,000	80%	1,919,000,000	84%	1,938,190,000	85%	1,957,571,900	90%	1,977,147,619	90%	9,691,909,519	BARENLITBANG
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	% sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi	Persen (%)	77%	79%	400,000,000	80%	404,000,000	83%	408,040,000	83%	412,120,400	92%	416,241,604	92%	2,040,402,004	BARENLITBANG
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	% sinkronisasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Persen (%)	90%	90%	700,000,000	91%	707,000,000	92%	714,070,000	93%	721,210,700	94%	728,422,807	94%	3,570,703,507	BARENLITBANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							-		-		-		-			
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	Persen (%)	80%	80%	1,800,000,000	81%	1,818,000,000	82%	1,836,180,000	83%	1,854,541,800	84%	1,873,087,218	84%	9,181,809,018	BARENLITBANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							-		-		-		-			BAG. PEMERINTAHAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	% peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	Persen (%)	85%	85%	1,000,000,000	86%	1,010,000,000	87%	1,020,100,000	88%	1,030,301,000	89%	1,040,604,010	89%	5,101,005,010	BAG. PEMERINTAHAN
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kader		100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	750,000,000	
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya penguatan SDM LKK	Jumlah LKK	-	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	375,000,000	
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya bulan Gotong Royong	Kelurahan		100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000	Pemerintah
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Forum LPMK dan Forum RT/RW	2 Pembinaan Forum LPMK, Pembinaan Forum RT/RW		100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	BARENLITBANG
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	BARENLITBANG
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	% peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen (%)	80%	80%	160,000,000	81%	161,600,000	82%	163,216,000	83%	164,848,160	84%	166,496,642	84%	816,160,802	BAG. PEMERINTAHAN
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		80%	160,000,000	81%	161,600,000	82%	163,216,000	83%	164,848,160	84%	166,496,642	84%	816,160,802	BAG. PEMERINTAHAN
Program Fasilitasi Prodamas	Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS)	Persen (%)	87%	87%	800,000,000	88%	808,000,000	89%	816,080,000	90%	824,240,800	91%	832,483,208	91%	4,080,804,008	BAG. PEMERINTAHAN

Fasilitasi Prodama	Meningkatnya keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodama) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	4 program Prodama di Kediri	0%	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	% peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen (%)	80%	80%		86%		87%		88%		89%		89%	1,090,000,000	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	Kader Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya penguatan SDM LKK	Jumlah Anggota LKK		100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	2 Lomba Gotong Royong, Pencanaan dan BBGRM		200%	200,000,000	200%	200,000,000	200%	200,000,000	200%	200,000,000	200%	200,000,000	200%	200,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Forum LPMK dan Forum RT/RW	LPMK, RT, RW sekota Kediri		100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Profil Kelurahan		100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas bagi Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Prodama	46 kelurahan		100%	420,000,000	100%	420,000,000	100%	420,000,000	100%	420,000,000	100%	420,000,000	100%	420,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Monografi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya evaluasi hasil update data Sistem Informasi Manajemen Monografi Pemberdayaan Masyarakat	46 Kelurahan														
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	Aparatur Pemerintah		100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	BAG. PEMERINTAHAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	% peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen (%)	80%	80%		81%		82%		83%		84%		84%		
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		80%	160,000,000	81%	161,600,000	82%	163,216,000	83%	164,848,160	84%	166,496,642	84%	816,160,802	BAG. PEMERINTAHAN

BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN									-								
KESEKRETARIATAN DAERAH									-								
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	% sinergi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian daerah	Persen (%)	60%	70%	280,000,000	75%	282,800,000	80%	285,628,000	85%	288,484,280	90%	291,369,123	65%	1,428,281,403		BAG. ADM. PEREKONOMIAN
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Lokal	Meningkatnya tingkat literasi dan inklusi akses keuangan masyarakat	Persen (%)	-	50%	100,000,000	50%	100,000,000							100%	200,000,000		BAG. ADM. PEREKONOMIAN
Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Peningkatan Kinerja BUMD	Persen (%)	33%	33%	230,000,000	67%	232,300,000	67%	234,623,000	100%	236,969,230	100%	239,338,922	79%	1,173,231,152		BAG. ADM. PEREKONOMIAN
Koordinasi Peningkatan Kapasitas BUMD	Peningkatan kinerja BUMD	Jumlah BUMD		300%	232,594,000	300%	232,594,000	300%	232,594,000	300%	232,594,000	300%	232,594,000	1500%	1,162,970,000		
Fasilitasi Pengelolaan DBHCHT	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Jumlah OPD	-	10 OPD Pengelola DBHCHT	127,700,000		BAG. ADM. PEREKONOMIAN										
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (Dana DBHCHT)	Informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang cukai hasil tembakau ilegal	%	-	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00		BAG. ADM. PEREKONOMIAN
Peningkatan Pelaksanaan Promosi Potensi dan Produk Unggulan	Pameran dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur	Kali	%	100%	189.706.000,00	100%	189.706.000,00	100%	189.706.000,00	100%	189.706.000,00	100%	189.706.000,00	100%	189.706.000,00		BAG. ADM. PEREKONOMIAN
Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas bagi Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Prodamas	Kelurahan	-	46 Kelurahan	420,000,000		BAG. ADM. PEREKONOMIAN										
KECAMATAN MOJOROTO																	
PEMERINTAHAN UMUM																	
Program Peningkatan Pelayanan Prima	IKM Kecamatan	Persen (%)	82.20	8300%	65,000,000	8400%	65,650,000	8500%	66,306,500	8600%	66,969,565	8700%	67,639,261	8700%	331,565,326		KEC. MOJOROTO
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Persen (%)	90.00%	91%	1,100,000,000	92%	1,111,000,000	93%	1,122,110,000	94%	1,133,331,100	95%	1,144,664,411	95%	5,611,105,511		KEC. MOJOROTO
Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Persen (%)	90.00%	90%	-	92%	-	93%	-	94%	-	95%	-	95%	-		
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	IKM Kecamatan	Persen (%)	82.20	8300%		8400%		8500%		8600%		8700%		8700%			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen (%)	85.00%	87%		88%		89%		90%		91%		91%			
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	% Jumlah Kader	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000		
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000		Bagian Pemerintahan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Forum LPMK dan Forum RT/RW	Persen (%)	-	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000		Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Persen (%)	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000		Bagian Pemerintahan

Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas bagi Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Prodama	Persen (%)	-	46 Kelurahan	420,000,000											
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	BARENLITBANG
KELURAHAN BANDAR LOR																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	55,000,000	90%	55,550,000	92%	56,105,500	93%	56,666,555	94%	57,233,221	95%	280,555,276	KEL. BANDAR LOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Lor	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85.00%	87%	4,200,000,000	88%	4,200,000,000	89%	4,200,000,000	90%	4,200,000,000	91%	4,200,000,000	91%	21,000,000,000	KEL. BANDAR LOR
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	468,000,000	88%	472,680,000	89%	477,406,800	90%	482,180,868	91%	487,002,677	91%	2,387,270,345	KEL. BANDAR LOR
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya penguatan SDM LKK	Jumlah Pembinaan	1 kali	1 kali	75,000,000	1 kali	75,000,000	1 kali	75,000,000	1 kali	75,000,000	1 kali	75,000,000	500%	375,000,000	KEL. BANDAR LOR
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	BARENLITBANG
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Bandar Lor/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN BANDAR KIDUL																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	170,000,000	90%	171,700,000	92%	173,417,000	93%	175,151,170	95%	176,902,682	95%	867,170,852	KEL. BANDAR KIDUL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85.00%	87%	4,100,000,000	88%	4,100,000,000	89%	4,100,000,000	90%	4,100,000,000	91%	4,100,000,000	91%	20,500,000,000	KEL. BANDAR KIDUL
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	430,000,000	88%	434,300,000	89%	438,643,000	90%	443,029,430	91%	447,459,724	91%	2,193,432,154	KEL. BANDAR KIDUL/ Barenlitbang
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Bandar Kidul/ Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Bandar Kidul/ Bagian Pemerintahan

KELURAHAN BANJARMLATI																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	65,600,000	90%	66,256,000	92%	66,918,560	93%	67,587,746	94%	68,263,623	94%	334,625,929	KEL. BANJARMLATI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarmati	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85.00%	87%	3,400,000,000	88%	3,400,000,000	89%	3,400,000,000	90%	3,400,000,000	91%	3,400,000,000	91%	17,000,000,000	KEL. BANJARMLATI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	357,000,000	88%	360,570,000	89%	364,175,700	90%	367,817,457	91%	371,495,632	91%	1,821,058,789	KEL. BANJARMLATI
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Banjarmati /Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Banjarmati/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN POJOK																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	253,340,000	90%	255,873,400	92%	258,432,134	93%	261,016,455	94%	263,626,620	94%	1,292,288,609	KEL. POJOK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pojok	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85.00%	87%	4,900,000,000	88%	4,900,000,000	89%	4,900,000,000	90%	4,900,000,000	91%	4,900,000,000	91%	24,500,000,000	KEL. POJOK
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	416,000,000	88%	420,160,000	89%	424,361,600	90%	428,605,216	91%	432,891,268	91%	2,122,018,084	KEL. POJOK
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Pojok / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Pojok/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN SUKORAME																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	441,000,000	90%	445,410,000	92%	449,864,100	93%	454,362,741	94%	458,906,368	94%	2,249,543,209	KEL. SUKORAME
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukorame	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85.00%	87%	3,700,000,000	88%	3,700,000,000	89%	3,700,000,000	90%	3,700,000,000	91%	3,700,000,000	91%	18,500,000,000	KEL. SUKORAME
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	362,000,000	88%	365,620,000	89%	369,276,200	90%	372,968,962	91%	376,698,652	91%	1,846,563,814	KEL. SUKORAME

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Sukarame / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Sukarame/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN BUJEL																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	231,000,000	90%	233,310,000	92%	235,643,100	93%	237,999,531	94%	240,379,526	94%	1,178,332,157	KEL. BUJEL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bujel	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85.00%	87%	3,500,000,000	88%	3,500,000,000	89%	3,500,000,000	90%	3,500,000,000	91%	3,500,000,000	91%	17,500,000,000	KEL. BUJEL
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	348,000,000	88%	351,480,000	89%	354,994,800	90%	358,544,748	91%	362,130,195	91%	1,775,149,743	KEL. BUJEL
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Bujel / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Bujel/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN GAYAM																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	136,000,000	90%	137,360,000	92%	138,733,600	93%	140,120,936	94%	141,522,145	94%	693,736,681	KEL. GAYAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85.00%	87%	3,100,000,000	88%	3,100,000,000	89%	3,100,000,000	90%	3,100,000,000	91%	3,100,000,000	91%	15,500,000,000	KEL. GAYAM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	297,000,000	88%	299,970,000	89%	302,969,700	90%	305,999,397	91%	309,059,391	91%	1,514,998,488	KEL. GAYAM
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Gayam / Kel Mrican / Barenlitbang
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	410,000,000	88%	414,100,000	89%	418,241,000	90%	422,423,410	91%	426,647,644	91%	2,091,412,054	KEL. MRICAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Mrican / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Gayam/ Bagian Pemerintahan

KELURAHAN DERMO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	88.00%	88%	224,000,000	90%	226,240,000	92%	228,502,400	93%	230,787,424	94%	233,095,298	94%	1,142,625,122	KEL. DERMO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	2,500,000,000	88%	2,500,000,000	85%	2,500,000,000	90%	2,500,000,000	91%	2,500,000,000	91%	12,500,000,000	KEL. DERMO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	260,000,000	88%	262,600,000	89%	265,226,000	90%	267,878,260	91%	270,557,043	91%	1,326,261,303	KEL. DERMO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Dermo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Dermo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN NGAMPEL																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	88.00%	88%	99,000,000	90%	99,990,000	92%	100,989,900	93%	101,999,799	94%	103,019,797	94%	504,999,496	KEL. NGAMPEL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampel	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	2,900,000,000	88%	2,900,000,000	89%	2,900,000,000	90%	2,900,000,000	91%	2,900,000,000	91%	14,500,000,000	KEL. NGAMPEL
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	80%	320,000,000	88%	323,200,000	89%	326,432,000	90%	329,696,320	91%	332,993,283	91%	1,632,321,603	KEL. NGAMPEL
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Ngampel / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Ngampel/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN MOJOROTO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	88.00%	88%	250,000,000	90%	252,500,000	92%	255,025,000	93%	257,575,250	94%	260,151,003	94%	1,275,251,253	KEL. MOJOROTO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojoroto	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	5,400,000,000	88%	5,400,000,000	89%	5,400,000,000	90%	5,400,000,000	91%	5,400,000,000	91%	27,000,000,000	KEL. MOJOROTO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	560,000,000	88%	565,600,000	89%	571,256,000	90%	576,968,560	91%	582,738,246	91%	2,856,562,806	Bagian Pemerintahan KEL. MOJOROTO

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Mojoroto / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Mojoroto/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN CAMPUREJO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	250,000,000	90%	252,500,000	92%	255,025,000	93%	257,575,250	94%	260,151,003	94%	1,275,251,253	KEL. CAMPUREJO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campurejo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	2,900,000,000	88%	2,900,000,000	89%	2,900,000,000	90%	2,900,000,000	91%	2,900,000,000	91%	14,500,000,000	KEL. CAMPUREJO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	260,000,000	88%	262,600,000	89%	265,226,000	90%	267,878,260	91%	270,557,043	91%	1,326,261,303	KEL. CAMPUREJO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Campurejo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Campurejo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN LIRBOYO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	300,000,000	90%	303,000,000	92%	306,030,000	93%	309,090,300	94%	312,181,203	94%	1,530,301,503	KEL. LIRBOYO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lirboyo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	2,800,000,000	88%	2,800,000,000	89%	2,800,000,000	90%	2,800,000,000	91%	2,800,000,000	91%	14,000,000,000	KEL. LIRBOYO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	340,000,000	88%	343,400,000	89%	346,834,000	90%	350,302,340	91%	353,805,363	91%	1,734,341,703	KEL. LIRBOYO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Lirboyo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Lirboyo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN TAMANAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	160,000,000	90%	161,600,000	92%	163,216,000	93%	164,848,160	94%	166,496,642	94%	816,160,802	KEL. TAMANAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	2,300,000,000	88%	2,300,000,000	89%	2,300,000,000	90%	2,300,000,000	91%	2,300,000,000	91%	11,500,000,000	KEL. TAMANAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	240,000,000	88%	242,400,000	89%	244,824,000	90%	247,272,240	91%	249,744,962	91%	1,224,241,202	KEL. TAMANAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Tamanan / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Tamanan/ Bagian Pemerintahan
KECAMATAN KOTA																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Peningkatan Pelayanan Prima	IKM Kecamatan	Persen (%)	49.48	7500%	53,500,000	8000%	54,035,000	8500%	54,575,350	9000%	55,121,104	9000%	55,672,315	9000%	272,903,768	KEC. KOTA
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Persen (%)	90.00%	95%	1,168,411,000	95%	1,180,095,110	95%	1,191,896,061	95%	1,203,815,022	95%	1,215,853,172	95%	5,960,070,365	KEC. KOTA
Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Persen (%)	90.00%	90%	80,000,000	92%	80,800,000	93%	81,608,000	94%	82,424,080	95%	83,248,321	95%	408,080,401	
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	IKM Kecamatan	Persen (%)	49.48	7500%		8000%		8500%		9000%		9000%		9000%		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		85.00%	87%		88%		89%		90%		91%		91%		
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Kota/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN SEMAMPIR																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	85.00%	90%	300,000,000	92%	303,000,000	94%	306,030,000	96%	309,090,300	98%	312,181,203	98%	1,530,301,503	KEL. SEMAMPIR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semampir	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	3,000,000,000	88%	3,000,000,000	89%	3,000,000,000	90%	3,000,000,000	91%	3,000,000,000	91%	15,000,000,000	KEL. SEMAMPIR
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	310,000,000	88%	313,100,000	89%	316,231,000	90%	319,393,310	91%	322,587,243	91%	1,581,311,553	KEL. SEMAMPIR
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Semampir / Barenlitbang

Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Semampir/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN BALOWERTI																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	101,000,000	90%	102,010,000	92%	103,030,100	93%	104,060,401	94%	105,101,005	94%	515,201,506	KEL. BALOWERTI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balowerti	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	3,000,000,000	88%	3,000,000,000	89%	3,000,000,000	90%	3,000,000,000	91%	3,000,000,000	91%	15,000,000,000	KEL. BALOWERTI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	340,000,000	88%	343,400,000	89%	346,834,000	90%	350,302,340	91%	353,805,363	91%	1,734,341,703	KEL. BALOWERTI
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Balowerti / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Balowerti/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN DANDANGAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	160,000,000	90%	161,600,000	92%	163,216,000	93%	164,848,160	95%	166,496,642	95%	816,160,802	KEL. DANDANGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dandangan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	5,300,000,000	88%	5,300,000,000	89%	5,300,000,000	90%	5,300,000,000	91%	5,300,000,000	91%	26,500,000,000	KEL. DANDANGAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	640,000,000	88%	646,400,000	89%	652,864,000	90%	659,392,640	91%	665,986,566	91%	3,264,643,206	KEL. DANDANGAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Dandangan / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Dandangan/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN NGADIREJO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	85.00%	90%	200,000,000	92%	202,000,000	94%	204,020,000	96%	206,060,200	98%	208,120,802	98%	1,020,201,002	KEL. NGADIREJO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngadirejo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	5,700,000,000	88%	5,700,000,000	89%	5,700,000,000	90%	5,700,000,000	91%	5,700,000,000	91%	28,500,000,000	KEL. NGADIREJO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	600,000,000	88%	606,000,000	89%	612,060,000	90%	618,180,600	91%	624,362,406	91%	3,060,603,006	KEL. NGADIREJO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Gadingrejo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Ngadirejo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN BANJARAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	190,000,000	90%	191,900,000	92%	193,819,000	93%	195,757,190	94%	197,714,762	94%	969,190,952	KEL. BANJARAN
URUSAN WAJIB																
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjaran	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	4,900,000,000	88%	4,900,000,000	89%	4,900,000,000	90%	4,900,000,000	91%	4,900,000,000	91%	24,500,000,000	KEL. BANJARAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	530,000,000	88%	535,300,000	89%	540,653,000	90%	546,059,530	91%	551,520,125	91%	2,703,532,655	KEL. BANJARAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Banjaran / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Banjaran/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN KALIOMBO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	240,000,000	90%	242,400,000	92%	244,824,000	93%	247,272,240	94%	249,744,962	95%	1,224,241,202	KEL. KALIOMBO
URUSAN WAJIB																
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliombo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	4,700,000,000	88%	4,700,000,000	89%	4,700,000,000	90%	4,700,000,000	91%	4,700,000,000	91%	23,500,000,000	KEL. KALIOMBO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	390,000,000	88%	393,900,000	89%	397,839,000	90%	401,817,390	91%	405,835,564	91%	1,989,391,954	KEL. KALIOMBO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Kaliombo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Kaliombo/ Bagian Pemerintahan

KELURAHAN NGRONGGO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	270,000,000	90%	272,700,000	92%	275,427,000	93%	278,181,270	94%	280,963,083	95%	1,377,271,353	KEL. NGRONGGO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngronggo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	7,100,000,000	88%	7,100,000,000	89%	7,100,000,000	90%	7,100,000,000	91%	7,100,000,000	91%	35,500,000,000	KEL. NGRONGGO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	650,000,000	88%	656,500,000	89%	663,065,000	90%	669,695,650	91%	676,392,607	91%	3,315,653,257	KEL. NGRONGGO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Ngronggo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Ngronggo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN MANISRENGGO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	56,000,000	90%	56,560,000	92%	57,125,600	93%	57,696,856	94%	58,273,825	95%	285,656,281	KEL. MANISRENGGO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrenggo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	3,200,000,000	83%	3,200,000,000	89%	3,200,000,000	90%	3,200,000,000	91%	3,200,000,000	91%	16,000,000,000	KEL. MANISRENGGO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	610,000,000	88%	616,100,000	89%	622,261,000	90%	628,483,610	91%	634,768,446	91%	3,111,613,056	KEL. MANISRENGGO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Srenggo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Manis Renggo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN REJOMULYO																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	39,000,000	90%	39,390,000	92%	39,783,900	93%	40,181,739	94%	40,583,556	94%	198,939,195	KEL. REJOMULYO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	2,400,000,000	88%	2,400,000,000	89%	2,400,000,000	90%	2,400,000,000	91%	2,400,000,000	91%	12,000,000,000	KEL. REJOMULYO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	280,000,000	88%	282,800,000	89%	285,628,000	90%	288,484,280	91%	291,369,123	91%	1,428,281,403	KEL. REJOMULYO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Rejomulyo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Rejomulyo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN KEMASAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	46,000,000	90%	46,460,000	92%	46,924,600	93%	47,393,846	93%	47,867,784	93%	234,646,230	KEL. KEMASAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemas	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	800,000,000	88%	800,000,000	89%	800,000,000	90%	800,000,000	91%	800,000,000	91%	4,000,000,000	KEL. KEMASAN
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	200,000,000	88%	202,000,000	89%	204,020,000	90%	206,060,200	91%	208,120,802	91%	1,020,201,002	KEL. KEMASAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Kemas / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Kemas/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN POCANAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	90,000,000	90%	90,900,000	92%	91,809,000	93%	92,727,090	94%	93,654,361	94%	459,090,451	KEL. POCANAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pocanan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	900,000,000	88%	900,000,000	89%	900,000,000	90%	900,000,000	91%	900,000,000	91%	4,500,000,000	KEL. POCANAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	240,000,000	88%	242,400,000	89%	244,824,000	90%	247,272,240	91%	249,744,962	91%	1,249,744,962	Bagian Pemerintahan
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Pocanan / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Pocanan/ Bagian Pemerintahan

KELURAHAN RINGINANOM																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	130,000,000	90%	131,300,000	92%	132,613,000	93%	133,939,130	94%	135,278,521	94%	663,130,651	KEL. RINGINANOM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ringinanom	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	700,000,000	88%	700,000,000	89%	700,000,000	90%	700,000,000	91%	700,000,000	91%	3,500,000,000	KEL. RINGINANOM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	240,000,000	88%	242,400,000	89%	244,824,000	90%	247,272,240	91%	249,744,962	91%	1,224,241,202	KEL. RINGINANOM
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Ringinanom / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Ringinanom/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN KAMPUNGDALEM																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	200,000,000	90%	202,000,000	92%	204,020,000	93%	206,060,200	95%	208,120,802	95%	1,020,201,002	KEL. KAMPUNGDALEM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	1,800,000,000	88%	1,800,000,000	89%	1,800,000,000	90%	1,800,000,000	91%	1,800,000,000	91%	9,000,000,000	KEL. KAMPUNGDALEM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	320,000,000	88%	323,200,000	89%	326,432,000	90%	329,696,320	91%	332,993,283	91%	1,632,321,603	KEL. KAMPUNGDALEM
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Kampungdalem / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Kampungdalem/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN SETONO PANDE																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	180,000,000	90%	181,800,000	92%	183,618,000	93%	185,454,180	94%	187,308,722	94%	918,180,902	KEL. SETONO PANDE
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Pande	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	2,800,000,000	88%	2,800,000,000	89%	2,800,000,000	90%	2,800,000,000	91%	2,800,000,000	91%	14,000,000,000	KEL. SETONO PANDE

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	300,000,000	88%	303,000,000	89%	306,030,000	90%	309,090,300	91%	312,181,203	91%	1,530,301,503	KEL. SETONO PANDE
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Sentono Pande / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Sentono Pande/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN JAGALAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	43,000,000	90%	43,430,000	92%	43,864,300	93%	44,302,943	95%	44,745,972	95%	219,343,215	KEL. JAGALAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	600,000,000	88%	600,000,000	89%	600,000,000	90%	600,000,000	91%	600,000,000	91%	3,000,000,000	KEL. JAGALAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	290,000,000	88%	292,900,000	89%	295,829,000	90%	298,787,290	91%	301,775,163	91%	1,479,291,453	KEL. JAGALAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Jagalan / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Jagalan/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN PAKELAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	Persen (%)	0.00%	88%	130,000,000	90%	131,300,000	92%	132,613,000	93%	133,939,130	94%	135,278,521	94%	663,130,651	KEL. PAKELAN
URUSAN WAJIB																
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakelan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	Persen (%)	85%	87%	1,500,000,000	88%	1,500,000,000	89%	1,500,000,000	90%	1,500,000,000	91%	1,500,000,000	91%	7,500,000,000	KEL. PAKELAN
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen (%)	85%	87%	300,000,000	88%	303,000,000	89%	306,030,000	90%	309,090,300	91%	312,181,203	91%	1,530,301,503	KEL. PAKELAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Pakelan / Barenlitbang

Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Pakelan/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN SETONO GEDONG																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	88%	29,000,000	90%	29,290,000	92%	29,582,900	93%	29,878,729	94%	30,177,516	94%	147,929,145	KEL. SETONO GEDONG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Gedong	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	500,000,000	88%	500,000,000	89%	500,000,000	90%	500,000,000	91%	500,000,000	91%	2,500,000,000	KEL. SETONO GEDONG
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	290,000,000	88%	292,900,000	89%	295,829,000	90%	298,787,290	91%	301,775,163	91%	1,479,291,453	KEL. SETONO GEDONG
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Sentono Gedong / Barentilbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Sentono Gedong/ Bagian Pemerintahan
KECAMATAN PESANTREN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Peningkatan Pelayanan Prima	IKM Kecamatan		88.25	8830%	186,000,000	8850%	187,860,000	8870%	189,738,600	8890%	191,635,986	8910%	193,552,346	8910%	948,786,932	KEC. PESANTREN
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		90.00%	91%	890,000,000	92%	898,900,000	93%	907,889,000	94%	916,967,890	95%	926,137,569	95%	4,539,894,459	KEC. PESANTREN
Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah		90.00%	90%	90,000,000	90%	90,900,000	90%	91,809,000	90%	92,727,090	90%	93,654,361	90%	459,090,451	
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	IKM Kecamatan		88.25	8830%		8850%		8870%		8890%		8910%		8910%		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		85.00%	87%		88%		89%		90%		91%		91%		
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan

KELURAHAN BANGSAL																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%		50,000,000	100%	50,500,000	100%	51,005,000	100%	51,515,050	100%	52,030,201	100%	255,050,251	KEL. BANGSAL
PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangsal	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	3,600,000,000	88%	3,600,000,000	89%	3,600,000,000	90%	3,600,000,000	91%	3,600,000,000	91%	18,000,000,000	KEL. BANGSAL
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	550,000,000	88%	555,500,000	89%	561,055,000	90%	566,665,550	91%	572,332,206	91%	2,805,552,756	KEL. BANGSAL
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Bangsal / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Bangsal/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN PAKUNDEN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	100,000,000	100%	101,000,000	100%	102,010,000	100%	103,030,100	100%	104,060,401	100%	510,100,501	KEL. PAKUNDEN
PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakunden	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	4,200,000,000	88%	4,200,000,000	89%	4,200,000,000	90%	4,200,000,000	91%	4,200,000,000	91%	21,000,000,000	KEL. PAKUNDEN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	480,000,000	88%	484,800,000	89%	489,648,000	90%	494,544,480	91%	499,489,925	91%	2,448,482,405	KEL. PAKUNDEN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Pakunden / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Pakunden/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN TOSAREN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	260,000,000	100%	262,600,000	100%	265,226,000	100%	267,878,260	100%	270,557,043	100%	1,326,261,303	KEL. TOSAREN
PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tosaren	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	4,600,000,000	88%	4,600,000,000	89%	4,600,000,000	90%	4,600,000,000	91%	4,600,000,000	91%	23,000,000,000	KEL. TOSAREN
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	480,000,000	88%	484,800,000	89%	489,648,000	90%	494,544,480	91%	499,489,925	91%	2,448,482,405	KEL. TOSAREN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Torasen / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Tosaren/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN JAMSAREN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	130,000,000	100%	131,300,000	100%	132,613,000	100%	133,939,130	100%	135,278,521	100%	663,130,651	KEL. JAMSAREN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jamsaren	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	4,100,000,000	88%	4,100,000,000	89%	4,100,000,000	90%	4,100,000,000	91%	4,100,000,000	91%	20,500,000,000	KEL. JAMSAREN
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	460,000,000	88%	464,600,000	89%	469,246,000	90%	473,938,460	91%	478,677,845	91%	2,346,462,305	KEL. JAMSAREN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Jamsaren / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Jamsaren/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN SINGONEGARAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	135,000,000	100%	136,350,000	100%	137,713,500	100%	139,090,635	100%	140,481,541	100%	688,635,676	KEL. SINGONEGARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Singonegaran	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	4,800,000,000	88%	4,800,000,000	89%	4,800,000,000	90%	4,800,000,000	91%	4,800,000,000	91%	24,000,000,000	KEL. SINGONEGARAN
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	570,000,000	88%	575,700,000	89%	581,457,000	90%	587,271,570	91%	593,144,286	91%	2,907,572,856	KEL. SINGONEGARAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Singonegaran / Barenitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Singonegaran/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN BLABAK																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	190,000,000	100%	191,900,000	100%	193,819,000	100%	195,757,190	100%	197,714,762	100%	969,190,952	KEL. BLABAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Blabak	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	3,100,000,000	88%	3,100,000,000	89%	3,100,000,000	90%	3,100,000,000	91%	3,100,000,000	91%	15,500,000,000	KEL. BLABAK
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	340,000,000	88%	343,400,000	89%	346,834,000	90%	350,302,340	91%	353,805,363	91%	1,734,341,703	KEL. BLABAK
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Blabak / Barenitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Blabak/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN BETET																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	80,000,000	100%	80,800,000	100%	81,608,000	100%	82,424,080	100%	83,248,321	100%	408,080,401	KEL. BETET
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Betet	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	2,300,000,000	88%	2,300,000,000	89%	2,300,000,000	90%	2,300,000,000	91%	2,300,000,000	91%	11,500,000,000	KEL. BETET
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	390,000,000	88%	393,900,000	89%	397,839,000	90%	401,817,390	91%	405,835,564	91%	1,989,391,954	KEL. BETET
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Betet / Barenitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Betet/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN TINALAN																
PEMERINTAHAN UMUM																
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	170,000,000	100%	171,700,000	100%	173,417,000	100%	175,151,170	100%	176,902,682	100%	867,170,852	KEL. TINALAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	150,000,000	88%	151,500,000	89%	153,015,000	90%	154,545,150	91%	156,090,602	91%	765,150,752	KEL. NGLETIH
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Ngleth / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Ngleth/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN TEMPUREJO															-	
PEMERINTAHAN UMUM															-	
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	90,000,000	100%	90,900,000	100%	91,809,000	100%	92,727,090	100%	93,654,361	100%	459,090,451	KEL. TEMPUREJO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															-	
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tempurejo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	2,100,000,000	88%	2,100,000,000	89%	2,100,000,000	90%	2,100,000,000	91%	2,100,000,000	91%	10,500,000,000	KEL. TEMPUREJO
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	320,000,000	88%	323,200,000	89%	326,432,000	90%	329,696,320	91%	332,993,283	91%	1,632,321,603	KEL. TEMPUREJO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Tempurejo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Tempurejo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN KETAMI															-	
PEMERINTAHAN UMUM															-	
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	180,000,000	100%	181,800,000	100%	183,618,000	100%	185,454,180	100%	187,308,722	100%	918,180,902	KEL. KETAMI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															-	
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketami	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	3,000,000,000	88%	3,000,000,000	89%	3,000,000,000	90%	3,000,000,000	91%	3,000,000,000	91%	15,000,000,000	KEL. KETAMI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	420,000,000	88%	424,200,000	89%	428,442,000	90%	432,726,420	91%	437,053,684	91%	2,142,422,104	KEL. KETAMI
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Ketami / Barenlitbang

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	150,000,000	88%	151,500,000	89%	153,015,000	90%	154,545,150	91%	156,090,602	91%	765,150,752	KEL. NGLETIH
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Ngleth / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Ngleth/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN TEMPUREJO															-	
PEMERINTAHAN UMUM															-	
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	90,000,000	100%	90,900,000	100%	91,809,000	100%	92,727,090	100%	93,654,361	100%	459,090,451	KEL. TEMPUREJO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															-	
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tempurejo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	2,100,000,000	88%	2,100,000,000	89%	2,100,000,000	90%	2,100,000,000	91%	2,100,000,000	91%	10,500,000,000	KEL. TEMPUREJO
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kelurahan kepada masyarakat yang semakin baik	Kelurahan		100%	160,000,000											Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	320,000,000	88%	323,200,000	89%	326,432,000	90%	329,696,320	91%	332,993,283	91%	1,632,321,603	KEL. TEMPUREJO
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Tempurejo / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Tempurejo/ Bagian Pemerintahan
KELURAHAN KETAMI															-	
PEMERINTAHAN UMUM															-	
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	180,000,000	100%	181,800,000	100%	183,618,000	100%	185,454,180	100%	187,308,722	100%	918,180,902	KEL. KETAMI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															-	
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketami	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	3,000,000,000	88%	3,000,000,000	89%	3,000,000,000	90%	3,000,000,000	91%	3,000,000,000	91%	15,000,000,000	KEL. KETAMI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	420,000,000	88%	424,200,000	89%	428,442,000	90%	432,726,420	91%	437,053,684	91%	2,185,422,104	KEL. KETAMI
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Ketami / Barenlitbang
PEMERINTAHAN UMUM															-	
Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan		0.00%	100%	170,000,000	100%	171,700,000	100%	173,417,000	100%	175,151,170	100%	176,902,682	100%	867,170,852	KEL. BURENGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Burengan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		85%	87%	3,700,000,000	88%	3,700,000,000	89%	3,700,000,000	90%	3,700,000,000	91%	3,700,000,000	91%	18,500,000,000	KEL. BURENGAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85%	87%	410,000,000	88%	414,100,000	89%	418,241,000	90%	422,423,410	91%	426,647,644	91%	2,091,412,054	KEL. BURENGAN
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya Budaya Gotong Royong	Persen (%)	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		1,000,000,000	Bagian Pemerintahan
Pembuatan Data Base Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Update Data Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan	Profil lama	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kel Banaran / Barenlitbang
Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas bagi Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Prodamas	Jumlah Sosialisasi	Kali	100%	9,130,435	100%	9,130,435	100%	9,130,435	100%	9,130,435	100%	9,130,435	100%	45,652,174	Kel Banaran / Barenlitbang
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat	kali	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	500%	400,000,000	Kel Burengan/ Bagian Pemerintahan
Misi 4: Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan																
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang jalan (km)	%	278.919	27892%	1,010,000,000	27892%	1,020,100,000	27892%	1,030,301,000	27892%	1,040,604,010	27892%	1,051,010,050	27892%	5,152,015,060	DPUPR
Pembangunan Jalan	Meningkatnya Kondisi Jalan di Kota Kediri	km		173 Km	755,000,000.00	DPUPR										
	Meningkatnya Kondisi Jalan di Kota Kediri	km		173 Km		173 Km		173 Km		173 Km		173 Km		173 Km		DPUPR
	Meningkatnya Kondisi Jalan di Kota Kediri	km		173 Km		173 Km		173 Km		173 Km		173 Km		173 Km		DPUPR
Pembangunan Jembatan	Meningkatnya Kondisi Jembatan Di Kota Kediri	km		115 Km	255,000,000.00	DPUPR										
	Meningkatnya Kondisi Jembatan Di Kota Kediri	km		115 Km		115 Km		115 Km		115 Km		115 Km		115 Km		DPUPR
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	% panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun		60.00%	62%	9,185,000,000	64%	9,276,850,000	66%	9,369,618,500	68%	9,463,314,685	70%	9,557,947,832	70%	46,852,731,017	DPUPR
Pembangunan Saluran Drainase/rongrong	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %	9,185,000,000	56 %	9,185,000,000							56 %	9,185,000,000	DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %										DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %										DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %										DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %										DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %										DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %										DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %										DPUPR

	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %												DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %												DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %												DPUPR
	Berfungsinya Saluran Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %												DPUPR
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Prosentase plengsengan yang dibangun		60.00%	62%	5,460,000,000	64%	5,514,600,000	66%	5,569,746,000	68%	5,625,443,460	70%	5,681,697,895	70%	27,851,487,355			DPUPR
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %	5,460,000,000	56 %	5,460,000,000							56 %	5,460,000,000			DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
	Berfungsinya Saluran Irigasi Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %								56 %				DPUPR
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% peningkatan umur manfaat jalan dan jembatan		45%	46%	2,775,000,000	47%	2,802,750,000	48%	2,830,777,500	49%	2,859,085,275	50%	2,887,676,128	50%	14,155,288,903			DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Rutin)	Berfungsinya jalan di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		34%	2,275,000,000									34%	2,275,000,000			DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Rutin)	Berfungsinya jembatan di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		34%	500,000,000									34%	500,000,000			DPUPR
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	-	Persen (%)		-	550,000,000									-	550,000,000			DPUPR
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Meningkatnya Data Pendukung Jaringan Jalan	Persen (%)		96%	550,000,000									96%	550,000,000			DPUPR
	Meningkatnya Data Pendukung Jaringan Jalan	Persen (%)		96%										96%				DPUPR
	Meningkatnya Data Pendukung Jaringan Jalan	Persen (%)		96%										96%				DPUPR

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Terbangunnya sistem informasi/database jalan dan jembatan (%)		95%	96%	550,000,000	96%	555,500,000	96%	561,055,000	96%	566,665,550	96%	572,332,206	96%	2,805,552,756	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	% peningkatan jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik		70%	72%	5,560,000,000	74%	5,615,600,000	76%	5,671,756,000	78%	5,728,473,560	80%	5,785,758,296	80%	28,361,587,856	DPUPR
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Berfungsinya Saluran Sungai Sesuai Peruntukannya	Persen (%)		75 %	150,000,000											DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Berfungsinya jaringan irigasi di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		75 %	800,000,000											DPUPR
Pembangunan Jaringan Irigasi	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %	4,610,000,000								75 %	4,610,000,000	DPUPR	
	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %									75 %		DPUPR	
	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %									75 %		DPUPR	
	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %									75 %		DPUPR	
	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %									75 %		DPUPR	
	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %									75 %		DPUPR	
	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %									75 %		DPUPR	
	Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi	Persen (%)		75 %									75 %		DPUPR	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	% sarana sanitasi berfungsi dengan baik		32%	40%	1,400,000,000	50%	1,414,000,000	60%	1,428,140,000	70%	1,442,421,400	75%	1,456,845,614	75%	7,141,407,014	DPUPR
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Cakupan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1 Tahun		60 %	1,250,000,000	60 %	1,250,000,000	60 %	1,250,000,000	60 %	1,250,000,000	60 %	1,250,000,000	60 %	1,250,000,000	DPUPR
	Cakupan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1 Paket		60 %		60 %		60 %		60 %		60 %		60 %		DPUPR
	Cakupan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1 Paket		60 %		60 %		60 %		60 %		60 %		60 %		DPUPR
Fasilitasi Pembinaan Teknik Penilaian Air Limbah	Meningkatnya Kualitas SDM Dalam Pengolahan Limbah	1 Tahun		60 %	50,000,000	60 %	50,000,000	60 %	50,000,000	60 %	50,000,000	60 %	50,000,000	60 %	50,000,000	DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Berfungsinya Sarana Dan Prasarana Air Limbah Dengan Baik	1 Tahun		60 %	100,000,000	60 %	100,000,000	60 %	100,000,000	60 %	100,000,000	60 %	100,000,000	60 %	100,000,000	DPUPR
Program Pengendalian Banjir	%Panjang saluran drainase yang dibersihkan terhadap panjang saluran		80%	80%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	5,250,000,000	DPUPR
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Berfungsinya Sungai / Kali di Kota Kediri dengan Baik	1 Tahun		77 %	1,000,000,000	77 %	1,000,000,000	77 %	1,000,000,000	77 %	1,000,000,000	77 %	1,000,000,000	77 %	5,000,000,000	DPUPR
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan Saluran Yang Terevaluasi Dengan Baik	1 Dokumen		77 %	50,000,000	77 %	50,000,000	77 %	50,000,000	77 %	50,000,000	77 %	50,000,000	77 %	250,000,000	DPUPR

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-			--	200,000,000	--	200,000,000	--	200,000,000	--	200,000,000	--	200,000,000	--	200,000,000	DPUPR
Pembangunan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau	Terpenuhinya RTH Dikota Kediri	Persen (%)		65 %	200,000,000	65 %	200,000,000	65 %	200,000,000	65 %	200,000,000	65 %	200,000,000	65 %	200,000,000	DPUPR
	Terpenuhinya RTH Dikota Kediri	Persen (%)		65 %		65 %		65 %		65 %		65 %		65 %		DPUPR
	Terpenuhinya RTH Dikota Kediri	Persen (%)		65 %		65 %		65 %		65 %		65 %		65 %		DPUPR
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	-	Persen (%)		--	1,750,000,000	--	1,750,000,000	--	1,750,000,000	--	1,750,000,000	--	1,750,000,000	--	1,750,000,000	DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/rong-rong	Berfungsinya Drainase/Gorong-Gorong di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		34 %	750,000,000	34 %	750,000,000	34 %	750,000,000	34 %	750,000,000	34 %	750,000,000	34 %	750,000,000	DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	Berfungsinya Trotoar di Kota Kediri dengan Baik	Persen (%)		34 %	1,000,000,000	34 %	1,000,000,000	34 %	1,000,000,000	34 %	1,000,000,000	34 %	1,000,000,000	34 %	1,000,000,000	DPUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	Persen (%)		--	1,475,000,000	--	1,475,000,000	--	1,475,000,000	--	1,475,000,000	--	1,475,000,000	--	1,475,000,000	DPUPR
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen (%)		75 %	1,000,000,000	75 %	1,000,000,000	75 %	1,000,000,000	75 %	1,000,000,000	75 %	1,000,000,000	75 %	1,000,000,000	DPUPR
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen (%)		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		DPUPR
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen (%)		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		DPUPR
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen (%)		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		DPUPR
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mengurus IMB	Persen (%)		75 %	250,000,000	75 %	250,000,000	75 %	250,000,000	75 %	250,000,000	75 %	250,000,000	75 %	250,000,000	DPUPR
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mengurus IMB	Persen (%)		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		DPUPR
Pemberian Ijin Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatnya Bangunan Yang Memiliki IMB	Persen (%)		75 %	225,000,000	75 %	225,000,000	75 %	225,000,000	75 %	225,000,000	75 %	225,000,000	75 %	225,000,000	DPUPR
	Meningkatnya Bangunan Yang Memiliki IMB	Persen (%)		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		DPUPR
	Meningkatnya Bangunan Yang Memiliki IMB	Persen (%)		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		75 %		DPUPR
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum	-	Persen (%)		--	5,200,000,000	--	5,200,000,000	--	5,200,000,000	--	5,200,000,000	--	5,200,000,000	--	5,200,000,000	DPUPR
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)	Berfungsinya jalan di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		56 %	2,300,000,000	56 %	2,300,000,000	56 %	2,300,000,000	56 %	2,300,000,000	56 %	2,300,000,000	56 %	2,300,000,000	DPUPR
	Berfungsinya jalan di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		DPUPR
	Berfungsinya jalan di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		DPUPR
	Berfungsinya jalan di Kota Kediri dengan baik	Persen (%)		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		DPUPR

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sanitasi (DBHCHT)	Berfungsinya Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Drainase Di Kota Kediri Dengan Baik	Persen (%)		56 %	2,900,000,000	56 %	2,900,000,000	56 %	2,900,000,000	56 %	2,900,000,000	56 %	2,900,000,000	56 %	2,900,000,000	DPUPR
	Berfungsinya Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Drainase Di Kota Kediri Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		DPUPR
	Berfungsinya Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Drainase Di Kota Kediri Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		DPUPR
	Berfungsinya Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Drainase Di Kota Kediri Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		DPUPR
	Berfungsinya Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Drainase Di Kota Kediri Dengan Baik	Persen (%)		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		56 %		DPUPR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							-		-		-		-			
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							-		-		-		-			
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase ketersediaan area perumahan		60.00%	60%	640,000,000	61%	646,400,000	62%	652,864,000	63%	659,392,640	64%	665,986,566	64%	3,264,643,206	DISPERKIM
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rusunawa	Terawatnya Gedung Rusunawa	Pemeliharaan Gedung Rusunawa		12 Bulan	100,000,000	DISPERKIM										
Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Rusunawa	Optimalnya Pengelolaan dan Pelayanan Kantor Rusunawa	Operasional dan Pelayanan Kantor Rusunawa		90 %	100,000,000	90 %	100,000,000	90 %	100,000,000	90 %	100,000,000	90 %	100,000,000	90 %	100,000,000	DISPERKIM
Verifikasi Fasum dan Fasos Perumahan	Meningkatnya Fasum dan Fasos Perumahan yang diserahkan Kepada Pemerintah Kota Kediri	Team Pelaksanaan Koordinasi Fasum Fasos		1 Team	50,000,000	DISPERKIM										
Fasilitasi Bantuan dan Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin (RTLH)	Terwujudnya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Tidak Mampu	BOP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL)		3 Kecamatan	216,200,000	DISPERKIM										
Penyusunan Peraturan Walikota Penyelenggaraan Perumahan	Terbentuknya Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perumahan	Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perumahan		1 Dokumen	50,000,000	DISPERKIM										
Koordinasi Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Validasi PSU Perumahan Di Kota Kediri	Validasi Data PSU Perumahan		10 %	78,666,600	10 %	78,666,600	10 %	78,666,600	10 %	78,666,600	10 %	78,666,600	10 %	78,666,600	DISPERKIM
Pemantauan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	PSU Perumahan Yang Di Serahkan Ke Pemerintah Kota Kediri	Sertifikat PSU		10 %	50,000,000	10 %	50,000,000	10 %	50,000,000	10 %	50,000,000	10 %	50,000,000	10 %	50,000,000	DISPERKIM
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	-	-					438,000,000		438,000,000		438,000,000		438,000,000		438,000,000	DISPERKIM
Pembangunan Saluran Drainase/rongrong	Berkurangnya Genangan Air	Paket		4 Paket	438,000,000	DISPERKIM										

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	Persen (%)	- -	225,000,000	- -	225,000,000	- -	225,000,000	- -	225,000,000	- -	225,000,000	- -	225,000,000	DISPERKIM	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Rutin)	Terwujudnya Pemeliharaan Paving Di Lingkungan Pemukiman	Persen (%)	100 %	225,000,000	100 %	225,000,000	100 %	225,000,000	100 %	225,000,000	100 %	225,000,000	100 %	225,000,000	DISPERKIM	
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	-	Persen (%)	- -	70,000,000	- -	70,000,000	- -	70,000,000	- -	70,000,000	- -	70,000,000	- -	70,000,000	DISPERKIM	
Pembinaan Administrasi Pertanahan	-	Persen (%)	80 %	70,000,000	80 %	70,000,000	80 %	70,000,000	80 %	70,000,000	80 %	70,000,000	80 %	70,000,000	DISPERKIM	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan lingkungan sehat perumahan					-		-		-		-		-	DISPERKIM	
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	% pemeliharaan areal pemakaman	Persen (%)	95.00%	95%	350,000,000	96%	353,500,000	96%	357,035,000	97%	360,605,350	98%	364,211,404	98%	1,785,351,754	DISPERKIM
Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	% titik lampu yang terpelihara dan adanya database LPJU	Persen (%)	90.00%	90%	7,700,000,000	91%	7,777,000,000	92%	7,854,770,000	93%	7,933,317,700	94%	8,012,650,877	94%	39,277,738,577	DISPERKIM
Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup perumahan dan pemukiman	Terbinanya Lingkungan sosial lingkup perumahan dan pemukiman	Persen (%)	50.00%	50%	-	51%	-	52%	-	53%	303,163,166	54%	306,194,798	54%	609,357,964	DISPERKIM
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						-		-		-		-		-		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang jalan (km)		278.919	278.92		278.92		-	278.92		-	278.92		-	278.92	DISPERKIM
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	% panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Persen (%)	60.00%	62%	400,000,000	64%	404,000,000	66%	408,040,000	68%	412,120,400	70%	416,241,604	63%	2,040,402,004	DISPERKIM
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% umur manfaat jalan dan jembatan	Persen (%)	45%	46%	200,000,000	47%	202,000,000	48%	204,020,000	49%	206,060,200	50%	208,120,802	50%		
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan	Persen (%)	60.00%	62%	200,000,000	64%	202,000,000	66%	204,020,000	68%	206,060,200	70%	208,120,802	70%	1,020,201,002	DISPERKIM
Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Prosentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan	Persen (%)	60%	62%		64%		66%		68%		70%		70%		
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	% saluran drainase atau gorong-gorong yang direhab	Persen (%)	45%	45%	150,000,000	46%	151,500,000	47%	153,015,000	48%	154,545,150	49%	156,090,602	49%		
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW					-		-		-		-		-	DISPERKIM	
KESBANGPOL																
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya rencana aksi (tim terpadu) penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Persen (%)	80%	90%	173,000,000	91%	174,730,000	92%	176,477,300	94%	178,242,073	95%	180,024,494	95%	882,473,867	KESBANGPOL
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terkoordinirnya Tim Kewaspadaan Dini dan peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya Narkoba.	Persen (%)	80%	90%	752,000,000	91%	759,520,000	92%	767,115,200	94%	774,786,352	95%	782,534,216	95%	3,835,955,768	KESBANGPOL
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	% peningkatan semangat berwawasan kebangsaan di lingkungan masyarakat	Persen (%)	90%	90%	425,000,000	91%	429,250,000	92%	433,542,500	93%	437,877,925	95%	442,256,704	95%	2,167,927,129	KESBANGPOL

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan korps musik (upacara) di Balai Kota Kediri	Persen (%)	80%	80%	350,000,000	85%	353,500,000	90%	357,035,000	92%	360,605,350	95%	364,211,404	95%	1,785,351,754	KESBANGPOL
Program Pendidikan Politik Masyarakat	% pemahaman masyarakat tentang perpolitikan	Persen (%)	80%	85%	700,000,000	87%	707,000,000	90%	714,070,000	92%	721,210,700	95%	728,422,807	95%	3,570,703,507	KESBANGPOL
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							-		-		-		-			
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							-		-		-		-			
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	% Pelanggaran Trantib yang ditangani	Persen (%)	80%	90%	3,900,000,000	91%	3,939,000,000	92%	3,978,390,000	93%	4,018,173,900	94%	4,058,355,639	95%	19,893,919,539	SATPOL PP
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	% Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif	Persen (%)	80%	90%	1,150,000,000	91%	1,161,500,000	92%	1,173,115,000	93%	1,184,846,150	94%	1,196,694,612	94%	5,866,155,762	SATPOL PP
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kecepatan waktu tanggap bencana kebakaran	Menit	20 Menit	20 Menit	400,000,000	20 Menit	404,000,000	20 Menit	408,040,000	20 Menit	412,120,400	20 Menit	416,241,604	20 Menit	2,040,402,004	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							-		-		-		-			
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							-		-		-		-			
Program Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya tindakan antisipasi dan penanggulangan bencana	Persen (%)	80%	80%	950,000,000	81%	959,500,000	82%	969,095,000	83%	978,785,950	84%	988,573,810	84%	4,845,954,760	BPBD
Program Kedaruratan dan Logistik	Terlaksananya tindakan tanggap darurat dan pemenuhan logistik korban bencana	Persen (%)	94%	94%	469,000,000	95%	473,690,000	96%	478,426,900	97%	483,211,169	98%	488,043,281	98%	2,392,371,350	BPBD
Program Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen (%)	94%	94%	80,000,000	95%	80,800,000	96%	81,608,000	97%	82,424,080	98%	83,248,321	98%	408,080,401	BPBD
DINAS SOSIAL							-		-		-		-			
SOSIAL							-		-		-		-			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera	Penurunan penduduk miskin	Persen (%)	8%	8%	1,500,000,000	7%	1,515,000,000	7%	1,530,150,000	7%	1,545,451,500	7%	1,560,906,015	7%	7,651,507,515	DINAS SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	% Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen (%)	41%	50%	1,000,000,000	60%	1,010,000,000	75%	1,020,100,000	85%	1,030,301,000	90%	1,040,604,010	90%	5,101,005,010	DINAS SOSIAL
Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia	Terselenggaranya pembinaan, lomba karang wreda berprestasi HUT lansia dn terselurkannya Bansus Aslut	Persen (%)	395,800,000	80 %	395,800,000	80 %	395,800,000	80 %	395,800,000	80 %	395,800,000	80 %	395,800,000	80 %	395,800,000	DINAS SOSIAL

	Terselenggaranya pembinaan, lomba karang wreda berprestasi HUT lansia dn tersalurkannya Bansus Aslut	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL
	Terselenggaranya pembinaan, lomba karang wreda berprestasi HUT lansia dn tersalurkannya Bansus Aslut	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Terselenggaranya pembinaan bagi PMKS yang memerlukan bantuan pemulangan orang terlantar, pengiriman PMKS ke UPT Sosial RSJ dan bimbingan, pelatihan TRC, dan sosialisasi penanganan ODGJ	Persen (%)	550,900,000	80 %	550,900,000	80 %	550,900,000	80 %	550,900,000	80 %	550,900,000	80 %	550,900,000	80 %	550,900,000	DINAS SOSIAL
	Terselenggaranya pembinaan bagi PMKS yang memerlukan bantuan pemulangan orang terlantar, pengiriman PMKS ke UPT Sosial RSJ dan bimbingan, pelatihan TRC, dan sosialisasi penanganan ODGJ	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL
	Terselenggaranya pembinaan bagi PMKS yang memerlukan bantuan pemulangan orang terlantar, pengiriman PMKS ke UPT Sosial RSJ dan bimbingan, pelatihan TRC, dan sosialisasi penanganan ODGJ	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL
	Terselenggaranya pembinaan bagi PMKS yang memerlukan bantuan pemulangan orang terlantar, pengiriman PMKS ke UPT Sosial RSJ dan bimbingan, pelatihan TRC, dan sosialisasi penanganan ODGJ	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL

	Terselenggaranya pembinaan bagi PMKS yang memerlukan bantuan pemulangan orang terlantar, pengiriman PMKS ke UPT Sosial RSJ dan bimbingan, pelatihan TRC, dan sosialisasi penanganan ODGJ	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL
	Terselenggaranya pembinaan bagi PMKS yang memerlukan bantuan pemulangan orang terlantar, pengiriman PMKS ke UPT Sosial RSJ dan bimbingan, pelatihan TRC, dan sosialisasi penanganan ODGJ	Persen (%)		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		DINAS SOSIAL
Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terwujudnya tenaga ahli dalam bidang sosial yang bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien	Persen (%)	88,050,000	100 %	88,050,000	100 %	88,050,000	100 %	88,050,000	100 %	88,050,000	100 %	88,050,000	100 %	88,050,000	DINAS SOSIAL
	Terwujudnya tenaga ahli dalam bidang sosial yang bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien	Persen (%)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS SOSIAL
Sosialisasi Penanganan Pasca Bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak bencana	Persen (%)	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Relawan Bencana	-	Persen (%)	25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	% Panti asuhan / jompo yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	100%	100%	250,000,000	100%	252,500,000	100%	255,025,000	100%	257,575,250	100%	260,151,003	100%	1,275,251,253	
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persentase Eks penyandang penyakit sosial yang mampu berintegrasi sosial	Persen (%)	60%	60%	200,000,000	60%	202,000,000	60%	204,020,000	60%	206,060,200	6000%	208,120,802	60%	1,020,201,002	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	% Karang taruna dan PSKS lain yang di bina	Persen (%)	80%	80%	280,000,000	81%	282,800,000	82%	285,628,000	83%	288,484,280	84%	291,369,123	84%	1,020,201,002	
Peningkatan Kualitas Sdm Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tertelaksananya program kegiatan Bimtek pada lembaga kesejahteraan sosial di masyarakat	Orang		350 orang	115,059,000	DINAS SOSIAL										

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Terpenuhinya penanganan ABH, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah dan AMPK di Kota Kediri	Orang		30 orang	97,900,000	DINAS SOSIAL										
	Terpenuhinya penanganan ABH, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah dan AMPK di Kota Kediri	Jumlah Penanganan ABH		20 ABH		20 ABH		20 ABH		20 ABH		20 ABH		20 ABH		DINAS SOSIAL
	Terpenuhinya penanganan ABH, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah dan AMPK di Kota Kediri	Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		DINAS SOSIAL
Peningkatan Keperintisan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Terselenggaranya kegiatan Sarasehan dan mewarnai kepahlawanan	siswa-siswi smp se kota kediri		200 siswa-siswi smp se kota kediri	86,173,000	200 siswa-siswi smp se kota kediri	86,173,000	200 siswa-siswi smp se kota kediri	86,173,000	200 siswa-siswi smp se kota kediri	86,173,000	200 siswa-siswi smp se kota kediri	86,173,000	200 siswa-siswi smp se kota kediri	86,173,000	DINAS SOSIAL
Peningkatan Potensi Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya program undian berhadiah yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Kali		1 Kali	-	DINAS SOSIAL										
Program Pembinaan Orang Terlantar	% orang terlantar yang dibina		80%	80%	230,000,000	81%	232,300,000	82%	234,623,000	83%	236,969,230	84%	239,338,922	84%	1,173,231,152	DINAS SOSIAL
Peningkatan Pembinaan Orang Terlantar	Terselenggaranya kegiatan RAZIA untuk Gepeng & Anak jalanan	Kali		12 Kali Razia	145,800,000	DINAS SOSIAL										
	Terselenggaranya kegiatan RAZIA untuk Gepeng & Anak jalanan	paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		DINAS SOSIAL
Pelayanan dan Perlindungan Orang Terlantar	Peningkatan Layanan dan perlindungan Sosial bagi anak/Orang terlantar	bulan		12 bulan	94,080,000	DINAS SOSIAL										
	Peningkatan Layanan dan perlindungan Sosial bagi anak/Orang terlantar	Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		DINAS SOSIAL
	Peningkatan Layanan dan perlindungan Sosial bagi anak/Orang terlantar	Kecamatan		3 kecamatan		3 kecamatan		3 kecamatan		3 kecamatan		3 kecamatan		3 kecamatan		DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Penyandang Disabilitas dan eks trauma yang dibantu		80%	80%	200,000,000	82%	202,000,000	85%	204,020,000	87%	206,060,200	90%	208,120,802	90%	1,020,201,002	DINAS SOSIAL

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								-		-			-		-		
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								-		-			-		-		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								-		-			-		-		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%terbinanya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persen (%)	85%	85%	384,000,000	86%	387,840,000	87%	391,718,400	88%	395,635,584	89%	399,591,940	89%	1,958,785,924	DP3AP2KB	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tercukupinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persen (%)	85%	85%	770,000,000	86%	777,700,000	87%	785,477,000	88%	793,331,770	89%	801,265,088	89%	3,927,773,858	DP3AP2KB	
Advokasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Terlaksananya pelayanan terhadap tindak kekerasan anak secara komprehensif	Persen (%)		100 %	636,700,000	100 %	636,700,000	100 %	636,700,000	100 %	636,700,000	100 %	636,700,000	100 %	636,700,000	DP3AP2KB	
Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Terbentuknya forum anak dan keterlibatan anak dalam musyawarah rencana pembangunan	Persen (%)		100 %	76,850,000	100 %	76,850,000	100 %	76,850,000	100 %	76,850,000	100 %	76,850,000	100 %	76,850,000	DP3AP2KB	
Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Anak	Terwujudnya layanan hak anak	Persen (%)		95 %	61,000,000	95 %	61,000,000	95 %	61,000,000	95 %	61,000,000	95 %	61,000,000	95 %	61,000,000	DP3AP2KB	
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tercukupinya Kebutuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender		85%	85%	1,800,000,000	86%	1,818,000,000	87%	1,836,180,000	88%	1,854,541,800	89%	1,873,087,218	89%	9,181,809,018	DP3AP2KB	
Sosialisasi terkait Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pemahaman terhadap Kesetaraan Gender	Persen (%)	162,350,000.00	85%	162,350,000	85%	162,350,000	85%	162,350,000	85%	162,350,000	85%	162,350,000	85%	162,350,000	DP3AP2KB	
Fasilitasi terkait Peranan dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Peran Organisasi Wanita	Persen (%)	1,518,229,350.00	90%	1,518,229,350	90%	1,518,229,350	90%	1,518,229,350	90%	1,518,229,350	90%	1,518,229,350	90%	1,518,229,350	DP3AP2KB	
Penyusunan Data Terpilah Gender	Tersusunnya Data Terpilah Gender	Persen (%)	135,000,000.00	70%	135,000,000	70%	135,000,000	70%	135,000,000	70%	135,000,000	70%	135,000,000	70%	135,000,000	DP3AP2KB	
Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Gender	Meningkatnya Peranan Kepala Keluarga Perempuan	Persen (%)	41,939,650.00	85%	41,939,650	85%	41,939,650	85%	41,939,650	85%	41,939,650	85%	41,939,650	85%	41,939,650	DP3AP2KB	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								-		-			-		-		
Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	Persen (%)	73%	73%	250,000,000	73%	252,500,000	73%	255,025,000	73%	257,575,250	73%	260,151,003	73%	1,020,201,100	DP3AP2KB	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK (Pelayanan Informasi dan Konseling) yang terbentuk	Persen (%)	0.63	64%	50,000,000	54%	50,500,000	0.51	51,005,000	0.48	51,515,050	0.45	52,030,201	0.45	255,050,251	DP3AP2KB	
Program Pelayanan Kontrasepsi	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,108	2,106	50,000,000	2,105	50,500,000	2,105	51,005,000	2,105	51,515,050	2,104	52,030,201	2,104	255,050,251	DP3AP2KB	
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	% peningkatan peran serta KKBPK melalui koalisi kependudukan	Persen (%)	90%	90%	20,000,000	91%	20,200,000	92%	20,402,000	93%	20,606,020	94%	20,812,080	94%	102,020,100	DP3AP2KB	

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan pendidik sebaya PIK yang sudah dilatih	Persen (%)	92%	94%	-	98%	-	98%	-	98%	-	99%	-	99%	-	DP3AP2KB
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Prosentase BKP yang telah mendapatkan informasi	Persen (%)	70%	80%	100,000,000	83%	101,000,000	85%	102,010,000	88%	103,030,100	90%	104,060,401	90%	510,100,501	DP3AP2KB
Program Pengendalian Penduduk	Meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat akan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen (%)	85%	85%	895,000,000	86%	903,950,000	87%	912,989,500	88%	922,119,395	89%	931,340,589	89%	4,565,399,484	DP3AP2KB
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN																
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% penanganan sampah yang ditangani dibanding volume produksi sampah		80.00%	82%	20,399,000,000	84%	20,602,990,000	86%	20,809,019,900	88%	21,017,110,099	90%	21,227,281,200	78%	104,055,401,199	DLHKP
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Dokumen Master Plan Persampahan		1 Dokumen	0	DLHKP										
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kelancaran pengelolaan persampahan	Alat kebersihan, pasang baru listrik, bahan baku bangunan, mesin pompa air		12 Bulan	384,837,000	DLHKP										
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kelancaran operasional dan optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Gaji THL, bahan baku bangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan		12 Bulan	6,119,215,000	DLHKP										
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Meningkatnya Pemanfaatan pengolahan persampahan oleh masyarakat	peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan		12 Bulan	120,000,000	DLHKP										
Bimbingan Teknis Persampahan	Peningkatan kemampuan kelompok masyarakat dalam pengolahan persampahan	Pelatihan daur ulang sampah dan honor tenaga bank sampah		12 Bulan	174,224,000	DLHKP										
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Tersampainya informasi tentang kebijakan persampahan	Sosialisasi kebijakan dan daur ulang persampahan		12 Bulan	379,270,000	DLHKP										
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peringatan HPSN (Hari Peduli Sampah Nasional)		12 Bulan	265,294,000	DLHKP										

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya kegiatan persampahan yang akurat tabel	Monitoring Persampahan dan pendampingan bansos dampak TPA		12 Bulan	70,000,000	DLHKP										
Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan / Kebersihan	Terbangunnya TPA Baru	Pembangunan TPA Baru		1 Paket	8,000,000,000	DLHKP										
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kebersihan	Berfungsinya sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang memadai	Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan		12 Bulan	2,497,117,000	DLHKP										
Operasional TPA	Peningkatan operasional TPA	Sarana dan prasarana persampahan/kebersihan untuk operasional TPA yang memadai		12 Bulan	2,254,176,800	DLHKP										
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Penanganan limbah B3 sesuai dengan aturan	Identifikasi limbah B3		12 Bulan	135,000,000	DLHKP										
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Persen	7%	7%	865,000,000	7%	873,650,000	7%	882,386,500	7%	891,210,365	7%	900,122,469	7%	4,412,369,334	DLHKP
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Mewujudkan Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Nyaman	bulan		12 Bulan	100,000,000	DLHKP										
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara dari Kegiatan Usaha/Industri	bulan		12 Bulan	100,000,000	DLHKP										
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara dari Kegiatan Usaha/Industri dan rumah tangga	bulan		12 Bulan	250,000,000	DLHKP										
Pengkajian Dampak Lingkungan	Meningkatnya kesiapan pembangunan TPA dan Taman Alun - Alun	bulan		12 Bulan	0	DLHKP										
Koordinasi Penyusunan Amdal	Meningkatnya Upaya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	bulan		12 Bulan	80,000,000	DLHKP										
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	bulan		12 Bulan	155,000,000	DLHKP										
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Upaya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup oleh pelaku usaha	bulan		12 Bulan	80,000,000	DLHKP										

Pengembangan Data Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Terpenuhinya Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup	bulan		12 Bulan	100,000,000	DLHKP										
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			80%	80%	190,000,000	80%	191,900,000	80%	193,819,000	80%	195,757,190	80%	197,714,762	80%	969,190,952	DLHKP
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Meningkatnya konservasi SDA	bulan		12 Bulan	80,000,000	DLHKP										
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Pembinaan Fungsi dan Manfaat RTH	bulan		12 Bulan	50,000,000	DLHKP										
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sda	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA	bulan		12 Bulan	60,000,000	DLHKP										
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawasan Sumber mata air	dokumen		1 Dokumen	-	DLHKP										
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			88%	88%	189,000,000	88%	190,890,000	88%	192,798,900	88%	194,726,889	88%	196,674,158	88%	964,089,947	DLHKP
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dan sekolah yang berbudaya lingkungan serta kelurahan bersih, sehat dan lestari															
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			85%	85%	6,239,000,000	85%	6,301,390,000	86%	6,364,403,900	87%	6,428,047,939	88%	6,492,328,418	90%	31,825,170,257	DLHKP
Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan atau kebijakan pemerintah tentang pertamanan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Tersampainya informasi kepada masyarakat tentang peraturan atau kebijakan pemerintah tentang pertamanan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem		12 Bulan	50,000,000	DLHKP										
Penataan RTH	Meningkatnya Luasan RTH Kota	Pengembangan dan Pembangunan RTH Kel. Balowerti, Jamsaren, Pojok, Lirboyo, Setono Pande, Banjar mlati		12 Bulan	1,830,315,000	DLHKP										
Pemeliharaan RTH	Peningkatan nilai estetika dan kualitas RTH di Kota Kediri	Terpeliharanya RTH		12 Bulan	2,941,000,000	DLHKP										
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Pelatihan pengelolaan RTH		12 Bulan	-	DLHKP										
Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan kinerja para aparaturnya pengelolaan RTH dan Konservasi	Monitoring dan evaluasi RTH dan Konservasi		12 Bulan	80,000,000	DLHKP										

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Menambahkan sarana prasarana taman	Sarana dan Prasarana Pertamanan		8 Jenis	293,300,000	DLHKP												
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana pertamanan	BBM, Oli, Service, dan Suku Cadang kendaraan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan stadion		12 Bulan	1,045,000,000	DLHKP												
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan RTH	Peningkatan kinerja dan kemampuan aparat	Peningkatan kemampuan SDM aparatur pengelolaan RTH		12 Bulan	-	DLHKP												
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-		-	250,000,000	-	250,000,000	-	250,000,000	-	250,000,000	-	250,000,000	-	250,000,000	DLHKP		
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi masyarakat di Lingkungan Industri Melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan (DBHCHT)	Terpenuhinya Pengujian Limbah Industri Hasil Tembakau	Uji Laboratorium Air Sumur, Sungai, dan Udara Ambien		12 Bulan	250,000,000	DLHKP												
Program Pengembangan Penerimaan Daerah	-	-		-	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah	Terpenuhinya capaian PAD			100%	85,000,000													
				9%	9%	9%	-	9%	-	10%	-	9%	-	9%	-	DLHKP		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Lingkungan Hidup				88%	90%	90%	250,000,000	90%	252,500,000	90%	255,025,000	90%	257,575,250	90%	260,151,003	90%	1,275,251,253	DLHKP
Penyediaan Sarana dan Prasaran Penilaian Limbah Industri Melalui Pengelolaan Persampahan (DBHCHT)	Pemanfaatan teknologi pengolahan persampahan	Paket Pembangunan TPS Kel. Manisrenggo		1 Paket	250,000,000	DLHKP												
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Daur Ulang Sampah (DBHCHT)	Meningkatna Kemampuan Kader Bank Sampah dan Masyarakat	Waktu Pelatihan daur ulang sampah dan honor tenaga bank sampah		12 Bulan	-	DLHKP												
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DBHCHT)	meningkatkan kualitas sarpras persampahan	Jenis Pengadaan sarana dan prasarana persampahan/ kebersihan (arm roll, bak kontainer sampah, pencacah plastik, gerobak sampah)		4 Jenis	-	DLHKP												
Program Pengembangan Penerimaan Daerah	% peningkatan PAD dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pertamanan			2%	2%	2%	85,000,000	2%	85,850,000	2%	86,708,500	2%	87,575,585	2%	88,451,341	2%	433,585,426	DLHKP
Program Pengembangan Penerimaan Daerah dari Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan pertamanan	% peningkatan PAD dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pertamanan			2%	2%	2%		2%		2%		2%		2%		DLHKP		

Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Persampahan	% pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja lingkup persampahan		30%	30%	250,000,000	35%	252,500,000	38%	255,025,000	40%	257,575,250	42%	260,151,003	42%	1,275,251,253	DLHKP
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Melalui Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DBHCHT)	Meningkatnya Luasan RTH	Paket Pengembangan Alun - Alun Kota Kediri		1 paket	16,000,000,000	DLHKP										
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidub Sub Bidang RTH	luasan RTH dari Luas Kota		8.64%	9%	16,000,000,000	9%	17,000,000,000	9%	19,000,000,000	10%	19,000,000,000	9%	19,500,000,000	9%	90,500,000,000	DLHKP
DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN							-		-		-		-			
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	% Penurunan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan		2%	2%	2,000,000,000	2%	2,020,000,000	2%	2,040,200,000	2%	2,060,602,000	2%	2,081,208,020	2%	10,202,010,020	DISHUB
Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Peningkatan kenyamanan masyarakat menggunakan prasarana angkutan umum	Persen (%)		20 %	1,545,475,000	20 %	1,545,475,000	20 %	1,545,475,000	20 %	1,545,475,000	20 %	1,545,475,000	20 %	1,545,475,000	DISHUB
Pembinaan Angkutan Jalan	Peningkatan kualitas Forum LLAJ dan angkutan umum	Persen (%)		20 %	71,570,000	20 %	71,570,000	20 %	71,570,000	20 %	71,570,000	20 %	71,570,000	20 %	71,570,000	DISHUB
Penyediaan Layanan Angkutan Jalan	Peningkatan minat masyarakat menggunakan angkutan umum	Persen (%)		20 %	400,340,000	20 %	400,340,000	20 %	400,340,000	20 %	400,340,000	20 %	400,340,000	20 %	400,340,000	DISHUB
Pogram Pengembangan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	% Fasilitas lalu lintas yang tersedia sesuai kebutuhan		80%	80%	1,000,000,000	80%	1,010,000,000	82%	1,020,100,000	85%	1,030,301,000	86%	1,040,604,010	86%	5,101,005,010	DISHUB
Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi	Peningkatan pelayanan dan pengawasan Dinas Perhubungan berbasis teknologi informasi	Persen (%)		20 %	254,465,000	20 %	254,465,000	20 %	254,465,000	20 %	254,465,000	20 %	254,465,000	20 %	254,465,000	DISHUB
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas sesuai kebutuhan	Persen (%)		20 %	619,574,500	20 %	619,574,500	20 %	619,574,500	20 %	619,574,500	20 %	619,574,500	20 %	619,574,500	DISHUB
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas sesuai kebutuhan	Persen (%)		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		DISHUB
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas sesuai kebutuhan	Persen (%)		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		DISHUB
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas sesuai kebutuhan	Persen (%)		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		DISHUB
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas sesuai kebutuhan	Persen (%)		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		DISHUB
Peningkatan Manajemen dan Sistem Rekyasa Lalu Lintas	Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lalu lintas	Persen (%)		10 %	118,517,000	10 %	118,517,000	10 %	118,517,000	10 %	118,517,000	10 %	118,517,000	10 %	118,517,000	DISHUB

Pengendalian Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Keterlibatan komponen penilaian WTN sektor perhubungan	Persen (%)		80 %	35,092,000	80 %	35,092,000	80 %	35,092,000	80 %	35,092,000	80 %	35,092,000	80 %	35,092,000	DISHUB
Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	% Fasilitas keselamatan LLAJ yang tersedia sesuai kebutuhan		80%	80%	1,000,000,000	80%	1,010,000,000	82%	1,020,100,000	84%	1,030,301,000	86%	1,040,604,010	86%	5,101,005,010	DISHUB
Pengendalian Keselamatan Jalan	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Pengamanan Lalu Lintas		12 bulan	571,143,500	DISHUB										
	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	PDH		6 Stel		6 Stel		6 Stel		6 Stel		6 Stel		6 Stel	DISHUB	
	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	PDL		9 Stel		9 Stel		9 Stel		9 Stel		9 Stel		9 Stel	DISHUB	
Pengembangan Keselamatan LLAJ	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas pelajar	Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas		12 bulan	43,793,000	DISHUB										
	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas pelajar	Cermin Tikungan, RT02, RW01 Kelurahan Kemasan		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	DISHUB	
Audit dan Inspeksi LLAJ	Meningkatnya jumlah angkutan umum laik jalan	Ramp Check angkutan umum		8 bulan	59,268,000	DISHUB										
Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		1 paket	379,638,500	DISHUB										
Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan	-	-		--	3,974,344,000	--	3,974,344,000	--	3,974,344,000	--	3,974,344,000	--	3,974,344,000	--	3,974,344,000	DISHUB
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Orang dan Barang	Meningkatnya pelayanan terminal angkutan orang dan barang	Pengendalian dan operasional terminal angkutan orang dan barang		12 bulan	500,165,000	DISHUB										
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Kelancaran pengelolaan PAD sektor perparkiran	Pengendalian dan operasional pelayanan perparkiran		12 bulan	3,474,179,000	DISHUB										
Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan	% Prasarana Dinas Perhubungan yang dikelola optimal	Persen (%)	75%	75%	3,900,000,000	80%	3,939,000,000	82%	3,978,390,000	83%	4,018,173,900	85%	4,058,355,639	85%	19,893,919,539	DISHUB
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL							-		-		-		-			
KESEKRETARIATAN DAERAH							-		-		-		-			
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Tersebarluasnya informasi peraturan/UU di bidang cukai	Persen (%)	90%	90%	500,000,000	91%	505,000,000	92%	510,050,000	93%	515,150,500	94%	520,302,005	94%	2,550,502,505	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
Program Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	% penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersampaikan	Persen (%)	85%	85%	5,200,000,000	86%	5,252,000,000	87%	5,304,520,000	88%	5,357,565,200	89%	5,411,140,852	89%	26,525,226,052	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								-		-		-		-		
KESEKRETARIATAN DAERAH								-		-		-		-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	10,000,000	91%	10,100,000	92%	10,201,000	93%	10,303,010	94%	10,406,040	94%	51,010,050	BAG. KESRA
Program Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan dan Spiritual	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Spiritual yang difasilitasi Pemerintah Kota Kediri	Persen (%)	90%	90%	2,500,000,000	86%	2,525,000,000	87%	2,550,250,000	88%	2,575,752,500	89%	2,601,510,025	89%	12,752,512,525	BAG. KESRA
Program Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan dan Bina Sosial	Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan dan Bina Sosial yang difasilitasi Pemerintah Kota Kediri	Persen (%)	90%	90%	750,000,000	91%	757,500,000	92%	765,075,000	93%	772,725,750	94%	780,453,008	94%	3,825,753,758	BAG. KESRA
Program Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Kediri	Persen (%)	90%	90%	1,700,000,000	91%	1,717,000,000	92%	1,734,170,000	93%	1,751,511,700	94%	1,769,026,817	94%	8,671,708,517	BAG. KESRA
BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN								-		-		-		-		
KESEKRETARIATAN DAERAH								-		-		-		-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen (%)	85%	90%	50,000,000	91%	50,500,000	92%	51,005,000	93%	51,515,050	94%	52,030,201	94%	255,050,251	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	Persen (%)	85%	90%	90,000,000	91%	90,900,000	92%	91,809,000	93%	92,727,090	94%	93,654,361	94%	459,090,451	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penyusunan RKA dan DPA yang sesuai dengan HSPBJ	Persen (%)	90%	90%	250,000,000	91%	252,500,000	92%	255,025,000	93%	257,575,250	94%	260,151,003	94%	1,275,251,253	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan sistem evaluasi di bidang pembangunan daerah	Persen (%)	74%	74%	550,000,000	75%	555,500,000	76%	561,055,000	77%	566,665,550	78%	572,332,206	78%	2,805,552,756	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Rasio Jumlah Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Jalan dengan Hasil Kerja yang baik	Persen (%)	80%	80%	150,000,000	81%	151,500,000	82%	153,015,000	83%	154,545,150	84%	156,090,602	84%	765,150,752	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								-		-		-		-		
KESEKRETARIATAN DAERAH								-		-		-		-		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen (%)	90.00%	90%	950,000,000	91%	959,500,000	92%	969,095,000	93%	978,785,950	94%	988,573,810	94%	4,845,954,760	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN HUKUM								-		-		-		-		
KESEKRETARIATAN DAERAH								-		-		-		-		
BAGIAN ORGANISASI								-		-		-		-		
KESEKRETARIATAN DAERAH								-		-		-		-		
BAGIAN UMUM								-		-		-		-		
KESEKRETARIATAN DAERAH								-		-		-		-		
Program Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	% peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	90%	90%	4,550,000,000	90%	4,595,500,000	97%	4,641,455,000	98%	4,687,869,550	99%	4,734,748,246	99%	23,209,572,796	BAG. UMUM

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase ketersediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	Persen (%)	90%	90%	5,500,000,000	91%	5,555,000,000	92%	5,610,550,000	93%	5,666,655,500	94%	5,723,322,055	94%	28,055,527,555	BAG. UMUM
Program Peningkatan Layanan Kesekretariatan Daerah	Menunjang Smart City Sekretariat Daerah	Persen (%)	84%	84%	-	85%	-	86%	-	87%	-	88%	-	88%	-	
TOTAL					696,839,054,073		700,043,229,953		694,575,016,450		701,657,879,139		707,163,227,997		3,067,269,676,859	